



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV
DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERA, DIREKTUR JENDERAL
TANAMAN PANGAN, DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN HORTIKULTURA, DIREKTUR SARANA DAN
PRASARANA PERTANIAN, DAN KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV (empat)
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Juni 2020
Waktu	: 10.25 s.d.17.00 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: 1. Target Nasional yang akan dicapai TA 2021 2. Rencana Program/Kegiatan TA 2021 (Volume/ha/unit/per kegiatan) dan output-dampak Produksinya. 3. Rencana Kebutuhan Biaya Per Kegiatan TA 2021 4. <i>Progress Report</i> Kegiatan Penanganan Covid-19 5. Isu-isu Aktual, dan 6. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 47 dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian: 1. <u>Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)</u> 10 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Ir. Mindo Sianipar, S.E., M.Hum.

3. Ir. Effendi Sianipar,
 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 5. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 6. Drs. I Made Urip, M.Si.
 7. H. Yadi Srimulyadi
 8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 9. Maria Lestari, S.Pd.
 10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Budhy Setiawan
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 6. Alien Mus, S.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
7 dari 8 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 3. H. Charles Meikyansah
 4. Julie Sutrisno
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam
 4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
 5. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 6. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.HI., M.M.
 4. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
 4. Slamet Riyadi, S.Psi.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
 2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Lembaga Negara

C. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
4. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian); dan
5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

D. Undangan yang lain

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(suara tidak terekam)

Anggota Komisi IV, baik yang hadir fisik maupun yang virtual.
Yang terhormat Sekretaris Jenderal Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian beserta jajarannya.

Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus pada tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini Selasa, 30 Juni 2020. Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dalam rangka membahas. Saya tegaskan lagi, dalam rangka membahas target nasional yang akan dicapai. Jadi hari ini saya tidak bicara masalah berapa uangnya, tetapi program dan targetnya dulu. Supaya kita jelas. Tahun Anggaran 2021, rencana program kegiatan 2021 volume, hektar, unit, dan perkegiatan Tahun Anggaran 2021 *Progress Report* kegiatan penanganan Covid-19 serta isu-isu lainnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib Rapat Dengar Pendapat hari ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

Rapat Dengar Pendapat pagi ini kita mulai pada pukul 10.25 dan akan diakhiri pada pukul 15.25. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Eselon I.
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hari ini kita mulai pembahasan program utama dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 serta realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Kami mencermati bahwa realisasi anggaran Tahun 2020 masih dibawah 50% bahkan terdapat Eselon I yang penyerapannya berada pada angka 20 sampai 30 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga serapan anggaran masih sangat rendah. Kami berharap dengan waktu yang tersisa Kementerian Pertanian mampu meningkatkan serapan utama dalam penanganan Covid-19.

Namun kami juga mengingatkan agar dalam penggunaan anggaran harus proporsional dan tepat sasaran serta tepat guna. Sejak ditetapkan Covid-19 menjadi pandemi pada bulan Maret 2020 yang lalu terjadi perubahan besar pada perekonomian dunia. Begitu pula dengan kondisi industri, dan konstruksi. Hal itu tentu saja mempengaruhi terhadap anggaran Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian. Lesunya perekonomian dunia tidak bisa dihindari akan berpengaruh terhadap penganggaran Kementerian/Lembaga pada masa yang akan datang.

Oleh sebab itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian agar menyusun RKP KA dan K/L dilakukan dengan seksama. Terukur termasuk dalam hal menentukan skala prioritas serta target-target yang dicapai khususnya dalam hal produksi komoditas pertanian merupakan tugas utama. Saya ingatkan sekali lagi kepada Eselon I jangan membohongi Menterinya. Jangan memberikan Menterinya hal-hal yang diatas langit, contoh: anggaran 2019 targetnya 52 juta ton gabah kering giling.

Kemarin kemarin saya menerima bahan, dengan anggaran 14,7 Triliun malah meningkat jadi 54 juta ton gabah kering giling. Sekali lagi saya ingatkan tolong buat data yang realistis, jangan dibuat-buat. Terpikir tidak oleh kita apabila sampai Desember kita kekurangan beras. Jangan nanti stok nasional cukup, ada stok nasional cukup, cukup, cukup, surplus. Nanti kalau semua saya bedah per Provinsi per Kabupaten saya cek ulang ini bagaimana. Perlu diingat bahwa performa pelaksanaan kegiatan anggaran 2020 dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi. Saya tegaskan akan menjadi *baseline* atau tolak ukur untuk merancang program Tahun 2021.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ingin melihat bagaimana setiap Eselon I menterjemahkan program utama Kementerian Pertanian dan menentukan *output* dan sasaran yang dicapai serta bagaimana Eselon I merancang secara cermat program dan kegiatan yang dimaksud. Setelah melihat justifikasi, program utama *output* serta sasaran yang akan dicapai barulah kita merencanakan.

Seperti yang awal tadi saya bilang program, capaian, rencana, kegiatan baru bicara masalah penganggaran yang diperlukan atau dituangkan sebagai pagu indikatif 2021.

Melalu Rapat Kerja ini kami juga meminta masing-masing Eselon I memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait dengan Tupoksi utama masing-masing Eselon I. Kami mencermati situasi pasar untuk kebutuhan pokok antara lain: beras, bawang merah, cabe, gula, daging, serta ... hot isu setiap saat sebagai contoh untuk bawang merah dan cabe merah. Secara produksi Indonesia mampu mencukupinya. Namun karena ada daerah surplus dan daerah minus maka perlu dicermati untuk mengatasi kelebihan produksi sekaligus memecahkan masalah didaerah yang kekurangan produksi.

Pak Sekjen,

Apakah Satuan Tiga sudah selesai?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Belum.

KETUA RAPAT:

Kalau sudah selesai segera mungkin kirimkan ke kami untuk bentuk pengawasan. Karena dari satuan tiga kami tahu, apakah dilakukan atau tidak. Dan saya meminta jangan *copy-paste* program. Kalau *copy-paste* tidak perlu ada Eselon I. Anak baru lulus kuliah juga lebih jago kalau *copy-paste*. Jadi jangan ini lagi, ini lagi untuk program yang temuannya banyak. Saya tegaskan lagi, untuk program yang temuannya banyak baik oleh BPK maupun tidak berjalan itu tolong dievaluasi kembali karena saya tidak mau ada temuan lagi.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar komoditas yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat harus tercukupi dari sisi jumlah dan kontinuitas setiap waktu. Bagaimana mendapatkan hal tersebut, itulah yang Saudara-Saudara kerjakan. Selain itu pada Tahun 2021 kami melihat situasi dan kondisi perekonomian masih terpengaruh Covid-19.

Oleh karena itu dalam menyusun RKP, RKA-KL Kementerian harus memiliki *sence of* utama dalam upaya pemulihan ekonomi. Pada rapat hari ini Komisi IV menggarisbawahi kembali terhadap program dan kegiatan mendapatkan temuan oleh BPK. Yang harus menjadi masukan, pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan program.

Selain itu beberapa catatan Komisi IV terhadap implementasi program seperti benih jagung. Saya tegaskan lagi, masih ada saya laporan yang masih mau main-main benih jagung. Yang berkualitas jelek, distribusi Alsintan sampai ke titik terdekat dengan lokasi penerima, distribusi pupuk bersubsidi dan lain-lain agar diperhatikan dengan cermat. Saya, mungkin kita semua tahu belum lama ini kita dihebohkan oleh kasus jamur enoki yang

bermasalah. Dimana fungsi Badan Karantina disini. Dimana juga fungsinya Hortikultura. Harus dijelaskan. Dan ini baru 1 temuan, dan ketemu. Dan saya yakin masih banyak lagi yang lainnya. Saya mengingatkan tolong jalankan Tupoksi masing-masing. Dalam program yang akan datang apabila ada Badan Litbang menyalurkan bantuan ayam, saya akan coret karena itu bukan Tupoksinya dia. Itu Tupoksinya Badan Dirjen PKH. Jangan diaduk-aduklah. Karena sekarang ini Anggota Komisi IV ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jagoan semua ini dan sangat kritis masalah itu. Dan saya tidak mau mitra saya kena masalah.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut diatas.

Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI termasuk yang mengikuti melalui virtual, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Alhamdulillah kita pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Inshaa Allah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali RDP pada hari ini, perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih atas undangan hari ini dengan agenda, pertama rencana program kegiatan anggaran Tahun Anggaran 2021 yang meliputi target nasional yang akan dicapai, rencana program dan kegiatan, serta rencana kebutuhan biaya per kegiatan Tahun 2021. Dan yang kedua, *Progress Report* kegiatan penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 serta isu-isu aktual.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Sebagai agenda pertama kami mewakili jajaran Eselon I akan mengantarkan penyampaian rencana kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021. Penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun 2021 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. RKP Tahun 2021 tersebut berisi 7 prioritas nasional. Pemenuhan pertanian Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkontribusi pada prioritas nasional I yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan

berkualitas dan berkeadilan. Selanjutnya dari program nasional I tersebut dilakukan penjabaran menjadi 8 program prioritas. Dimana Kementerian Pertanian terkait kepada program prioritas 3 tentang peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan program prioritas 6 tentang peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi disektor rill dan industrialisasi. Dari program prioritas yang telah ditetapkan melalui RPJMN Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti dengan menyusun program kerja Tahun 2021 yang telah diselaraskan pula dengan nomenklatur Surat Bersama pagu indikatif dari Nomor S376/2020 dan Nomor B310/2020, meliputi program dukungan manajemen, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta program pendidikan dan pelatihan fokasi.

Dalam rangka menjabarkan program kerja Tahun 2021 Kementerian Pertanian telah merancang target produksi komoditas pangan utama. Mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan melaksanakan fungsi sebagai penyedia pangan pokok bagi seluruh penduduk dan produk pertanian penting lainnya. Diantaranya, Dirjen Tanaman Pangan meliputi produksi padi sebesar 62,50 juta ton dan jagung 25,38 juta ton. Dirjen Hortikultura meliputi produksi bawang merah sebesar 1,60 juta ton, cabe besar 1,25 juta ton, cabe rawit 1,40 juta ton dan bawang putih 102.000 ton. Dirjen Perkebunan meliputi produksi kopi 834,75 Ribu ton, kakao 682,66 Ribu ton, kelapa 2,77 juta ton dan produksi lainnya, serta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mentargetkan produksi total daging sebesar 5,15 juta ton meliputi daging sapi kerbau, kambing, domba, ayam ras pedaging lokal, itik dan babi. Guna mendukung pelaksanaan program diatas Kementerian Pertanian telah mendapatkan pagu indikatif Tahun 2021 sebesar 18,43 Triliun. Alokasi terbesar diarahkan pada program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar 10,3 Triliun yang berada di Dirjen TP, Dirjen Horti, Dirjen PKH, dan Dirjen PSP, Badan PPSDMP, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian. Selanjutnya program dukungan manajemen sebesar 5,63 Triliun terdistribusi diseluruh Eselon I.

Untuk program, nilai tambah dan daya saing industri sebesar 1,41 Triliun ini berada di Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Horti, Dirjen Perkebunan dan Dirjen PKH. Sisanya program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi hanya ada di Badan Litbang, begitu pula program pendidikan dan pelatihan fokasi hanya berada di Badan PPSDMP Pertanian.

Terkait dengan rencana program kegiatan dan anggaran Tahun 2021 kami laporkan bahwa Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan masing-masing Eselon I dalam penyiapan Bahan RDP yang telah dijadwalkan selama 2 hari ini. Ijinkan pada saatnya nanti Eselon I untuk dapat memaparkan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang terhormat sesuai jadwal yang telah kami terima.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Khusus perencanaan program dan kegiatan lingkup Sekjen Kementerian Pertanian, perlu kami laporkan kepada Pimpinan bahwa pada Tahun 2021 Sekretariat Jenderal melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran program Sekretariat Jenderal Tahun 2021 ada 2 yaitu satu terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dan yang kedua terkelolanya anggaran Sekjen yang akuntabel dan berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut Sekjen mendapatkan pagu indikatif sebesar 1,76 Triliun yang dijabarkan dalam 11 kegiatan di Biro Pusat. Dari total anggaran tersebut terdapat alokasi sebesar 1,25 Triliun yang diperuntukan bagi pembayaran tunjangan kinerja sebanyak 17.246 pegawai seluruh Kementerian Pertanian.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Sebagai agenda kedua ijin kami melaporkan tentang perkembangan kegiatan penanganan Covid-19. Namun sebelumnya perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua bahwa terkait perkembangan serapan anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan akhir Juni 2020. Seperti kita ketahui bahwa anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 diperuntukan bagi kelancaran pelaksanaan 9 program utama yaitu pengembangan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, fasilitasi pembiayaan infrastruktur dan Alsintan, peningkatan produksi tanaman pangan yang berbasis korporasi, pengembangan kawasan hortikultura berdaya saing, gerakan peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing perkebunan, peningkatan populasi produktivitas dan mutu genetik ternak potong unggas, akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih bibit, pengentasan daerah rawan pangan, serta distribusi dan pengendalian dan harga pangan serta penguatan perkarantina dan akselerasi ekspor. Guna mendukung pelaksanaan program utama Tahun 2020 agar berjalan optimal. Pada awalnya Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar 21,05 Triliun. Namun setelah terjadi pandemi Covid anggaran Kementan mengalami penyesuaian sehingga sebesar 14,06 Triliun. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 27 Juni setelah memasukkan komponen *outstanding contract* ini sebesar 16,19 Triliun atau 44,03%, tetapi kalau hanya dari realisasinya ini baru 33,32%. Realisasi anggaran tertinggi termasuk outstanding kontrak yang diatas 50% adalah Dirjen Tanaman Pangan, ini 2,14 Triliun atau 57,52%. Selanjutnya Badan Karantina Pertanian, ini 54,01%, dan BPPSDMP 50,23%.

Upaya keras telah dilakukan melalui sinergi antara Eselon I dalam melaksanakan program Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini walaupun beberapa bulan terakhir ini menghadapi pandemi Covid-19. Diharapkan setelah melewati masa-masa kritis selama pandemi melalui sinergi yang kuat antara Eselon I dengan Pemerintah Daerah diharapkan 6 bulan kedepan *Insyah Allah* kami dapat melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target program bisa dapat dicapai. Khusus kegiatan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 Kementerian Pertanian merealokasi anggaran sebesar 2,66 Triliun yang dibagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama dukungan pencegahan, penularan Covid ini 40,42 Miliar,

pengamanan ketersediaan pangan 1,46 Triliun dan *social safety net* yang sebagian besar dalam bentuk padat karya sebesar 1,15 Triliun.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perlambatan semua aspek kehidupan namun melalui kerja keras dalam penyediaan pangan penduduk dengan memprioritaskan pemenuhan pangan dari produksi dalam negeri semaksimal mungkin ini telah telah berdampak pada harga pangan, sebagai contoh pangan stabil selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri yang telah kita lewati. Presentasi realisasi anggaran pengamanan ketersediaan pangan sampai dengan akhir Juli mencapai 40,48% dari pagu 1,46 Triliun. Langkah konkrit yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam memperkuat ketersediaan dan stabilisasi harga pangan selain melalui pengembangan pasar tani atau toko tani untuk memangkas rantai pasok juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya tergantung pada pangan beras. Sebaliknya memperluas pilihannya melalui diversifikasi pangan lokal non beras, serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber peningkatan ketersediaan pangan.

Langkah selanjutnya Kementerian Pertanian segera meningkatkan sinergi, baik di Pusat maupun di Daerah untuk mengamankan ketersediaan pangan 6 bulan kedepan. Kementerian Pertanian mendorong upaya percepatan tanam pada musim tanam 2 Tahun 2020 dan mengakselerasi kegiatan peningkatan produksi komoditas pertanian lainnya yang terkendala selama masa awal pandemi Covid-19. Kegiatan *social safety net* khususnya dalam bentuk kegiatan padat karya, ini belum terlaksana sesuai harapan sehingga dilakukan upaya khusus untuk segera dipercepat pelaksanaannya. Sampai dengan akhir Juni 2020 kegiatan melalui *social safety net* telah mencapai 45,58% dan akan terus dipercepat disisa waktu 6 bulan kedepan.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan RDP hari ini. Mohon ijin apabila diperkenankan untuk selanjutnya saya minta Dirjen Tanaman Pangan untuk menyampaikan program dan kegiatannya.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Sebelum ke Dirjen Tanaman Pangan, teman-teman Anggota Komisi IV tolong diperhatikan. Bahan yang diberikan ini *copy-paste* dari Tahun 2020 Cuma ganti angka sedikit. Tolong diperhatikan. Kemarin saya sudah ingatkan, kita tidak bicara masalah uangnya tetapi masalah program, kegiatan dan capaian. Cobalah lihat. Kalau begini kan sudah saya ingatkan tadi dari awal. Jangan ada *copy-paste* kecuali ada tambahan dari Dirjen Hortikultura yang lain sama semua dengan tahun yang lalu. Bagaimana mau peningkatan? Saya bingung juga kalau begini. Saya sudah ingatkan berkali-kali, mohon sekali lagi saya katakan jangan samakan dengan periode yang lalu. Yang

sekarang di Komisi IV semuanya sangat kritis. Beliau-Beliau ini ada Bupati ada 6-7 personal, sangat teliti. Cobalah lihat. Kalau perlu kita break kita stop RDP pagi ini sekalian kalau caranya seperti ini. Kemarin sudah saya bilang, tolong.

Terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan.

Silakan Eselon I mau menjelaskan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Dirjen Tanaman Pangan menyampaikan materi yang pertama realisasi anggaran 2020. Tolong slidenya. Realisasi anggaran tadi disampaikan Pak Sekjen, Dirjen Tanaman Pangan untuk SP2D 28,1%. Kemudian posisi sekarang outstanding kontrak 29,4% sehingga totalnya 57,5%.

Kemudian selanjutnya kami rinci kinerja menurut Provinsi, yang pertama Provinsi tertinggi serapannya 69% ditambah *standing contract* 13%. Jadi sudah mencapai 83% itu Provinsi Lampung diikuti Gorontalo, total *outstanding contract* sama realisasi keuangannya 84%, DIY, Sulawesi Tenggara, Jambi dan seterusnya. Yang terendah ada di slide berikutnya. Ini Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, NTT, Sulsel, ini masih dibawah 15% SP2D tapi kontraknya sudah 60-an persen. Jadi posisi ini diharapkan dari standing kontrak dalam waktu sebulan, 2 bulan sudah dalam bentuk SP2D karena masih berjalan.

Lanjut. Kegiatan terkait dengan padat karya Tahun 2020 di Dirjen Tanaman Pangan sebagian besar untuk kegiatan ngolah tanah dan percepatan tanam di 2020 untuk mengejar pada MT2 ini, kemudian juga padat karya untuk penanganan Hama penyakit OPT termasuk kekeringan. Jadi diprediksi nanti kekeringan puncaknya Bulan Agustus Bapak/Ibu sekalian. Kami kejar untuk direalisasikan pada Bulan itu. Untuk olah tanah sudah mulai realisasi hampir 60%, posisi sekarang 10.000 dari 25.000.

Lanjut. Berikut sebaran per Provinsi baik target, realisasi termasuk kemampuan menyerap tenaga kerja prediksinya kami sajikan pada halaman 9, baik padat karya untuk pengendalian hama penyakit maupun penanganan kekeringan. Kalau padat karya gerakan olah tanah dan tanam per Provinsi, targetnya 13.000 untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, realisasi 10.000 hektar. Tenaga kerja diprediksi 1 hektar 4 orang bisa 100.000 orang.

Lanjut. Untuk rancangan 2021 kami mengikuti indikator-indikator yang tertuang didalam RPJM dan surat Menteri Keuangan Bapenas.

Lanjut. Tadi disampaikan Pak Sekjen target untuk tanaman pangan posisi 2020 di kotak sebelah kiri untuk program APBN, padi 2,4 juta hektar, jagung 1,4 juta hektar, dan seterusnya. Sasaran produksi 2020 sebesar untuk padi 59,1 juta ton GKG. Ijin lapor Pak ketua, capaian dari target 2020 sampai Juli sudah dapat 34,5 juta ton GKG. Dibandingkan tahun lalu 2019 angka BPS Bapak ijin. Kami menggunakan angka BPS 1 data. Capaian tahun lalu 2019 BPS sebesar 54,6 juta ton GKG. Itu yang padi, Yang jagung ada di layar.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Saya mau tanya, dengan angka yang menurun, kemudian ada peningkatan produksi pakai ilmu apa? Kalau begitu tidak perlu nanti saya buat ke Banggar tidak perlu ada penambahan anggaran, cukup 18,4 saja. 18,4 bisa menghasilkan 59 juta ton gabah kering giling. Ini ilmunya apa coba. Tolong jangan buat target asal-asalan, tolong. Tadi anda mengatakan Bulan Agustus terjadi kemarau panjang, bagaimana mau panen, bagaimana mau tanam. Coba, tolong ajarin saya. Saya tidak ngerti mungkin anda hebat sekali. Ajarin saya, bagaimana dengan anggaran turun tapi peningkatan produksinya naik. Coba anda berani bikin kontrak dengan saya? Mencapai 59,1 juta ton gabah kering giling.

Sekali lagi saya ingatkan tolong stop target setinggi gunung pencapaian Cuma sekaki bukit. Belum lama ini ada ekspor jagung. Kita berpikirlah logika. Indonesia masih kekurangan jagung untuk pakan ternak. Cobalah jangan buat asal-asalan. Tolong sekali, saya ingatkan jangan *copy-paste*. Buat target tersendiri, pikirkan. Dengan uang segini, saya Cuma sampai ke Bandung. Kalau ongkosnya tambah, *Inya Allah* saya bisa lebih sampai ke Tasikmalaya. Nah kalau makin uangnya turun, terus targetnya meninggi ini kan tidak logika. Jadi 21 Triliun targetnya 52 Juta. Sekarang 18,4 targetnya 59.

Ya sudah lanjutkan saja.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Terima kasih saya lanjutkan.

Berikutnya, ijin lapor realisasi KUR tanaman pangan terutama padi. KUR tanaman pangan 6 Triliun Bapak Ketua, kemudian padinya 4,3 Triliun untuk mendorong kegiatan itu.

Lanjut. Rincian volume output anggaran dan kontribusi terhadap produksi, dan kolom paling kiri adalah target-target output. Untuk padi, baik untuk padi sawah, lahan kering, padi rawa, beras khusus, beras organik dan lainnya Tahun 2021 rencana 2,85 juta hektar, anggaran 1,5 Triliun, target produksi 62,5 juta ton GKG, kontribusi dari APBN akan mendukung ke produksi 15,1 juta ton, kemudian menyerap tenaga kerja sekitar 8,5 juta tenaga kerja. Untuk jagung, outputnya 1,85 juta hektar, anggaran 1,33 Triliun,

target produksi nasional 25,3 juta ton ... kering, kontribusi dari APBN 10,1 juta ton, tenaga kerja 5,5. Kemudian juga dibawahnya target program untuk kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang ijo, porang, sorgum, dan kegiatan-kegiatan *supporting* termasuk perbanyak benih sumber, sertifikasi pengawasan, pengendalian hama penyakit, organisme pengganggu tanaman, penanganan dampak kekeringan dan banjir 29.000 hektar, alat mesin pasca panen dan pengolahan 5.105 unit, kemudian pemasaran investasi dan kegiatan operasional, gaji, honor, dan lainnya.

Lanjut. Ijin skenario kami untuk mencapai target 2021 sudah kami *breakdown* per Provinsi, per Kabupaten. Untuk Pulau Sumatera kinerja 2019 luas panen 2,5 juta hektar, targetnya ditingkatkan 2021=2,6 juta hektar. Indeks pertanaman 1,15 menjadi 1,3. Produktivitas kuncinya nanti dipenggunaan benih unggul bersertifikat supaya nanti dari 4,36 menjadi 4,54 ton per hektar. Itu untuk Provinsi Sumatera. Kemudian untuk Pulau Jawa produktivitas yang sekarang 2019 itu 5,36 ditingkatkan menjadi 5,51 ton per hektar. Kemudian Provinsi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Sehingga akan mencapai yang bawah warna hijau kecil ini tulisannya, dari 2019 kita sandingkan ke target 2021. Kuncinya ijin Pak Ketua, Bapak/Ibu Anggota, kesiapan air kemudian kualitas benih dan memenuhi 5 syarat tepat kami mengejar itu. Musim kering tahun lalu terbukti bisa 2019 Bulan Agustus tanam yang dipanen Bulan November itu mencapai 400 sampai 500 ribu hektar panen. Ini data 2019. Nah kami menyimak itu untuk mengantisipasi supaya bisa diminimalisir baik nanti Bulan Agustus maupun 2021.

Lanjut. Berikut tabel kecil sasaran per Provinsi menurut Bulan 2020 Januari-Juli, kemudian Agustus-Desember, sehingga 2020 Januari-Desember diperoleh panen 10,5 juta hektar, kemudian perkiraan produksi 53,5. Kemudian 2021 sebelah kanan menjadi target kami yang akan kita kejar.

Tayangan berikutnya, target untuk produksi padi dan jagung per Provinsi. 2021 target luas panen 11,7. Kalau panen 2021 dimulai Oktober nanti tanamnya Pak, akan dipanen di Januari 2021. Jadi sudah mulai ngejar tanam di Oktober, November, Desember untuk dihitung produksinya pada panen Januari, Februari, Maret dengan produktivitas ditingkatkan 5,33 sehingga ketemu target produksi itu. Demikian juga untuk jagung. Luas panen 4,5 juta hektar, produktivitas 5,53 sehingga diperoleh target 25,3 juta ton pipil kering. Ini untuk Aceh sampai Bali dan seterusnya, NTB sampai Papua kami (suara tidak jelas).

Lanjut. Strategi pencapaian produksi melakukan percepatan tanam. Disaat ini April-September dengan target 5,6 juta hektar, posisi angka capaian sudah mencapai sekitar 57% sampai Juni, masih ada 1 hari, hari ini. Nanti malam nunggu data dari daerah. Data yang dikumpulkan lewat Dinas. Kemudian juga melakukan gerakan percepatan olah tanah dan tanam pada areal-areal yang tersedia, air atau sumber-sumber air. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada melalui pompanisasi, pipanisasi di musim kemarau memanfaatkan waduk, embung, sumur dangkal termasuk *long storage* supaya meningkatkan IP yang

biasa 1 menjadi 2 dan targetnya yang 2 bisa ditingkatkan menjadi 3. Penggunaan benih unggul bersertifikat, ijin Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota. Untuk benih 2020 sudah melakukan uji coba, kemasan benih kita kasih *barcode* sehingga kita bisa mantau dan petani pun bisa yang diterima bisa ngecek dari HP Androidnya, varietas, kadaluarsa, produsennya siapa bisa termonitor sehingga lebih *tresible* sebagai perbaikan dari pelaksanaan 2019.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Apa petani di kampung-kampung punya semua HP Android?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Tidak semua Pak.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi kalau Anda bilang pakai *barcode* ya mungkin Pulau Jawa saja sebagian besar, contoh kartu tani. Sampai sekarang yang baru berjalan baru beberapa persen. Saya nih kadang-kadang tidak habis berpikir juga cara-cara bicara begini. Pakai pompanisasi, pakai ini. Kalau airnya tidak ada, air laut yang mau disedot. Cobalah yang realistis sedikit deh. Saya ini mengkritik karena saya mau anda semua disini sukses, maju, hebat. Saya Cuma punya kebanggaan kami di Komisi IV ini. Tolong sekali lagi. Itu saja.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Ya terima kasih.

Butir-butir berikutnya juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada, mendorong penyerapan KUR, kemudian juga pengamanan produksi dari pengendalian hama penyakit dan dampak perubahan iklim.

Demikian hal-hal pokok yang kami sampaikan dari Tanaman Pangan. Lebih kurangnya mohon maaf.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Para Anggota yang kami hormati,
Pak Sekjen, para Eselon I, dan seluruh hadirin yang kami banggakan.

Perkenankan Direktorat Jenderal Hortikultura menyampaikan rencana kegiatan di Tahun 2021.

Mohon ijin Pak Ketua, para Anggota yang kami hormati. Jadi disini kami menyebutkan ada target luas tanam nasional untuk bawang merah, cabe, dan lain sebagainya. Ini untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bawang merah, cabe Tahun 2021 ini berapa target produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dan kalau ada kelebihan produksi kita arahkan nantinya untuk bisa ekspor. Nah dukungan APBN dengan anggaran indikatif yang sudah dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, untuk bawang merah 5.000 hektar, untuk cabe besar 3.775 hektar, untuk cabe rawit, 3.225 hektar. Bawang putih ini yang menarik, mohon ijin Pak Ketua. Jadi bawang putih, kami sudah menghitung untuk target swasembada memerlukan luas areal 78.600 hektar dengan target produksi 622.000 ton. APBN sesuai dengan ketersediaan benih yang ada.

KETUA RAPAT:

Bisa tolong jelaskan lagi. Luasannya berapa?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Luasan untuk bawang putih Pak?

KETUA RAPAT:

Berapa?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasional 78.600 hektar Pak.

KETUA RAPAT:

Targetnya?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Ini untuk memenuhi kebutuhan. Untuk luas tanam yang dialokasikan saat ini. Mohon ijin Pak Ketua, target produksi 622.000 ton.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak usah import lagi?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Kalau ini tercapai. Namun dukungan APBN hanya 5.000 hektar untuk Tahun 2021 Pak. Jadi target untuk memenuhi kebutuhan nasional, namun dukungan APBN hanya ada 5.000 hektar untuk Tahun 2021 Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau luas tanamnya 78.600 hektar. Indonesia tidak impor lagi.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Betul.

KETUA RAPAT:

Ini katanya. Tetapi kewajiban tanam bagaimana. Saya minta penjelasan kewajiban tanam. Kemudian juga minta penjelasan 32 importir tanpa RIPH bisa masuk ke Indonesia. Jangan kita bicara begini, Kementerian Perdagangan punya domain Peraturan Undang-Undang sendiri. Kementerian Pertanian juga punya domain Undang-Undang dan Peraturan sendiri. Jadi jangan mau diatur dong. Anda punya peraturan silakan pakai. Kita juga punya peraturan. Jangan alasan Rakortas, Rakortas, Rakortas. Tidak bisa. Terus kalau Rakortas bilang, besok masukin daging ini masukin saja, tidak usah pakai apa-apa lagi. Bagaimana tidak kacau ini negara kalau seperti ini. Saya minta penjelasan wajib tanam itu.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Baik Pak. Siap.

Jadi ini dukungan APBN untuk Tahun 2021. Data-data ini sumber datanya dari mana, ada penjelasannya dibawah. Mohon ijin dari yang ada, kemarin kami belum menambahkan sumber datanya darimana. Ini sumber datanya ada disini. Sudah kami perbaiki untuk hal ini.

Lanjut. Ini untuk pengembangan durian, jeruk, salak, pisang. Jadi luas tanam nasionalnya target 2021 ini ada 12.000 hektar, jeruk 5200 hektar, salak 27 dan lain sebagainya. Ini penambahan APBN. Ini alokasi anggarannya untuk durian 600 hektar, untuk jeruk 2500 hektar, untuk salak 240 hektar, untuk pisang, 1300 hektar dan lain sebagainya. Nah anggaran yang dialokasikan untuk buah dan florikultura kurang lebih sekitar 242 Miliar dari anggaran pagu indikatif yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Hortikultura.

Lanjut. Untuk rancangan anggaran untuk dukungan manajemen dan lain-lain. Disini ada alokasi total sekitar 155 Miliar. Ini meliputi gaji, layanan sarana-prasarana untuk belanja modal, layanan perkantoran, untuk honor petugas THL, dan honor petugas data dilapangan dan lain sebagainya, termasuk honor mantri tani. Ini juga ada 7.287 mantri tani senilai 21 Miliar.

Jadi rinciannya disampaikan demikian. Total alokasi pagu indikatif untuk Direktorat Jenderal Hortikultura 956 Miliar Rupiah.

Lanjut. Terkait dengan progress Covid-19, ini memang masih ada beberapa anggaran yang masih nol Pak. Jadi memang kami alokasikan antara lain, untuk yang 1 Miliar ini adalah untuk bantuan sewa gudang. Seandainya ada gejolak komoditas hortikultura kami menunggu dari daerah kalau ada butuh untuk tunda jual untuk sewa gudang kami siapkan dan sudah kita alokasikan anggarannya.

Terus juga untuk bantuan pemasaran hortikultura. Seandainya ada gejolak harga kami siap untuk terjun untuk membantu dalam hal distribusi. Ini kita alokasikan 12 Miliar untuk ini namun masih terpakai 0,38 Miliar. Jadi kami kalau ada gejolak kami bisa segera untuk turun untuk memberikan bantuan distribusi. Untuk bantuan benih, ini kami tinggal menunggu CPCL. Inshaa Allah Bulan Juni ini semua sudah masuk CPCL, bisa lebih dari 50% serapan untuk bantuan benih, termasuk juga bantuan untuk penyediaan produk hortikultura apabila ada gejolak harga di masyarakat terkait dengan harga jatuh, dan kita bisa menyerap dari petani. Ini sudah kita siapkan anggarannya. Tinggal menunggu dimana lokasinya, kami segera bergerak untuk hal itu.

Lanjut. Ini untuk contohnya kemarin untuk bawang merah. Kami memberikan bantuan distribusi Bapak/Ibu semua yang kami hormati. Jadi bawang merah dari Brebes, dari Cirebon kami kirim ke Palembang, terus kami kirim ke Pekanbaru, kami kirim juga ke Maluku Utara dan Papua. Dan ini semua biaya distribusinya dari Direktorat Jenderal Hortikultura.

Lanjut. Ini juga dari Brebes kami distribusikan ke daerah-daerah dimana yang masih ada surplus ke daerah yang minus.

Lanjut. Ini untuk bawang putih mohon ijin Pak Ketua. Jadi kami sudah melakukan kerja sama dengan Badan Litbang Pertanian sudah kami identifikasi. Potensi lahan yang sesuai untuk bawang putih ini mencapai 1,3. Mohon maaf ini agak ketutup dengan. 1,3 juta hektar. Lokasinya dimana saja, di Kabupaten mana saja yang punya potensi ada data-datanya semua disini, lengkap.

Lanjut. Ini kebutuhan untuk swasembada bawang putih. Tadi seperti yang kami sampaikan 78.600 hektar kurang lebih dengan target produksi 622.000 ton, ini anggaran yang dibutuhkan dengan alokasi demikian ini kurang lebih sekitar 4,32 Triliun untuk bisa memenuhi semua ini. Namun memang.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Saya tanyakan, balik lagi sebelum ini. Contoh, tempat lain saya tidak paham. Di Lampung itu ada berapa.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Di Lampung ada 1.908 hektar potensinya, potensi lahan. Lampung Barat, terus Tanggamus ada 9.343 hektar, Kota Pagar Alam ada 2.314 hektar.

KETUA RAPAT:

Kota Pagar Alam itu tidak termasuk Lampung.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Oh ya maaf.

KETUA RAPAT:

Tolong nanti dicek. Siapa orang yang kesana. Kalau di Tanggamus ada 9000 hektar lebih, di Lampung Barat ada 1000 lebih itu tidak masuk akal. Itu Cuma yang bisa ditanam bawang putih 1 Kecamatan-Kecamatan. Itu pun sedikit sekali dan gagal. Saya tegaskan lagi, gagal. Karena kebetulan Bupatinya, Wakil Bupatinya, Ketua DPD-nya itu orang saya semua disana. Begitu juga Lampung Barat, gagal. Jadi kalau bilang luasan ini segini ya boleh saja. Mau dibilang 10 Juta juga boleh tetapi gagal. Benih yang ditanam dengan hasilnya ya sama. Saya kan melihat perkembangan di Tanggamus. Bahkan saya ikut memantau melihatnya. Cobalah dicek lagi yang APBN maupun yang swasta semua gagal. jadi jangan juga mau dibohongin. Jadi kalau bilang ada sejuta lebih saya tidak yakin.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, bisa interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Bisa.

Silakan Pak Andi.

Berkaitan dengan bawang putih ini.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Iya Pak Ketua. Benar.

Pertama, mengenai masalah data ya. Ini kan kita bicarakan Pak Dirjen. Saya ini tidak melihat di halaman ini, Bapak ini kan komoditas bawang putih. Target luas tanam 78.000, target produksi bombastis 622 Pak Ketua ya. Luas tanam yang dibiayai oleh APBN Cuma 5000, ini bagaimana sambungannya.

Kemudian yang kedua, saya tidak melihat juga anggaran Bapak APBN berapa 2021 untuk bawang putih. Ini saya belum melihat disini Pak. Di katakan luas tanam 5000 hektar, kemudian perlindungan 1000 hektar, uangnya berapa? Kita ingin lihat. Kalau targetnya Bapak 622.000 ton ini tidak perlu ada impor Pak Ketua. Saya tegaskan Ketua, bahwa tugas DPR adalah melaksanakan dan mengawasi Undang-Undang itu. Pemerintah melanggar Undang-Undang Hortikultura Ketua. Kalau dia tidak memerlukan RIPH untuk impor. Dan Kementerian Perdagangan tidak bisa hanya keputusan Menteri bisa melanggar Undang-Undang. Ini bagaimana negara kita ini. Ada wartawan, catat saja. Pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang, dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang dan pengawasan Undang-Undang kita tidak akan pernah setuju ini dilanggar walaupun ini domainnya Komisi VI Ketua ya karena perdagangan disana. Rakortas, Rakortas ya silakan saja Rakortas tapi jangan melanggar Undang-Undang. Ya negara ini kacau karena banyak orang yang melanggar Undang-Undang. Begitu Ketua. Jadi mungkin datanya perlu dilengkapi sehingga kita melihat berapa APBN ini (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Pak Andi,

Saya jelaskan hari ini kita tidak bicara nominal, uang. Tetapi yang saya mau bahas adalah program, target, sasaran. Nanti baru kita bicara uang. Kalau uang dulu nanti seperti yang lalu. Tiba-tiba uangnya sudah terpakai untuk ini. Kita tidak bisa lagi ngawasin, sudah kontrak. Nyatanya capaiannya paling besar Cuma 50%, yang lain tidak ada lagi. Bahkan Ibu Endang WA saya, sudah distop di PHK, tenaga kerja kontrak karena habis uang. Coba kita buat satuan tiga sama saya. Saya bedah sekalian. Tidak ada itu. Jadi program dulu. Jadi program itu program bibitnya berapa, pencapaiannya berapa, biaya kerjanya berapa, lain-lainnya berapa. Itu baru namanya kerja. Jangan tiba-tiba Bu Endang complain dengan saya menyampaikan dari Kepala Litbang sudah di PHK. Ini kan tidak masuk akal. Nyatanya masih belum 40%. Ya Pak Andi ya. Jadi saya ingin penjelasan 1 lagi. Waktu bilang tidak ada RIPH itu siapa yang memutuskan? Dijawab Pak Karantina atau Dirjen Hortikultura.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Kami pada waktu Rakortas menyampaikan RIPH tetap diperlukan.

KETUA RAPAT:

Rakortas siapa yang pimpin.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Ibu Deputi.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, Kepala Badan Karantina coba tolong jelaskan.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Mohon ijin Pak Ketua.

Terima kasih.

Kami dalam rapat ini tidak menyebutkan tidak dibutuhkan RIPH Pak. Kami tidak menyebutkan.

KETUA RAPAT:

Tetapi waktu masuk tidak diperiksa? Ada RIPH-nya atau tidak.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Kami periksa, kami catat.

KETUA RAPAT:

Ya kalau Cuma periksa, catat ya tidak ada gunanya. Ini kan Rakortas dipimpin seorang Deputy memutuskan tidak ada RIPH. Yang saya khawatirkan, besok Pak Sekjen pecat Menteri-nya, itu yang saya takutkan. Masa seorang Deputy berani melanggar peraturan yang dibuat oleh sesama Pemerintah. Ya kalau gitu nanti begini saja deh, untuk gampang-nya, untuk masalah ini kita buat Panja saja supaya terang benderang.

Terima kasih.

Lanjutkan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan,

Masalah bawang putih di Garut. Karena data-data Garut. Pak Dirjen, sebetulnya Garut itu menolak bawang putih karena mereka berpikir selalu gagal. Nah makanya kalau hari ini dimasukan sampai 31.000 hektar sebetulnya daerahnya yang sebelah mana, karena kita datang dengan Kepala Dinas waktu itu kita malah sampaikan. Garut kalau bawang merah oke tapi kalau bawang putih tidak siap karena memang selalu gagal bawang putih.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi pengalaman saya, saya melihat di beberapa wilayah. Kalau bawang putih itu kan pasti didataran tinggi minimal 900 dari permukaan laut. Dan umumnya kan itu kan perbukitan. Jadi karena mengejar target pengusaha juga nguber petani ya dijalankanlah. Apa yang terjadi, otomatis longsor. Jadi kita jangan memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau longsor apa yang terjadi. Kan kasihan juga rakyatnya. Bapak-Bapak ini pemimpin loh. Pemimpin itu untuk membantu rakyat.

Ya lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Terima kasih Pak Ketua.

Mohon ijin.

Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati.

Jadi yang kami sampaikan disini adalah potensi sumber daya lahannya berdasarkan pemetaan yang ada itu ada potensi sekian. Nah sedangkan tadi yang dipaparkan yang di slide kami yang pertama, yang 78.600 hektar. Kalau kita mau swasembada kita perlu lahan 78.600 hektar. Nah potensi sumber daya lahannya adalah 1,3 juta hektar. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Jadi mohon ijin Bapak/Ibu para Anggota yang kami hormati, sekilas penjelasan kami demikian.

Lanjut. Jadi saat ini bawang putih yang sudah masuk dan jumlah perusahaan ada 101 perusahaan dengan jumlah total RIPH ada 951.657 ton dan realisasi per tanggal 26 Juni baru 279.000 ton atau kurang lebih sekitar 50% dari kebutuhan nasional yang baru masuk ke Indonesia.

Lanjut. Kami sampaikan juga disini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi ada 33 perusahaan yang memasukan tanpa RIPH. Kami jelaskan lagi ada 33 perusahaan yang memasukan tanpa RIPH, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sudah menindaklanjutinya dengan menyampaikan laporan ke Satgas Pangan. Direktorat Jenderal Pangan sudah melaporkannya ke Satgas Pangan 33 perusahaan tersebut yang masuk tanpa RIPH dengan jumlah sekitar 50.000 ton yang dimasukan tanpa RIPH atau tepatnya 48.792 ton. Ini sudah kami laporkan ke Satgas Pangan.

Lanjut. Terkait dengan mekanisme pengawasan wajib tanam. Nanti ini akan dari dari 101 importir yang sudah dapat RIPH akan melaksanakan wajib tanamnya dan menyelesaikannya 1 tahun sejak RIPH terbit. Jadi kami sudah membuat yang namanya tools, sebutnya sebagai sistem monitoring tanam hortikultura strategis. Jadi sejak penerbitan RIPH nanti ada pengajuan CPCL petani dan rencana produksi. Disini sesuai dengan apa yang sudah kami siapkan supaya tidak ada campur aduk antara kegiatan APBN maupun kegiatan importir wajib tanam kita pisahkan lokasinya, kita lakukan deliniasi

atau pemisahan berdasarkan Kecamatan misalnya Temanggung Kecamatan A khusus semuanya untuk APBN, Kecamatan B khusus semuanya untuk importir wajib tanam. Jadi kita lakukan deliniasi wilayah disini, pengajuan CPCL petani, rencana tanam dan produksi. Selanjutnya kita lakukan verifikasi tanam. Ini pengawasan realisasi tanam dan ini harus tercatat di SPHSBS (Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran Buah Semusim). Ini tercatat semuanya datanya disana, langsung kita lakukan verifikasi produksi yang harus tercatat juga di BPS. Produksinya itu berapa. Setelah ini semua tercatat terverifikasi semuanya baru kita terbitkan yang namanya surat keterangan lunas. Jadi ini mekanisme pengawasan untuk wajib tanam bawang putih. Kita sudah menyiapkan Pak Ketua tools yang namanya simetris, sistem monitoring tanam hortikultura strategis dan kita bisa melihat nanti ada polygonnya, lokasinya dimana. Ini akan terdeteksi melalui sistem simetris ini, terkait dengan pengawasan wajib tanam.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ketua ijin, masalah wajib tanam bagi importir.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, dibilang iya dulu baru ngomong.

Ya silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Saya ingin tanya Pak Dirjen, apa mereka itu sebagai penyiap modal, sebagai mitra para petani atau mereka langsung bertani?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Mereka penyedia modal Pak. Bimbingan teknisnya kita laksanakan bersama-sama di Kementerian Pertanian melalui kostra tani-kostra tani yang ada di lapangan kita akan persiapkan bimbingan teknisnya. Mereka penyedia modal Pak.

Baik. Lanjut.

Mohon ijin Pak Ketua, demikian paparan dari kami Direktorat Jenderal Hortikultura.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ya dilanjutkan lagi.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Terima kasih Pak.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV yang kami hormati dan kami banggakan.

Kami akan mencoba memaparkan kegiatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jadi sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, bahwa program Kementerian Pertanian itu ada 5. Yang pertama, dukungan manajemen, kemudian yang kedua ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, kemudian yang ketiga nilai tambah dan daya saing industri, empat riset dan inovasi iptek dan yang kelima pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian yang menyangkut pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian itu kaitan dengan dukungan manajemen dan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Lanjut. Kami sampaikan rancangan kegiatan anggaran di Ditjen PSP 2021 per output kegiatan. Yang pertama kaitan dengan dukungan manajemen, dan dukungan teknis lainnya Ditjen PSP, itu ada 355,6 Miliar. Kemudian disini ada dukungan Eselon I 211 Miliar untuk 6 Eselon I, kemudian ada layanan sarana dan prasarana internal. Kemudian dukungan manajemen Satker dan Perkantoran, kemudian yang kedua ada program ketersediaan dan akses konsumsi pangan berkualitas. Yang pertama, kaitan dengan pengelolaan air irigasi untuk pertanian. Disini ada jaringan irigasi tertier. Disini kami tekankan untuk Tahun 2021 ini bentuknya adalah yang pernah kita laksanakan. Ini targetnya ada 269.884 hektar yang tahun ini adalah 135.600 hektar. Kemudian irigasi perpompaan ada 1100 unit. Tahun 2020 = 1000 unit. Kemudian embung pertanian kami targetkan untuk 2021 ini 600 unit. Yang tahun ini 400 unit, kemudian kaitan dengan irigasi perpipaan ini 138 unit sama dengan tahun ini. Kemudian disini ada survey dan invetigasi kaitan dengan jaringan irigasi tertier, kemudian ada kegiatan pinjaman luar negeri ini sumber dananya dari dan IDB. Karena memang harus masuk didalam DIPA. Kemudian untuk norma standar dan prosedur, ini ada 7,7 Miliar Rupiah. Kemudian kaitan dengan perluasan dan perlindungan lahan pertanian itu untuk optimalisasi lahan 100.000 hektar untuk 2021, untuk 2020=50 ribu hektar. Kemudian kegiatan FMSRB ini ada 8,5 Miliar Rupiah. Kemudian untuk 10 Provinsi 18,5 Miliar, kemudian untuk Bimtek ini ada 33 lokasi, 33 Provinsi, 49,1 Miliar Rupiah.

Kemudian untuk pengembangan dan rehabilitasi dari usaha tani ini kami targetkan di 2021 = 20.000 hektar. Di 2020 itu 18.000 hektar. Jadi naik 2000 hektar. Kemudian untuk pemetaan data lahan ini ada 7 peta, kemudian untuk kegiatan perlindungan danantisipasi alih fungsi lahan. Ini ada 17 dokumen di 17 Kabupaten. Kemudian pengelolaan sistem penyediaan dan alat mesin pertanian. Ini alat mesin pertanian ini.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Nanti kalau pulang dari sini dibaca yang jelas. Contoh, Bimtek Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Irigasi Pertanian. 1 paket 5,1 Miliar. Nilainya 171 Miliar. Sedangkan irigasi pupuk perpompaan Cuma 75 Miliar. Jadi uang yang digunakan untuk proyek itu misalnya 300 Miliar, kalau dukungan pengawasannya sampai 200 Miliar lebih Masya Allah, ini mau jadi apa kalau begini. Coba saya minta perhitungan yang jelas. Kalau membuat irigasi, berapa persen pengawasannya. Sama monitoringnya. Kalau ini kan gila, 1 paket 5 Miliar untuk Bimtek sama monitoring pengawasan irigasi. Sedangkan kita lihat lagi disini. Jaringan irigasi tertier 328 Miliar. Irigasi pemompaan 141 Miliar. Jadi pengawasan yang diawasi, contohnya rumah pompa ini mahal pengawasannya. Coba nanti saya minta ini deh.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya kita lagi ini. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal PSP. Hampir setengah Triliun 355 Miliar coba bayangin. Kalau ini dibelikan bibit, dibuat embung, dibuat jalan usaha tani, berapa hektar coba. Tolong angka-angka ini saya sudah katakan dari awal dievaluasi kembali.

Silakan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Memang ini ada sedikit keliru memang. Seharusnya masuk ke Alsintan. Nanti saya jelaskan Pak Ketua. Jadi memang untuk Bimtek ini di 521 lokasi 488 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi. Kita lanjutkan dulu.

Kemudian untuk alat mesin pertanian. Ini salah ketik sebetulnya. Jadi target untuk 2021 ini 25.700 unit atau senilai 760 Miliar. Kekurangan itu memang kita rasionalisasi dari dukungan manajemen dan Bimtek yang Bapak Ketua sampaikan hanya belum terekam disini.

Kemudian untuk perbengkelan itu untuk 18 unit ada 13,2 Miliar Rupiah. Kemudian untuk fasilitasi pupuk dan pestisida disini untuk ERDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan kartu tani. Ini di 521 lokasi, 488 Kabupaten/Kota dan 38 Provinsi, itu 264,5 Miliar. Kemudian norma standar dan seterusnya ini ada 4,4 Miliar, Bimtek ada 44 Miliar,

kemudian UPO ini mohon maaf tertulis 500 harusnya 1100 unit, lebih kurang ada 220 Miliar Rupiah.

KETUA RAPAT:

Makanya Pak Dirjen, dari tadi saya dari awal saya bilang jangan copy-paste, jangan copy-paste. Akibatnya di *copy-paste* ada yang lupa, dikoreksi.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap Pak Ketua.

Terima kasih.

Kemudian kami lanjutkan. Untuk fasilitasi pembiayaan pertanian, asuransi ini masih tetap untuk 1 juta hektar karena memang realisasinya dari tahun ke tidak pernah mencapai 100%. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 100%. Kemudian untuk asuransi ternak, ini realisasi tiap tahun bisa mencapai 100%.

Kemudian untuk asuransi ternak, ini realisasi tiap tahun bisa mencapai 100% sehingga untuk Tahun Anggaran 2021 kami naikan menjadi 150.000 ekor.

Kemudian untuk norma standar dan prosedur itu ada 2,5 Miliar. Dan untuk monitoring ini ada 72,5 Miliar Rupiah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 3,032 Triliun Rupiah.

Kemudian untuk realisasi anggaran Dirjen PSP 2020 ini memang baru mencapai 24,82% Pak Ketua karena pengadaan alat mesin pertanian disini masih dalam proses. Mengapa masih dalam proses, karena ada ketentuan di Undang-Undang 20'2019 bahwa setiap alat harus mempunyai SNI. Sedangkan kami sudah menyampaikan surat ke PPKP untuk meminta saran dimana tahun ini masih diberikan kelonggaran untuk tidak menggunakan SNI karena didalam Undang-Undang tersebut masih ada kelonggaran 3 tahun dari 2019. Namun surat rekomendasi dari PPKP belum keluar sehingga kami menunggu dan kami sudah konfirmasi dengan PPKP mungkin dalam minggu-minggu ini keluar surat rekomendasi tersebut.

KETUA RAPAT:

Jadi maksudnya Alsintan selama ini tidak ada SNI-nya.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya. Jadi sementara ini belum.

KETUA RAPAT:

Terus patokannya apa, kalau tidak ada SNI ini.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Atas report dari itu sudah dianggap layak untuk digunakan ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Ya karena Kementan yang menggunakan pasti bilang layak. Tetapi ada Badan Standarisasi Nasional. Saya tidak habis pikir ini.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Terkait dengan soal Alsintan ini dikaitkannya disini Pak Edhy. Ya saya mengingatkan juga nih kepada Pak Dirjen terkait dengan soal standarisasi Alsintan ini. Karena kita menyaksikan dilapangan itu setiap alokasi Alsintan itu setiap tahun yang dialokasikan beda merk, beda standar dan ini menjadi keluhan oleh masyarakat. Di Daerah Sijunjung itu ada 1 Alsintan mesin panen combain Itu baru sekali pakai itu mesinnya pecah. Pecah Pak mesinnya. Saya masih simpan fotonya. Jadi kalau begini terus kita Pak, anggaran yang kita alokasikan ini sia-sia saja, tidak ada manfaatnya buat kemajuan sektor pertanian. Saya minta supaya Alsintan ini punya standarisasi yang jelas, pakai SNI yang jelas. Dan ini juga dikeluhkan oleh masyarakat. Alat-alat yang kita beli dengan raturan juta itu Cuma hanya sekali pakai, dua kali pakai, selanjutnya tidak dipakai lagi itu.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya karena tadi itu suka-suka yang beli, suka-suka yang pengadaan. Jadi kalau yang mengadakan bilang kita sukanya yang ini karena cuannya gede ya sudah kita gunakan ini. Itu saja. Jadi kalau standarnya saja tidak ada bagaimana.

Satu lagi, saya sudah bicara sama Sekjen. Setiap penerima Alsintan wajib memiliki 1 unit mesin stim motor. Suruh mereka mengadakan. Itu kurang lebih harganya 500 sampai 600 Ribu. Jadi kalau pulang dari sawah, kalau suruh nyuci hand tractor pasti malas karena apa. Gua gak beli, gua dikasih. Tapi kalau ada mesin stim itu 15 menit selesai. Jadi dalam juglak jugnisnya tolong disampaikan. Penerima wajib memiliki mesin stim untuk

pembersih. karena saya lihat di beberapa tempat, setiap jalan pulang itu onggok dirumah itu dalam keadaan kotor. Karena apa? Sudah besok sajalah bersihinnya. Besok hujan, masalah besoknya lagi. Akibatnya apa? karatan. Karena kalau nyuci hand tractor saja itu kalau pakai manual 1 jam, tapi kalau pakai mesin stim untuk cuci motor mungkin 10-15 menit selesai. Jadi saya minta juglak jugnisnya cantumkan itu. Mau merknya apa, mau apa itu sampaikan. Yang penting waktu nerima harus ada. Itu saja.

Lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik Pak Ketua.

Jadi sebetulnya untuk 2020 ini sudah kita masukan didalam Jugnis ini sesuai dengan saran bahwa setiap yang menerima alat mesin pertanian wajib untuk mempunyai power spayer Pak. Jadi untuk alat semprot itu.

Kita lanjutkan Pak Ketua. Jadi untuk alat mesin pertanian ini yang sudah jalan, yang sudah ada sertifikatnya SNI-nya baru TER2 dan pompa ini sudah kita jalan, kita adakan. Kemudian yang TER4-nya ini masih banyak produk yang tidak memiliki sertifikat SNI, dan mungkin akan kita gunakan sesuai dengan Undang-Undang dan rekomendasi dari PPKP.

Kemudian selanjutnya kegiatan utama, ini sudah kami sampaikan kaitan dengan padat karya. Ini ada rehab jaringan irigasi tertier, baru 48%, kemudian irigasi perpompaan 26%, irigasi perpipaan 31%, kemudian embung 39%, usaha tani 16,67%, kemudian optimalisasi lahan rawa ini 11,31%, ini Alsintan yang masih 0 karena masih dalam proses. Kemudian asuransi padi 53,6%, asuransi sapi 29,2%, dan realisasi pupuk bersubsidi 58,08%. Ini realisasi nasional.

Kemudian kegiatan penanganan Covid-19 ini pada Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian ini, kaitan dengan pengendalian penyebaran Covid-19. Ini dari target 1,4 Triliun Rupiah baru terealisasi 1,4 Miliar Rupiah, terealisasi 784 Juta Rupiah. Kemudian disini kegiatannya seperti yang kami sampaikan tadi kaitan dengan padat karya.

Kemudian isu-isu aktual Pak Ketua, ini kaitan dengan kebijakan pupuk bersubsidi 2020. Memang anggarannya untuk 2020 ini 26,6 Triliun Rupiah dengan volume 7,9 juta ton. Turun dari tahun-tahun sebelumnya. Dan rata-rata 5 tahun terakhir realisasi penggunaan pupuk bersubsidi ini lebih kurang 8,9 juta ton. Sehingga kami mencoba memetakan antar Desa-Kecamatan di 1 Kabupaten, antar Kabupaten di 1 Provinsi dan kalau ada yang kelangkaan pupuk di 1 Desa atau Kecamatan maka akan kami alokasikan dari Kecamatan lain yang masih surplus. Begitu juga antar Kabupaten. Ini langkah yang sementara kami lakukan. Karena memang kami sudah menyampaikan usulan untuk penambahan anggaran pupuk subsidi ini ke Menteri Keuangan melalui Bapak Menteri Keuangan, namun sudah direspon bahwa tidak mungkin akan dilakukan penambahan alokasi pupuk karena memang

keterbatasan dana Pemerintah. Untuk itu saran dari hasil review dengan BPKP, BPK, dan juga saran dari Menteri Keuangan untuk menurunkan HPP. Jadi komponen-komponen pembentuk Harga Pokok Penjualan itu dihilangkan kaitan dengan komponen-komponen yang tidak berhubungan langsung, dan juga menaikkan HET. Nah menaikkan HET ini kami sudah melakukan 2 kali putaran rapat dengan Menko Perekonomian, itu memang ada usulan dari Ketua KTNA dengan berita acara lengkap bahwa bisa dinaikan antara 300-500 Rupiah per kg. Kemudian dari Menko Perekonomian kisaran 300 per kg, kemudian usulan dari Menteri Pertanian itu HPP-nya diturunkan 6% dan HET kita naikan lebih kurang 200-250 Rupiah per kg. Sehingga kalau itu dilakukan maka volume akan mencapai 9,2 juta ton tentunya dengan penambahan di pupuk urea, NPK, yang memang banyak dibutuhkan oleh para petani kita.

Kaitan dengan kartu tani, Bapak Ketua kami sampaikan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ketua, sebelum kartu tani. Masih masalah pupuk Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pak Dirjen PSP,

Dari nilai 26 Triliun itu bantuan subsidi, saya pikir begini. Kita ini belum pernah membahas bahan baku. Jangan-jangan kita kemahalan beli bahan bakunya. Clay contohnya. Clay itu tanah liat dari Tuban. Ada juga di Sukabumi. Orang Kujang beli dari Tuban, jauh tuh. Jadi kita itu begitu tuh. Pengadaan asam humat. Karena ada Swedia, segala macam dari China. Ada yang murah pilih-pilihannya. Urusan kualitasnya itu tergantung mitra pupuk itu yang membuatnya, apa mereka asal-asalan. Sehebat apa pun produk yang dibuatnya mereka kasih hujan, tidak kasih gudang, ya jadi buburlah. Nah makanya Ketua, yang hitungan 26 Triliun itu tadi itu bisa memenuhi jika bahan baku dihitung benar.

KETUA RAPAT:

Pak Haerudin, mengenai bahan baku dan pengadaan itu bukan domainnya Bapak-Bapak ini. Itu domainnya PT Pusri atau Pupuk Indonesia. Nanti waktu Rapat Kerja Pupuk Indonesia datang nanti ditanyakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Siap Pak Ketua. Maksud saya tadi berhitung, kenapa ini harganya jadi tingginya segini jadi segini. Sebetulnya kita bisa ditekan dari yang tadi.

KETUA RAPAT:

Sekarang komponen paling mahal itu adalah gas. Jadi produksi pupuk itu yang paling mahal itu gasnya itu bukan yang lain-lain. Karena standarnya gasnya itu masih harga komersial. Harusnya gasnya itu disubsidi. Karena subsidi bensinya untuk Pak Haerudin, maka gasnya tidak dapat subsidi.

Lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap.

Terima kasih Pak Ketua.

Kaitan dengan kartu tani kami sampaikan Bapak Ketua bahwa lokasi pilot percontohan itu sudah ada di 3 Kabupaten. Itu di Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung, Batang dan Brebes, kemudian Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, dan Kota Semarang. Kemudian untuk Jawa Barat, itu Kabupaten Ciamis, dan untuk Jawa Timur Kabupaten Sumenep. Kartu tani yang tercetak itu ada 9,4 juta kartu, kemudian yang sudah terdistribusi 6,2 juta, dan kartu tani yang digunakan baru 1.205.688 kartu. Nah ini memang kartu tani agak tersendat karena memang banyak alasan kaitan dengan sinyal di daerah. Mungkin itu Bapak Ketua.

Satu lagi, kaitan dengan pembiayaan KUR. Jadi untuk KUR ini Kementerian Pertanian dapat alokasi 50 Triliun Rupiah. Kita bagi untuk tanaman pangan 14,23 Triliun, kemudian hortikultura 6,39 Triliun, peternakan 9,01 Triliun, dan perkebunan 20,37 Triliun. Realisasi sampai dengan hari ini berdasarkan catatan kami ada 706.940 debitor dengan nilai 19,294 Triliun Rupiah.

Barangkali itu Bapak Ketua hal-hal yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ada lagi?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Satu lagi, Karantina.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. ALI JAMIL, M.P., PH.D.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Ketua, Pak Pimpinan yang kami hormati, dan Bapak/ibu semua para Anggota Komisi IV yang kami banggakan.

Mohon ijin kami sampaikan Pak terkait dengan program kita di Badan Karantina Pertanian. Ini rencana kegiatan kita Pak Ketua dan Bapak/Ibu semua para Pimpinan dan Anggota untuk nanti 2021 coba kita lihat slide berikutnya. Jadi kita di karantina pertanian. Jadi ini nanti ada 2 Pak Ketua dan Bapak/Ibu semua, para Anggota dan Pimpinan lainnya. Ini rencana program, dan anggaran Badan Pertanian 2021 dan presentasi kita nanti progress report kegiatan penanganan Covid-19.

Ini yang pertama. Merevert ke kegiatan atau program kita di Kementerian Pertanian yang Pak Sekjen tadi sudah menyampaikan 5. Jadi 2 diantaranya ini. Ini sangat dekat dengan kita.

Terus. Itu adalah kegiatan atau program-program dukungan manajemen. Itu yang program lintas K/L. Kemudian program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Ini program yang strategis.

Terus. Ini yang terkait dengan focus kegiatan di karantina pertanian Tahun 2021 itu ada. Yang pertama adalah penguatan tindakan karantina. Ini ada inline inspection, sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, penguatan laboratorium, pemenuhan sarana dan prasarana, pemantauan OPTK (Organisme Tumbuhan Karantina), termasuk HPKH-nya, dan koordinasi instansi terkait.

Kedua, itu adalah sumber daya manusia. Ini adalah pengembangan SDM Barantan atau Karantina Pertanian.

Yang ketiga programnya adalah penguatan. Kegiatan kita ini adalah penguatan perbatasan. Ini ada sekarang 18 perbatasan Pak Ketua, dan Bapak/Ibu semua, para Pimpinan dan Anggota. Yang tadinya 11 terus kemudian ada penambahan di Inpres Nomor 6 .. 7 Perbatasan tambah 1 jadi 19, 11 perbatasan dan bandara baru.

Kemudian yang Nomo 4, penguatan, pengawasan, dan penindakan. Ini penguatan, pengawasan dan penindakan.

Yang kelima, pengembangan teknologi informasi. Ini di karantina pertanian IQFAST. Itu Indonesia *Quarantine Full Automation System* dan inovasi layanan. Ini aquafest ini yang data kita semua dari lapangan, yang dientry dari lapangan dari seluruh PT kita itu *connect* dan bisa kita lihat di Jakarta atau dimana pun.

Terus. Ini pagu Badan Karantina Pertanian 2021. Ini sekitar totalnya ini 966.290.837.000. Jadi 966 M, 29.

Terus, rencana programnya Bapak/Ibu semua, Pak Ketua, dan Bapak/Ibu semua yang kami hormati. Ini adalah program yang dukungan manajemen yang pertama (mohon maaf ini mungkin terlalu kecil bahannya Pak), barangkali sudah ada di Bapak/Ibu semua. Ini totalnya untuk program yang pertama ini program dukungan manajemen ini 736 Miliar. Ini uraiannya adalah pemenuhan kebutuhan SDM. Itu gaji dan tunjangan program SDM. Itu kita PNS-nya 3750, dan THL itu lebih dari 1000 atau 1312 orang di 53 Satker Bapak/Ibu semua.

Terus kemudian, operasional kantor dan kerumahtanggaan di 53 UPT. Terus pengelolaan keuangan dan perlengkapan Badan Karantina Pertanian, layanan hukum dan Humas, pengelolaan organisasi dan SDM, termasuk ini sarana dan prasarana. Ini yang untuk program dukungan manajemen.

Yang kedua program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Ini kita masuk tentunya disini Bapak/Ibu semua, Pak Ketua, Bapak/Ibu semua, peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantina untuk 12 bulan dan seluruhnya di kantor kita. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati, itu diseluruh kantor kita juga di Karantina termasuk peningkatan sistem karantina tumbuhan dan hewan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap. Jadi kita punya 2 ini, 1. Balai Besar Uji Standar, dan 2. Balai Uji Terap Teknik Metode dan Kartu Pertanian.

Terus yang berikutnya adalah sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Target kita di 2021 itu ada 1 Juta sertifikati Bapak/Ibu semua. 1 juta sertifikat di 50 Satker. Kemudian standar kualitas perkarantinaan seterusnya adalah prasarana Wilker daerah sentra produksi dan termasuk sarana PLBN, pos lintas batas negara, dan termasuk prasarana infrastruktur untuk di area pos lintas batas negara. Di Wilker kita disana.

Terus Bapak/Ibu semua, rinciannya. Rincian yang untuk kegiatan kita. Rincian tidak ada disitu. Mungkin nanti kami sampaikan Bapak/Ibu sekalian. Jadi itu tadi gambaran besarnya 2 program. Rinciannya mohon maaf ada di kami. Ini tadi secara umum totalnya seluruhnya seluruhnya kegiatannya itu kegiatan Bapak/Ibu semua.

Seterusnya untuk penanganan atau yang terkait dengan kegiatan penanganan Covid-19 Tahun 2020. Ini kita ada anggarannya, kita itu adalah 2 Miliar 15 Juta. Jadi dari anggaran kita 845 yang final kemarin refocusing itu kita punya 2015 M. Jadi itu realisasinya sudah sekitar 38% dan sisanya itu tentunya akan kita jalankan di tahun ini tentunya Bapak/Ibu semua. Dan itu kegiatan-kegiatannya seperti kita ketahui Bapak/Ibu semua dan pernah mungkin sudah kami laporkan. Itu terkait dengan penanganan Covid. Ada pembelanjaan terhadap sensor panas tubuh, alat penyemprot disinfektan, masker, hand sanitizer dan lain-lain sebagainya termasuk makanan penguat tubuh atau multivitamin Bapak/Ibu semua.

Saya pikir itu mungkin yang kami sampaikan Pak Ketua dan Bapak/Ibu semua dari Karantina Pertanian.

Terima kasih. Mohon arahannya Bapak Ketua dan Bapak/Ibu semua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Saya minta tampilkan PNBP-nya Karantina. Tolong tampilkan, ada?

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

PNBP mungkin sekarang tidak ada Pak. Tapi kami boleh telepon dulu nanti. Bisa kami sampaikan Pak.

KETUA RAPAT:

Ya nanti disampaikan. Karena kan, Kementerian Pertanian mentargetkan ekspor 300%. Berarti kalau ekspor 300% PNBP-nya pun meningkat. Saya mau tahu sampai bulan Juni berapa. Dan hal yang paling penting, saya ingin langsung dijawab perihal kemarin jamur enoki kenapa bisa masuk ke Indonesia dengan hal yang membawa penyakit, dan ini bukan hanya 1. Yang lain belum diketemukan.

Silakan.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Baik Pak Ketua.

Bapak/ibu semua, Pimpinan dan Anggot yang kami hormati.

Terkait dengan berita kemarin jamur enoki Pak. Itu adalah hasil monitoring dari teman-teman Badan Ketahanan Pangan Pak. Itu di gudang daripada importir. Nah dari sana mereka dapatkan, dan itu ditemukan listeria ini jamur enoki ini, dan Pak Kepala Badan menurut beritanya memerintahkan kepada pemilik barang untuk menarik dari pasar, dan itu dimusnahkan. Dan Alhamdulillah itu sudah selesai yang itu.

Nah terkait dengan karantina pertanian, di pintu pemasukan tentunya kita bekerja untuk tindakan karantina kita lakukan pemeriksaan itu semua dengan sertifikat based yang ada. Dan kemudian khusus dari Korea Selatan kita punya sertifikat laboratorium yang namanya COA Pak (*Certificate Of Analysis*). Nah ini tentu merupakan tugas kita di pintu masuk. Nah terkait dengan listeria itu ada Permentan yang mengatur Pak Ketua, Bapak/Ibu semua, bahwa listeria belum termasuk didalam Permentan 55 ini di produk segar asal tumbuhan (PSAT) Pak. Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ada

Permentan 55/2016 yang mengaturnya. Yang ada disitu baru hanya salmonella dan Collin untuk mikro biologi. Jadi listeria ini belum termasuk disana. Jadi tentu pada saat ini untuk yang itu kami tidak bisa melakukan itu di perbatasan ini Pak, di border ini. Nah namun ada info kemarin kami lakukan setelah Badan Ketahanan Pangan memberitahukan ini, kami lakukan monitoring di pemasukan Tanjung Priok yang berasal juga dari sana. Ada nama PT-nya semua, kami laporkan ke Pak Ketua nanti, Bapak/Ibu semua. Bahwa hasil itu adalah negative untuk listeria itu, tapi artinya ini sudah ada aturannya Pak. Kalau untuk di post border ini dipasar semua-semua untuk produk segarnya dilakukan oleh pengawasan oleh Badan Ketahanan Pangan. Untuk produk olahan itu oleh POM.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak/Ibu, tadi sudah dijelaskan. Kalau saya penjelasannya tidak memuaskan. Jadi seolah-olah bagaimana ini. Besok kita lihat di pasar, di toko supermarket segar. Kita lihat.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Boleh kami buka sedikit Pak Ketua. Yang laporan kita yang monitoring Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti saja setelah Anggota bertanya, disiapkan dulu termasuk PNBPN.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau nanti ada masuk lagi penyakit itu belum termasuk, jadi masuk lagi penyakit itu belum termasuk ya matilah rakyat Indonesia nanti lama kelamaan kalau begini.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Jadi ijin Pak Ketua, sedikit Pak Ketua penjelasan.

Listeria ini sesungguhnya dimana-mana ada Pak. Menurut ahli kesehatan, sesungguhnya di perut kita pun mohon maaf ada Pak. Dimana pun ada, di kita pun ada.

KETUA RAPAT:

Tapi kan ada pembatasnya Pak.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Iya betul. Jadi maksud saya.

KETUA RAPAT:

Jadi jangan Bapak alasan ada, ada, ada tapi kan ada ambang batasnya. Ambang batasnya berapa yang bisa di konsumsi, berapa yang tidak bisa dikonsumsi.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Ijin Pak Ketua, boleh kami tambahkan.

Yaitu makanya tadi Pak, yang di Permentan 55 itu belum diatur untuk listerianya, tapi untuk yang produk olahan itu sudah ada di BMC Pak.

KETUA RAPAT:

Kita bicara tadi itu jamur enoki segar loh, bukan olahan.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Justru itu Pak.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanyakan itu jamur enoki segar bukan olahan. Ini loh yang saya tanyakan ini. Saya tidak mau sampai terjadi lagi.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:

Baik Pak Ketua.
Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena bagaimana pun kita bekerja ini untuk rakyat loh. Dan perlu diketahui Bapak/Ibu kalau ke supermarket besar atau toko buah, jambu air pun kita sudah impor. Tolong ini Dirjen Hortikultura diingat itu. Jambu air pun kita impor. Kadang-kadang di supermarket ada juga mangga impor dari Thailand, atau dari Pakistan. Coba bayangkan. Orang mangga kemarin saya dikasih Kyai Hasan juga paling enak sedunia masa masih kita impor.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya bagaimana Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Hanya mempertegas saja supaya kita juga tidak menjadi sesuatu yang bias di masyarakat bahwa tadi Pak Dirjen Karantina menyampaikan listeria itu adalah di semua ada. Permasalahannya juga ekoli juga ada Pak. Kan itu flora normal juga. Ya saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, jangan sampai dengan alasan itu flora yang ada disekitar kita. Ya kalau bicara ekoli juga ada flora normal tapi batas ambangnya kayak apa. Jangan sampai ini kemudian membiaskan masyarakat. Itu ada kok. Tidak perlu kita curiga atau kita tidak perlu itu, seperti itu. Jadi saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ambang batas, kemudian kepedulian dari karantina untuk kemudian ... (suara tidak jelas).

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.

Selanjutnya Anggota yang bertanya silakan bertanya, mengkritik tapi membangun.

Silakan Pak Hasan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Melanjutkan apa yang telah tersampaikan dan yang belum tersampaikan oleh Anggota, selanjutnya Ibu Endang. Tiga menit bu endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan Pimpinan, para Dirjen, Pak Sekjen, dan semua jajaran dari Kementerian Pertanian.

Terima kasih, kami sudah menyimak. Namun banyak sekali yang ingin kami tanyakan yaitu untuk Sekretaris Jenderal nih Pak. Di bawah Sekretaris Jenderal itu kan banyak atase Pertanian yang ada di Luar Negeri. Nah bagaimana peranannya tadi sampai kita kebolanlah ibaratnya buah-buahan yang Pak Ketua sampaikan. Kemudian juga, padahal kita punya buah-buahan

local yang bagus. Ini saya bawa contoh Pak. Jadi saya bawa contoh, ini dari pagar alam Pak. Nah, jadi Dapilnya Bu Kiki, dan bagus Pak. Tapi tadi tidak pernah disentuh oleh bimbingan para penyuluhnya karena memang penyuluhnya tidak ada disana. Jadi ini adik kelas saya Pak punya ide, menjual ini ke semua alumni dan kenalannya yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah ini kan mestinya tugas dari atase pertanian yang memperkenalkan juga ke Luar Negeri bahwa kita punya buah-buahan tropis yang bagus.

Nah kemudian juga tadi Pak, data-data. Data-data mestinya kan ada sinkronisasi data ya Pak dari Sekjen sehingga kita bisa menginvestarisasi data dengan baik berdasarkan potensi daerah masing-masing. Malah tadi staf Pak Dirjen Hortikultura menyatakan Bu Endang ada yang lebih baik lagi dari Kalimantan. Nah kemudian di Sumatera Utara begitu juga Pak, bertebaran produk-produk yang tidak bisa dijual. Jadi saya mohon Pak Sekjen juga bisa memberikan inovasi atau support kepada atase-atase pertanian kita yang ada di Luar Negeri untuk mengenalkan produk-produk potensi local kita yang sudah bisa disejajarkan dengan produk Luar Negeri.

Kemudian untuk tanaman pangan nih Pak. Yang ingin saya tanyakan, kami kan menerima bantuan 1100 paket dari Dirjen Tanaman Pangan ya Pak, atau dari semua Direktorat Jenderal?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Dari 4 Dirjen.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Nah jadi saya mohon bagaimana cara pengaturannya dari 4 Dirjen itu koordinasinya bagaimana karena yang saya terima misalnya, ini mohon maaf Pak Dirjen Hortikultura bawang putihnya itu bawang putih impor. Nah jadi kami juga ingin ada klarifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah padat karya. Padat karya percepatan olah tanah yang di 44 Kabupaten itu dimana saja Pak Dirjen. Karena kami di Kabupaten Cianjur belum merasakan.

Nah kemudian untuk percepatan tanam. Tadi kan saya sudah cerita tentang kualitas, tapi kan kualitas ini mesti dipertahankan Pak. Nah ini kaitannya dengan teknologi Pak. Jadi saya sekali lagi mohon Pak Sekjen bisa memfasilitasi dan mendorong pedoman-pedoman dari Balai Biogin yang sudah menciptakan varietas-varietas baru sehingga kita tidak kalah dalam penciptaan produk-produk baru.

Kemudian yang hortikultura. Mohon maaf ini Pak Dirjen, Jadi selain jeruk mungkin ada potensi-potensi lokal lain, malah dari tanaman hutan Pak. Jadi misalnya tanaman yang sejenis dengan kepundung itu masih banyak Pak, di Jambi misalnya. Nah ini kan karena tidak ada sentuhan teknologi dan tidak ada pengawalan untuk dikembangkan sehingga mati sebelum berkembang. Nah ini mohon Pak Dirjen Hortikulutra bisa menggali supaya menambah devisa negara kita.

Nah kemudian untuk Dirjen PSP, tadi ada keluhan dari teman-teman saya di Cidaun bahwa alat-alat. Mungkin juga tidak langsung dari Dirjen PSP, yang diberikan itu di Cidaun salah sasaran Pak untuk mokaf. Jadi mestinya bisa halus ternyata. Oh dari tanaman pangan ya. Jadi mohon diperbaiki lagi karena ada 4500 petani kita yang bekerja di industri cassava. Nah kemudian saya bekerjasama Pak dengan Kementerian Pertanian sudah mengemas, bagaimana supaya kita bisa, anti stanting kita. Jadi membuat makanan dari ikan, kemudian ditambah dengan mokaf dan sagu, kemudian ditambah lagi dengan daun kelor. Nah ternyata bagus Pak. Jadi mohon dengan sangat bisa dikembangkan di masyarakat.

Kemudian yang berikutnya tentang KUR ini Pak. Jadi KUR ini bagus tapi ternyata juga sulit aplikasinya di lapangan. Jadi saya mohon karena dulu sudah dikembangkan ingin merintis Bank Pertanian. Jadi dulu kita sudah dapat Pak anggaran atau hibah dari Pemerintah Perancis (Bank Kredit *Agricole*) yang menjadikan Bank Embrio Pertanian. Jadi saya masih punya konsepnya. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di Kementerian Pertanian. Jadi yang kita rintis adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis potensi daerah, kemudian bisa akses pembiayaan dengan mudah. Karena kalau melalui Bank tetap saja ada, jadi Bank itu hanya sebagai Bank Kustodian.

Kemudian yang berikutnya tentang tadi, sudah disebutkan oleh Pak Ketua Badan Karantina. Jadi mohon lebih giat lagi Pak untuk memonitor dan mengevaluasi buah-buahan atau pun sayur-sayuran yang diimpor. Karena pada hakikatnya di Cianjur saja banyak sekali Pak sebetulnya sayuran-sayuran local yang bisa dikembangkan untuk konsumsi nasional maupun internasional. Tapi karena tidak adanya tadi penyuluhan yang intensif sehingga pada waktu panen apalagi pada waktu Covid ini banyak yang merasa dirugikan. Dan kami menampung sehingga kami menampung sayuran-sayuran untuk dibagikan kepada masyarakat.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih Bu Endang.

Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Sekjen bersama dengan jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian.

Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan para Dirjen yang telah memberikan harapan kepada kita semua. Saya kira dalam kajian Bappenas juga, pertumbuhan PDB pertanian itu pada Tahun 2019 3,64 ya. Kemudian 2020 menjadi turun, hanya kita harapkan positif. Dan 2021 itu ditarget antara 3,32 sampai dengan 3,88. Apakah ini akan bisa dicapai dengan anggaran 18,43 Triliun. Saya kira ini beban bagi Pak jajaran Mentan dengan pertumbuhan PDB yang cukup tinggi.

Kemudian NTP antara 1,102 sampai 104 atau berada di ... 103 Pak ya. Pagu indikatif itu 18,43 Triliun, naik sedikit atau turun dari anggaran pagu awal 2020 = 22 Triliun. Ya kita juga memahami bahwa 2021 ini banyak anggaran disedot untuk penanganan Covid kurang lebih 905 Triliun. Saya juga mendengarkan bahwa ada dukungan KUR sekitar 50 Triliun. Kita harapkan bahwa KUR ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Hanya saja kita harap di tengah pandemi ini ada stimulus untuk KUR. Jangan tetap bertengger pada angka 6%. Kalau bisa diturunkan menjadi cukup 3% supaya nilai produk petani ini menjadi turun, beban petani menjadi turun ditengah pandemi. Saya kira Menteri Keuangan akan bisa memahami ini kalau diajukan oleh Kementan bersama dengan Komisi IV supaya KUR ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara menyeluruh oleh petani dengan angka 50 Triliun. Bisa menggerakkan sector pertanian kalau diturunkan angkanya menjadi, ya kalau tidak bisa 3-4 persenlah 1 tahun.

Saya juga sedikit bertanya mengenai target produksi tadi yang ditekankan oleh Pak Ketua pada Tahun 2019 = 54,60 juta ton. Pada saat itu mungkin sekitar 22 Triliun. Kemudian 2021 naik menjadi 62,5 juta GKG dengan budget yang cukup kecil walaupun kita melihat bahwa strateginya meningkatkan tingkat produktivitas dari 4,58 ton per hektar naik menjadi 4,77 ton per hektar. Untuk menaikkan tingkat produktivitas ini memang harus didukung oleh pupuk yang cukup. Kalau tidak di pupuk ya saya kira, sedangkan dukungan subsidi pupuknya hanya 26 Triliun. Berarti ini juga tidak bisa memenuhi seluruh harapan petani kita. Satu sisi NTP petani Tahun 2020 ini turun. Jadi memang disini persoalan kita sehingga itu, selain itu sangat dipengaruhi oleh air, Alsintan dan permodalan. Kalau permodalan ini bisa kita tutup dengan menurunkan angka bunga KUR yang cukup signifikan, kemudian air tadi saya lihat banyak program di PSP. Utamanya pompa-pompa air dalam rangka mengatasi kekeringan.

Saya kira ya kita berharap bahwa optimisme kita untuk mencapai 62,50 juta ton GKG itu bisa kita capai. Tapi kalau memang tidak bisa kita capai dengan lebih bagus kita memasang target-target yang lebih realistis Pak Dirjen daripada kita memasang angka yang terlalu optimis yang pada saatnya tidak tercapai. Kalau kita sudah pasang angka yang lebih realistis kemudian tidak cukup maka kita bisa mengambil ancang-ancang untuk menutup pada produk-produk pangan yang lainnya supaya pada akhirnya kita tidak kekurangan pangan.

Kemudian yang selanjutnya, karena perlu bicara angka-angka secara mendetail yaitu ada 11 komoditas bawang putih. Bawang putih tahun ini ditarget 5000 hektar. dibiayai oleh APBN 2021, apakah ini juga termasuk

5000 hektar itu include dengan kewajiban importir? Kalau tidak include dengan kewajiban importir berarti masih bertambah luas tanamnya. Saya kira juga yang menjadi kritis kita di persyaratan impor bawang putih ini, saya kira kita sependapat juga di Komisi IV bahwa persyaratannya ada yang ditanam baru bisa keluar RIPH. Kalau impor dulu baru ditanam saya kira banyak yang tidak bisa control pengusahanya. Jadi kalau pengusahanya kita control mana kau punya tanaman baru bisa keluar RIPH.

Yang selanjutnya adalah pupuk. Sudah dijelaskan tadi bahwa RIPH-nya akan dinaikan. Saya sudah sependapat bahwa lebih bagu diperlebar, diperluas supaya petani bisa lebih banyak menikmati pupuk bersubsidi. Ketimbang terlalu murah tapi hanya segelintir petani yang menikmati, saya kira ini menciptakan ketidakadilan di petani walaupun hanya 300 Rupiah per kilogram. Bisa saja 500-600 Rupiah per kilogram. Karena sekarang ini rangenya dari 95.000 subsidi, 200.000 yang non subsidi. Ini terlalu jauh, lebih 50%. Yang kalau bisa 120.000-lah yang subsidi, kemudian 200.000 yang non subsidi. Saya kira ini jauh lebih luas cakupannya. Petaninya bisa lebih banyak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Yang lainnya adalah tingkat pengawasan. Kalau ada masuk barang impor pangan melalui Badan Karantina kemudian lolos sampai RIPH, saya kira perlu dipertanyakan. Kenapa bisa lolos? Sedangkan yang mengeluarkan RIPH kan pertanian. Kemudian bisa diloloskan, oh Badan Karantina masih di Indonesia dengan segala permasalahannya. Saya kira ini perlu dipertanyakan.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ustadz Haerudin.

Materinya beda dengan yang interupsi tadi.

Silakan.

3 menit Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Ketua, Pimpinan, dan Anggota yang terhormat.

Pak Sekjen Kementan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, para Pejabat Eselon I, Eselon II yang hadir yang juga saya hormati.

Terima kasih atas kesempatannya. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sesuai dengan pernyataan keras Bapak Presiden karena penyerapan kita rendah dan pinaltynya akan direshufflenya para Menteri atau Beliau akan melakukan sebuah terobosan Perpu yang lebih canggih lagi bahwa ada yang sedang gemetar, ada yang sedang bahagia itu urusan lain urusan politik. Tapi paling tidak kan inilah jajaran kita yang sebagai pembentuk apa yang kita anggarkan hari ini, apa yang kita putuskan, apa yang kita rancang hari ini tentu dari 2019. Ingin kami ingatkan Pak Sekjen beserta jajaran bagaimana penyerapan ini lebih cepat. Jadi jangan terlalu banyak menunggu kata Bapak Presiden. Ini jangan sampai penyerapan berhenti gara-gara banyak pemain. Jadi tiap Eselon I tentu harus lebih dipermudahlah kira-kira biar lebih cepat, lebih transparan, lebih terbuka, lebih kompetitif. Contoh Pak Dirjen PSP kan banyak dulu pengadaan Alsintan yang tidak cocok di daerah. Kita tidak berangkat dari pemetaan. Yang tidak produktifkan kita kirim. Karena kita kadang anggarkan, kita kadang sudah banyak pemainnya. Harus sudah mulai di urut-urut. Kalau jadi Direktur pemain ya bersikap tegas. Jebreet, kata Presiden begitu daripada menghambat jalan kaki kita.

Nah ini Pak Sekjen butuh evaluasi termasuk. Karena kita menghadapi bulan Oktober Pak Sekjen. Bulan Oktober, September, Desember. Ini semua orang ngomongnya kelaparan tapi saya ngomongnya mudah-mudahan ini hujan terus hadir. Jadi ada musim penghujan yang terus panjang. Jadi kita terhindar dari kelaparan. Saya tidak ingin menyebut kesusahan atau kelaparan karena khawatir jadi doa. Tapi sebagai bentuk jaga-jaga kita bagaimana mempersiapkan pangan kita. Jadi kalau ada pernyataan bahwa 6 juta surplus itu mudah-mudahan kenyataan kita. Mudah-mudahan kenyataan. Dan kenyataannya begini Pak Sekjen, Pak Tanaman Pangan, Pak Wandu. Aku ingin ingatkan, kita ini musim susah impor tapi beras cukup. Kenapa musim normal kita itu tidak cukup beras, harus impor terus.

Jadi pertanyaan di kepala saya ini ada apa ya yang salah di kita itu. Kalau konteksnya yang tadi disebut bahwa ada impor yang tanpa RIPH dan kita disaksikan dengan telanjang mata Pak Karantina, Pak Dirjen Horti itu harus kita lawan terbuka jangan kita aamiinkan. Karena itu kesalahan dan pelanggaran Undang-Undang. Betul kata Pak Ketua, kita itu punya aturan sendiri kok. Kita punya Undang-Undangnya. Kita bertahan disitu. Saya pikir kalau pun diganti Dirjen gara-gara disitu termulia hidup ini, ketimbang kita paksakan. Saya paham Pak Karantina tidak akan berdaya menghadapi telepon ini, telepon itu, telepon ono, dan semua orang-orang gede. Karena kita masih bicara pagu indikatif Pak Ketua, jadi kita masih bicara tentang bayang-bayang masih bagaimana menepakkan program kita lebih strategis kedepan. Karena ini kita ini saling mengingatkan mudah-mudahan Kementan diberikan kemampuan diamanahi pangan. Mudah-mudahan mampu menyelematkan pangan kita kedepan karena pangan kita itu hidup matinya bangsa kita kata Presiden pertama, dan alangkah sebuah kenyataan besok kalau kelaparan yang disalahkan pertanian. Kita waktu rapat di Badan

Anggaran Pak, kita minta pangan itu prioritas terbesar dari anggaran yang ada hari ini. Mudah-mudahan semua bersepakat bahwa mendorong pangan jauh lebih strategis kedepan.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat datang Pak Ichsan dan Pak Charles.
Selanjutnya Pak Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Sekjen, Eselon I, teman-teman sekalian.

Saya memberi saran. Yang pertama begini, tadi Kementerian Pertanian tadi ditanya kebingungan Satuan Tiga belum dapat. Kenapa? Karena akhir-akhir terakhir ini bukan saja. Merencanakan program itu saat tahun berjalan Pak. cari, mana yang harus saya kerjakan. Jalan keluarnya apa? Tolong Pak, untuk Tahun 2021-2022 minta sekaligus datanya ke daerah. Itu enak itu. Jadi kalau sekarang Bapak ditanya berapa, satuan tiga mana? Belum. Karena kita belum dapat lokasinya. Ini yang yang lain sama Pak. Kementerian, Gubernur didaerah sama ini dibeberapa tahun terakhir ini.

Terus yang kedua Pak Sekjen, Bapak lihat apa yang sebetulnya yang menjadi masalah. Saya dapat data Pak Sekjen, misalkan 70% rumah tangga pertanian itu belum mendapat penyuluhan. Ini programkan. 56% kelompok tani baru terbentuk. Masih 44% belum ada kelompok taninya. Terus selanjutnya 70 juta persen petani menjual ke pedagang pengumpul. Jadi yang untung itu ya sampai ke konsumsi 30%. Nah ini bagaimana? Juga 60% pengolahan sawah masih kontrak ini, diborongkan Pak. Loh Alsintan tapi ternyata masihd diborongkan berarti masih kurang. Ini bagaimana tembusnya. Yang menarik lagi Pak, 30% rumah tangga petani itu yang baru dapat pinjaman Bank, 70% belum. Kenapa? Mungkin kesulitan dan lain sebagainya nanti mengembalikannya. Ini tolong didoronglah. Tadi Bu Endang bilang ada Bank Tani, kenapa tidak dibantu oleh pertanian khusus kursi petani. Petani sudah miskin. Tidak ada modal ini Pak Sekjen.

Dan selanjutnya ada 8 Undang-Undang Pertanian yang masuk Undang-Undang Citra Kerja yang akan disahkan. Kapan Bapak mau memberikan data ke Komisi IV. Kalau ini disahkan Pak, beberapa Dirjen

digabung menjadi satu karena hilang kewenangannya. Ini tolong, kalau kehutanan, kelautan sudah, pertanian kapan. Kita ini 10 hari lagi Reses. Dan reses pun sebagai Anggota Panja dibahas terus Pak. Ya ini saya hanya memberi masukan. Jangan sampai nanti sudah diketok jadi Undang-Undang ribut. Ini begono-begini. Nah tadi ke Horti ini ya. Horti tolong saya nanya, kalau melanggar RIPH itu di Undang-Undangnya apa, pidana ada tidak? Kalau tidak ada ini masukan ke Undang-Undang Cipta Kerja, tapi di Undang-Undang yang baru kewenangan pertanian dan rekomendasi dihapus. Tolong dicek itu. Dan satu lagi Pak Sekjen, antar Undang-Undang yang direvisi itu tumpang tindih. Disini diusulkan, disini dimatikan. Ini tolong diparalelkanlah.

Terus tadi juga mengenai bawang putih ini Pak Ketua. Tadi ada 6 wartawan nanya saya, tolong dijelaskanlah itu. Saya jangan sampai salah itu. Kenapa? Seorang itu bisa memberi putusan. Eselon I memberi putusan tidak perlu rekomendasi pertanian itu luar biasa. Ya bukan apa itu. Ada apa itu? Saya tahu ada apa-apanya memang. Pak Dirjen pahami lah ya. Tapi Pak Dirjen tidak ikut-ikutan.

Satu lagi, mungkin kasih tahu sama Litbang ya. Ini pertanyaan ke petani. Di pertanian itu kurang lebih ada 200 doktor. Kenapa kok bawang putih kita kecil-kecil, kalau impor gede-gede. Jadi rakyat kita senang yang gede-gede, bukan yang kecil-kecil kan. Contohnya bawang yang dari Temanggung tidak laku. Kapan kita coba teliti.

Terus selanjutnya tadi Karantina. Tolong ini sementara ini kan barang-barang ke Luar Negeri stop. Ini celah-celah Karantina yang belum ada pengawasan seperti Surabaya, tolong itu sudah dibentuk belum? Karena barang yang masuk ke Surabaya, ke Luar Negeri itu tidak lewat karantina ke Surabaya makanya semuanya lewat sana Pak. Ini tolong satu. Yang kedua, Undang-Undang Karantina kan tadinya kita milih gabung. Karena tidak, apakah Bapak sudah MoU dengan Kehutanan dan Kelautan. Kalau belum cobalah. Saling mendukunglah kerja-kerja seperti itu.

Saya kira itu Pak Ketua. Jadi saya minta, ini diperhatikan Pak Sekjen. Jadi yang jelas tolong jangan sampai ada mark-up. Jadi Pak Sekjen dan Pak Irjen melihat anggaran yang berjalan ini betul tidak. Ini pengalaman saya Pak karena salah ketik, beli baju 1 stel 150.000.000. Harusnya 150.000 jadi juta. Jadi dibeli 150 juta 1 stel. Temuannya tidak salah karena DIPA-nya, tapi tidak ada. Masa baju 1 stel 150 juta. Salah ketik itu disahkan. Nah mana tahu Pak kejadian seperti ini. Waktu saya ada kejadian itu di DIPA didaerah. Dan kedepan tolong, gunakanlah UPT Bapak di daerah anggarannya diturunkan. Kalau Bapak-Bapak Eselon I sibuk dengan anggaran di Pusat, lupa kerjanya yang dilapangan itu.

Sekian, terima kasih Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pak Slamet, ustad.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan Sidang, rekan-rekan yang saya hormati dan juga Pak Sekjen beserta Eselon I.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama juga menguatkan yang disampaikan oleh Pak Haerudin terkait dengan pidato Presiden yang serapannya masih sangat kecil. Tidak disebut spesifik tetapi ini menjadi catatan bagi kita. Mudah-mudahan Kementan juga segera bisa merealisasikan.

Yang kedua tentunya juga ada rasa senang, syukur ketika kemudian NTP ini dan NTN ini menjadi salah satu indicator untuk penyusunan RAPBN 2021. Artinya logikanya ketika kemudian nilai tukar petani dan nelayan ini menjadi indicator harusnya anggaran juga menjadi perhatian. Oleh karena itu dari ruang ini saya menyampaikan kepada Presiden juga harusnya tidak dikurangi dan dilakukan pemotongan. Yang awalnya tahun kemarin 21 menjadi 14, sekarang pagunya sekitar 17 atau 18.

Nah ini sehingga ketika kemudian nilai tukar petani menjadi indicator maka sudah selayaknya program dari Kementan dengan seluruh Dirjennya tidak *copy-paste* sebelumnya. Harus mengacu kepada bagaimana kemudian kesejahteraan dari petani ini kita bisa tingkatkan. Jadi ini sehingga tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan. Sekali lagi, hari ini nampaknya kita berbangga dengan produksi walaupun ini juga tidak terlalu salah tetapi ketika kemudian indicator hari ini adalah nilai tukar petani ini menjadi naik maka kesejahteraan petani menjadi ukuran untuk keberhasilan dari Kementan ini. Ini tentunya harus menjadi catatan bagi kita bagaimana kemudian produksi yang sudah dilakukan oleh petani kita tentunya harga pasca panen ini menjadi mensejahterakan.

Nah ini adalah catatan yang memang harus kemudian dikaji. Sebagaimana saya tidak pernah lelah untuk menyampaikan. Tadi disampaikan subsidi pupuk juga ada pengurangan. Bagaimana kemudian dilakukan analisa telaahan pengkajian kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan subsidi pasca panen. Ini adalah mengacu kepada bagaimana kemudian nilai tukar petani ini atau kesejahteraan petani bisa meningkat.

Menjadi sebuah ironis yang sudah sering kita pahami, tadi juga disampaikan. Sayur-sayuran yang di negara kita juga sangat gampang tumbuh masih impor. Apalagi kalau bicara tentang bawang putih dan lain-lain.

Ini menjadi perhatian sehingga program-program yang 2021 harus mengacu kepada sana.

Yang berikutnya, saya juga ingin mendapatkan gambaran Pak Sekjen. Terkait dengan pernyataan dari Menteri Bapenas yang akan membentuk lembaga khusus cadangan pangan strategis yang akan ditangani oleh TNI. Sehingga saya menghimbau sekali lagi dari ruangan ini juga pada Pak Presiden bahwa amanat Undang-Undang Pangan belum dilaksanakan dengan membentuk Badan Pangan Nasional. Tapi ini membentuk lembaga yang tidak jelas urusannya. Ya sehingga ini perlu perhatian termasuk Kementan memberikan masukan kepada ini. Jadi ini sudah ada di media sehingga saya ingin mendapatkan tanggapan juga dari Kementan terkait dengan ini.

Berikutnya terkait dengan, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana upaya-upaya dari Kementan di 2021 untuk meningkatkan NTP khususnya. Karena kalau trendnya kita lihat dari Badan Statistik itu turun. Bahkan di Mei 2020 ini hanya 99,47. Nah ini menjadi catatan kita. Sehingga harus sekali lagi program-program yang sifatnya copy-paste harus kemudian dievaluasi dengan minimnya anggaran. Artinya terus dikurangi dengan target-target yang tadi sudah sangat bombastis, seperti itu.

Terkait dengan mengomentari *slide* Pak Dirjen TP, Pak Suwandi. Di slide 8 itu saya menemukan ada fasilitasi biaya distribusi untuk penanganan Covid itu 21,4 Miliar. Nah mungkin nanti Pak Wandi bisa memberikan penjelasan kepada kita khususnya saya terkait dengan fasilitasi biaya distribusi sampai sebesar itu untuk penanganan Covid.

Kemudian Pak Dirjen PSP Pak Sarwo Edhy, terkait dengan kartu tani. Kendala lapangan, dengan 1 petani mendapatkan 1 kartu secara teori, secara ini bagus. Hanya ternyata ada kendala-kendala teknis terkait dengan kemampuan, kemudian juga mental dari petani yang tidak mau ribet dan memang susah ini karena memang petani kita adalah profesi yang terpaksa menjadi petani. Sehingga dari sisi latar belakang pendidikan perlu kita up grade sehingga perlu dikaji, bagaimana kalau 1 kelompok tani itu cukup mendapatkan 1 sehingga ini mungkin akan memudahkan bagi mereka ya ini yang menurut pemikiran kita.

Terkait dengan data pemetaan juga. Ini di Dirjen PSP juga. Itu kalau diawal pertemuan dengan Pak Menteri kalau tidak salah dengan membentuk ruang pertemuan room. Itu kan menjadi 100 hari pertama program dari Kementan. Tapi di 2021 ini juga masih ada muncul anggaran untuk pemetaan data pertanian ini, 26,3 Miliar. Mungkin nanti bisa diberikan gambaran dan penjelasan.

Tadi juga disampaikan terkait dengan realisasi asuransi yang tidak pernah mencapai 100%. Mungkin nanti bisa juga digambarkan, kendalanya apa sih ketika asuransi-asuransi ini belum bisa. Karena ini memberikan jaminan juga kepada petani kita tapi kok realisasinya susah.

Itu mungkin sedikit hal yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ustad Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, Pimpinan yang saya hormati.
Pak Sekjen, Dirjen, dan semua yang hadir ditempat ini.

Pertama, saya mungkin tidak akan menyoroti secara detail karena apa yang disampaikan oleh Pak Kapoksi Pak Slamet tadi itu. Kalau ini akan kita seriusi itu akan mengubah semuanya. Karena kemarin pada hari Selasa, 23 Juni 2020 sudah ada kesepakatan Komisi XI dengan Menteri Keuangan bahwa nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan pada angka diseragamkan 102 sampai 104 itu dijadikan acuan untuk APBN 2021.

Nah ini kan PR besar buat Kementerian. Karena NTP ini banyak indikatornya. Ada indikator harga, ada indikator biaya produksi dan lain sebagainya. Nah sementara kita selama ini kalau mengikuti program-program sebelumnya, itulah kenapa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu jangan *copy-paste*. Ini menjadi landasannya. Menjadikan NTP sebagai acuan penyusunan APBN itu pesan kepada kita. Jangan *copy-paste* sebelumnya. Karena program-program APBN sebelumnya itu indikator kita adalah produksi.

Nah sekarang kerangka acuannya adalah kesejahteraan petani. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memperkecil biaya karena mainnya disitu mainnya di hulu. Nah kalau misalnya NTP ini menjadi acuan dan ini sudah menjadi kesepakatan maka saya khawatir ketika produksi kita meningkat justru pangan itu tidak bisa dibeli oleh rakyat karena kita bicara kesejahteraan. Indikator kesejahteraan itu adalah nilai komoditas itu harganya bagus.

Nah ketika misalnya supaya masyarakat bisa membeli hasil komoditas kita dengan harga yang bagus maka kita harus mengurangi biaya produksinya. Nah apa bentuknya, subsidi pupuk, subsidi harga, atau apa? Kita mainnya di biaya produksi. Nah ini akan mempengaruhi semua Pak Sekjen. Akan mempengaruhi. Jelas akan banyak biaya-biaya bantuan social atau subsidi di Kementerian Pertanian, apakah itu pilihan kita. Nah itu kan yang perlu kita diskusikan secara detail tapi ketika kita menjadikan NTP itu sebagai indikator untuk penyusunan APBN 2021 maka apa yang menjadi

historical budgeting pada APBN-APBN sebelumnya itu harus kita ubah. Ya karena dulu target kita produksi, sekarang indikatornya adalah kesejahteraan. Jadi ini kan satu rangkaian dari 3 indikator ketahanan pangan itu. Kita bicara stok karena itu produksi dan itulah oleh domain dari Kementerian Pertanian, tapi ada 2 yang lainnya soal distribusi dan keterjangkauan daya beli itu. Dan itu kan diluar kita. Maka mau tidak mau harus kita koordinasi dengan Menteri-Menteri yang lain. Jadi itu yang pertama catatan saya Pak Ketua agar kita itu merombak cara berpikir kita ketika memang nantinya NTP (Nilai Tukar Petani), dan Nilai Tukar Nelayan itu dijadikan sebagai acuan kedalam kita menyusun APBN.

Yang kedua adalah saya menjadi mengerti kenapa kemudian Pak Presiden itu marah-marah kemarin. Ya orang-orang yang mengenal dia. Kalau saya tidak mengenal Pak Jokowi, saya kan oposisi. Jadi yang mengenal Pak Jokowi dia bilang, ndak pernah Pak Jokowi bertindak seperti itu. Tapi kalau kita lihat realisasinya tidak usah Kementerian lain, Kementerian Pertanian saja. Ini sudah bulan berapa Pak. Capaiannya masih ada yang 12%. Parahnya itu pupuk lagi. Ini sudah musim kering Pak (MK1). Sudah selesai orang-orang nanam, sekarang pupuk. Realisasi kita baru 12%. Petani lagi butuh, terus Covid, tidak ada uang, segala macam tapi realisasi anggaran kita anggaran kayak begini. Ya wajarlah Pak Presiden marah. Belum lagi kita lihat Dirjen-Dirjen yang lain. Oleh karenanya kita dari sisi Anggota DPR sudah reses 3 kali. Pembicaraan pada bulan Maret, pada Desember 2019 sampai hari ini masih janji-janji. Berhenti berjanji Pak. Mari kita realisasikan apa yang sudah kita sepakati itu agar kita juga pulang itu ditunggu oleh masyarakat. Jadi jangan ditunda-tunda pencairan ini. Ya bila perlu nanti 17 Juli kita Reses Kyai Hasan, kita sudah bawalah kesepakatan Desember 2018 itu.

Yang berikutnya Pak Ketua, saya mendorong apa yang menjadi komitmen dari Pak Dirjen Hortikultura terutama bawang putih Pak. Ini Bapak luar biasa. Tapi tolong perbaiki datanya. Saya kaget melihat tadi Pak. Luas lahan bawang putih di Bima lebih besar dibanding dengan Sembalun. Pak Ketua sudah ingatkan kita, bawang putih ini ada didataran tinggi. Kalau bawang merah iya, Pulau Sumbawa sekarang sudah menjadikan bawang merah ini sebagai komoditas andalannya. Kalau dulu hanya orang Bima yang tanam bawang, sekarang orang Sumbawa, Dompu juga ikut menanam bawang dan bawangnya besar-besar.

Nah jadi contoh misalnya tadi di Bima itu 5000 hektar untuk bawang putih. Lombok Timur yang kita tahu Sembalun sebagai sentranya itu Cuma 1000. Di Bima itu Pak, itu bukan dataran tinggi. Saya sudah kontak teman-teman di Bima itu paling banyak lahannya 1000 untuk bawang putih. Yang realistis tadi Sumbawa karena lahannya Cuma 200 hektar. Ya karena orang baru tanam bawang putih disekitar Batu Dulang, di daerah Batu Lante kayak begitu, baru belajar nanam. Nah tapi kalau itu terus kita berikan dukungan kepada masyarakat dan saya mendorong Dirjen Hortikultura agar kita berhenti bicara tentang impor ini. Covid mengajarkan kepada kita. Covid mengajarkan kepada kita agar kita itu bertahan dengan sumber daya, sumber potensi yang kita punya. Negara-negara produsen perhatian kan sekarang

sedang menahan bahan pangannya. Bahannya 5% yang dikeluarkan. Nah kalau mereka tahan terus kita mengandalkan itu, kan nyolong kita Pak. Mengundang orang untuk menyelundup.

Nah jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan Pak Ketua. Saya bersyukur sekali, senang sekali melihat komitmen teman-teman terutama untuk 2021 ini kita sudah bicara tentang kesejahteraan petani, bukan hanya kita bicara tentang kesejahteraan petani. Bukan hanya kita bicara produksi, seperti sebelum-sebelumnya. Produksi meningkat, NTP turun. Tadi Kapoksi saya sudah menyampaikan itu. Sekarang kita bicara tentang produksi kita meningkat begini tapi lihat trend NTP-nya. Januari NTP kita masih di angka 104,16, tapi dibulan Mei sudah 99,47 jauh. Bicara NTP lagi mungkin kita perlu sepakati lagi nanti. Menaikan 1 digit NTP itu butuh uang berapa Triliun. Kan ini akan mempengaruhi dari struktur belanja kita di Kementerian ini. Mungkin itu Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terakhir, setelah itu kita break. Dua penanya kalau bijak 3 menit, 3 menit akan selesai sampai jam 13.00.

Silakan suara Ibu Luluk.

3 menit.

Temanya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi social. Takut belum baca.

Silakan. Saya bantu.

Terakhir Bu Julie.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan, juga Pak Sekjen dan Bapak Dirjen semuanya.

Bapak/Ibu sekalian,

Mungkin untuk mempersingkat seperti aspirasinya Pak Ketua. Yang pertama saya ingin menyoroti tentang Korea. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen PSP yang terkait dengan pengalokasian GOR itu ada lebih kurang 4 lah prioritas utamanya. Yang menjadi pertanyaan saya itu mungkin karena disana lebih besar di perkebunan dibandingkan dengan tanaman

pangan. Sementara disisi lain persoalan kita ini selama ini dengan urusannya tanaman pangan, mulai dari beras, jagung, kedelai, dan seterusnya. Sementara di perkebunan mungkin ini yang perlu disampaikan ke kita, apa sih yang mendasar argumennya sehingga pengalokasiannya itu lebih banyak di perkebunan dibandingkan dengan tanaman pangan. Mengingat kita misalnya importasi kedelai luar biasa tingginya, kemudian juga jagung sangat tinggi.

Terus yang kedua pertanyaan saya ini yang terkait dengan rencana kedepan itu Pak. Kalau selama ini misalnya importasi kita ini sudah diketahui ya jenis komoditas tertentu. Kenapa misalnya kita tidak punya target, berapa sih sebenarnya di tahun pertama impor ini bisa kita kurangi. Berapa persen dari yang selama ini selalu kita impor, kemudian dengan cara apa kemudian bisa kita kurangi itu. Kalau misalnya itu dengan perluasan lahan berarti luasan lahannya yang ditambah. Tadi saja dengan estimasi jagung ya kalau tidak salah. Maaf yang kemudian yang hanya 5000. Jadi yang seharusnya 78.000 hektar sekian, kemudian kita hanya bisa target 5000. Apakah ini semata-mata karena anggaran kita yang terbatas atau karena memang politik kita ini yang belum sampai kesana gitu Pak. Bagaimana kemudian kita bisa memenuhi keinginan kita untuk bisa swasembada ini jauh banget dari tujuan bisa sampai kesitu, karena kok jangankan separuh ya Pak seperempat juga tidak. Jadi 78.000 kemudian hanya ada 5000 luasan lahan yang bisa akan dikerjakan. Nah apakah ini nyambung kepada dari Pak Johan, apakah karena memang pendataan kita ini yang memang belum sempurna sehingga inputnya yang masuk itu tadi tidak tepat, contohnya saja tadi dibidang yang seharusnya Sembalun itu lebih besar dibanding Bima, nah kayak begitu. Termasuk juga dukungan ditempat saya itu Pak. Itu kan ada benih local yang ternyata dianggap rasanya lebih manis, lebih gurih, lebih bagus bahkan lebih kenyal yang namanya bawangnya. Nah kenapa yang kemudian bawang kayak tawangmangu super atau bawang tawangmangu baru itu yang tidak dicoba untuk dikembangkan terus menerus karena pasti cocok dengan lahan yang kita punya. Alamnya berbeda dengan alam dari negeri sebrang.

Terus yang berikutnya lagi. Dari beberapa kali saya hadir di perkebunan jagung yang dimiliki oleh petani termasuk yang kemarin yang di Jawa Tengah. Begitu sampai kepada pertanyaan ini, benih yang digunakan benih siapa. Itu agak berdebar saya Pak Sekjen. Karena apa? Karena ternyata benihnya kalau tidak bisim sih pioneer. Tidak pioneer kemudian sih bisim, kapan kemudian para petani itu akan menggunakan benih kita. Pertanyaannya apakah memang benih kita ini tidak layak untuk dipakai, untuk ditanam, ataukah SDM kita ini memang tidak mampu menghasilkan benih yang bagus, apakah riset kita ini tidak serius, ataukah sosialisasi kepada petani itu yang kurang maksimum, ataukah kekuatan dari perusahaan-perusahaan asing yang jauh lebih dominan menguasai sistem perbenihan di tanah air kita.

Nah saya kira itu ya Bapak ya. Sekali lagi kita berikan dukungan sebenarnya kepada Kementerian ini agar menjadi bagian yang luar untuk bisa mewujudkan Undang-Undang Pangan kita ini benar-benar bukan impian karena untuk bisa sampai kesana dulu sudah pertarungan hidup-matilah kira-

kira di DPR. Tetapi kalau kemudian kita tidak satu visi, tidak satu gerakan maka kita akan sangat prihatin sekali.

Terima kasih Pak Sekjen dan Bapak Dirjen semuanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ibu Julie, terakhir.

Selanjutnya kita skors terakhir.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh teman-teman di Komisi IV, Pak Sekjen, para Dirjen.

Perkenalkan saya dari Nusa Tenggara Timur karena saya terakhir saya tidak banyak hanya saya mau. Saya sepakat dengan Pak Ketua bahwa segala sesuatu program itu harus ada grand design. Jadi bukan karena ada anggaran terus kita hambur-hambur seperti itu. Kebetulan saya Ketua PKK juga di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya tahu persis juga di Provinsi cara bekerjanya. Hampir-hampir juga mengikuti Kementerian. Jadi saya ini hari juga menitipkan grand design dari Nusa Tenggara Timur.

Yang pertama adalah kita NTT mempunyai 1 Kota 21 Kabupaten, dan kalau ditabur begitu saja kita tidak akan melihat maksimalnya itu seperti apa nantinya. Jadi saya menitipkan Kabupaten Nagakeo yang mana saya sudah berbicara dengan Pak Menteri. Mereka mempunyai program untuk pertanian karena memang mereka Nagakeo itu adalah khusus untuk sawah dengan cabe dan yang lainnya. Dan mungkin di Nagakeo itu sendiri untuk Dirjen Tanaman Pangan, mereka itu di Kabupaten Nagakeo ada koperasi produsen, dan mereka membawahi petani-petani yang masalahnya mungkin ada 2 yaitu yang pertama adalah bibit padi yang berkualitas. Bibit-bibit yang berkualitas dan juga adalah setelah mereka panen, mereka bisa sebanyak berkualitas. Gedung pengelolaan pasca panennya itu yang mereka selama ini belum memiliki, sehingga nanti mungkin hulunya saja hilirnya kami tidak dapat.

Dan untuk Dirjen PSP, untuk Nagakeo kami berterima kasih kemarin Pak Mentan sudah perjuangkan yang untuk waduk dan irigasi. Memang sudah dimasukkan anggaran ke mereka tetapi kami minta untuk membantu perbaiki saluran airnya untuk meningkatkan volume airnya. Jadi bukan hanya waduknya saja tetapi irigasi mereka dibantu untuk ditingkatkan. Dan kami juga NTT khususnya Nagakeo mendapatkan bantuan jaringan irigasi. Itu saya minta Pak Dirjen, karena Pak Bupati juga mau menitipkan untuk bisa program pintu air tanggul demi membantu sistem irigasi di Nagakeo, karena sangat

kering sekali disana. Dan memasuki kemarau mungkin embung-embung yang kami di NTT itu, mungkin Pak Dirjen tahu bahwa kami ini NTT kekurangan air dan kering sekali. Dan yang terakhir karena saya Ketua PKK. Karena PKK ini bukan hanya di Nusa Tenggara Timur tapi diseluruh Indonesia, apakah mungkin karena kami punya program itu PKK khususnya NTT adalah ketahanan pangan untuk bisa ketahanan pangan mandiri di masing-masing untuk mungkin seperti sekarang Covid mereka harus bisa mandiri untuk ketahanan pangan mereka. Dan apakah ada kemungkinan, mungkin selama ini kami PKK belum. Biasanya kan Kementerian langsung ke Dinasnya, sedangkan kami PKK harus ke Dinasnya. Kadang-kadang itu kami sulit sekali karena mereka sudah alokasi ke tempat-tempat yang memang tidak mendukung kami PKK. Sedangkan PKK ini sampai Dasa Wisma.

Jadi saya yakin tujuan program-program dari Kementerian itu kan tujuannya ke masyarakat yang dibawa, bukan hanya segelintir kelompok-kelompok dia-dia lagi, dia-dia lagi yang mendapatkan. Apakah bisa kami dari PKK itu karena programnya ini bisa dicantumkan juga dititipkan untuk para Dirjen. Karena kami di PKK mempunyai program yang namanya hatinya PKK. Jadi kami harus memaksimalkan pekarangan rumah kami, seperti itu. NTT kita tahu susah jadi ya salah satu adalah *hydroponic* dengan irigasi tetes yang kami coba kembangkan di Nusa Tenggara Timur.

Dan terakhir kelompok taninya. Kalau bisa lebih banyakin juga kelompok tani perempuan dengan juga anak-anak milenial. Karena mengingat kami ini NTT banyak sekali yang kena PHK, dengan TKI dari Luar Negeri yang pulang dan mereka biasanya tidak betah di Desa. Terus kami berusaha untuk membuat program-program, kelompok-kelompok menjadi mereka petani kembali lagi *back to basic*-nya bahwa jadi petani itu bangga dan bisa juga menghasilkan perputaran ekonomi juga bisa dapat. Saya rasa itu yang saya titipkan untuk Nusa Tenggara Timur.

Terima kasih.

Saya kembalikan Pimpinan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Waktu kita skors untuk istirahat, sholat dan makan. Di skorsnya kurang lebih 30 menit. Kan cukup kan 15 menit makan, 15 menit sholat.

Atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Skors 30 menit.

(RAPAT DISKOR)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Rapat kita mulai kembali.

(SKORS RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Kami lanjutkan al-mukarroom ustad Muslim Demokrat.

Kami persilakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Pak Sekjen beserta jajarannya.

Pertama tentu, saya beberapa hal saja berkaitan pertama menyangkut Pak Dirjen Hortikultura. Kalau saya melihat dari pengembangan yang terintegrasi di 2021 saya melihat disini terutama menyangkut bawang merah nih Pak Dirjen ya. Ini terus terang kalau kita lihat disini dari angka tanam nasional itu 175.000 hektar ya. Artinya memang ini saya pikir perlu ditambah lagi Pak Dirjen. Terus terang kami pun di Aceh kemarin dengan kuota yang sedikit sekali diberikan Pak berebut Pak semua. Artinya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini mungkin jadi catatan juga buat Pak Dirjen. Artinya ketika komoditas-komoditas tertentu yang betul banyak diminati dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat itu mungkin itu bisa diperbanyak. Kira-kira yang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat itu kita perkecil Pak Dirjen. Jadi sehingga optimal dan sasaran target itu bisa didapatkan.

Kemudian berkaitan dengan kurang lebih ada sekitar 16 komoditas ini ya. Saya berharap juga disini belum saya lihat kelapa Pak. Oh mohon maaf. Durian Pak. Saya berharap ini saya pernah bertanya juga berkaitan dengan durian. Hari ini kan lagi sangat menarik Pak Ketua, ada durian montong, ada durian musang king, dan durian-durian lain. Artinya bahwa ini banyak sekali permintaan didaerah. Tentu dalam hal ini kita juga harus sampaikan ke Pak Dirjen, tolong kualitas bibit durian ini yang diberikan kepada masyarakat itu betul-betul maksimum sehingga hasil yang diharapkan bisa didapat Pak. Jangan sampai begitu bibit yang diberikan ini, akhirnya mereka nunggu 3-4 tahun akhirnya hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Kemudian yang bawang putih, saya yakin ini menjadi problem kita. Saya lihat dari total ini semua hampir 80% bergantung kepada impor. Tentu

dalam hal ini di Aceh ada 2 Kabupaten Pak, ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah itu. Itu kenapa tidak bisa lebih banyak didorong Pak. Itu juga cukup strategis daerah ketinggian yang luar biasa ini juga menjadi pertimbangan tersendiri buat Pak Dirjen.

Terakhir berkaitan hortikultura Pak Dirjen, saya belum lihat disini ada program yang menyentuh langsung kepada milenial Pak. Ini terus terang kami beberapa waktu berdiskusi terus anak-anak milenial nih khususnya, baik pun yang putus kuliah atau pun yang masih kuliah ini mereka belum ada porsi disitu. Bagaimana mereka diberikan 1 porsi termasuk juga pelatihan-pelatihan itu Pak. Jangan sampai begitu banyak kita berikan ini outputnya ini tidak maksimal. Ini mungkin Pak Dirjen jadi masukan. Mereka sangat berharap mereka juga bisa diberdayakan dalam konteks khususnya hortikultura. Apalagi hari ini lagi hydroponic dan lain-lain.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan Pak Dirjen PSP. Tentu Pak Dirjen saya ingin, tentu tidak menyoroti secara menyeluruh. Pernah tidak dibuatkan data. Setiap tahun kan berapa banyak bantuan, baik pun itu Alsintan dan yang lain output dari sekian banyak itu seperti apa. Jadi sehingga hari demi hari, tahun demi tahun ini manfaat daripada Alsintan ini betul-betul berdampak kepada masyarakat. Kita tahu betul banyak didaerah-daerah nih Pak Alsintan ini banyak sekali yang dimasukin gudang Pak, tidak jalan. Jadi pernah tidak dikontrol, diawasi betul. Jangan sampai setelah tahun ini diberikan itu banyak numpuk digudang-gudang Dinas Pak. Itu banyak kita temukan. Akhirnya banyak yang tidak jalan Pak. Kenapa? Karena alasan mereka tidak punya anggaran untuk memperbaiki itu. Jadi saya berharap ini sasaran Pemerintah bagus tapi pengawasannya kita selaku Anggota DPR mengawasi tapi ini menyangkut juga pembinaan Kepala Daerah Pak termasuk Dinas-Dinas terkait ini bagaimana disoundingkan dengan daerah ini. Jadi sehingga itu bisa berjalan jadi sehingga petani bisa memanfaatkan Alsintan itu sendiri.

Terakhir, saya lihat strategi peningkatan kapasitas produksi ini bagus Pak termasuk penggunaan benih tadi yang disampaikan teman-teman, penggunaan pupuk. Dalam hal ini terus terang kita berharap lagi kepada Pak Dirjen ini tolong semua yang diberikan bibit maupun apa kualitasnya menjadi pertimbangan. Kenapa saya katakan. Karena pengalaman didaerah Pak, semua dikasih bibit kepada masyarakat. Akhirnya mereka menunggu bertahun-tahun begitu panen tidak ada hasil Pak. Kasihan kan. Sudah dia pupuk segala, karena apa? Karena kualitas bibitnya tidak bagus. Jadi saya berharap nanti semua bibit disamping bersertifikat Pak, dikontrol Pak. Kenapa? Karena dikasih oleh pihak ke-3 kan. Kalau ini tidak dikontrol Pak nanti akhirnya masyarakat jadi korban lagi dalam konteks seperti ini.

Itu beberapa hal Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Muhamad Ichsan Firdaus.

Silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Ijin Pak Ketua saya bicara boleh. Pak Sudin, ijin. Ada beberapa hal sebenarnya saya ingin klarifikasi dengan target produksi. Pada saat Raker dengan Kementerian Pertanian, saya hanya ingin ingatkan bahwa target produksi kita itu jangan muluk-muluk Pak karena dengan keterbatasan anggaran. Kemarin waktu pada saat kita mengesahkan. Periode lalu mengesahkan 2020 itu sekitar 21, lalu turun menjadi 18, lalu turun lagi menjadi 14. Tapi target produksinya tetap. Jadi kita coba realistis saja. Ambil contoh misalnya kalau boleh saya sorotin terkait misalnya dengan pengembangan jagung Pak Dirjen Tanaman Pangan. Saya ingat 2019 pengembangan jagung itu sekitar 3,6 juta hektar. Tolong koreksi saya kalau saya salah. 2020 itu 2,2 juta hektar. Sekarang di 2021 ada usulan 1,85 Juta hektar. Kalau target produksinya tetap pertanyaan saya darimana target produksi itu bisa tetap. Jadi kalau kemudian angkanya itu sekitar 2,2 juta hektar. Sepengetahuan saya, tolong koreksi saya. 2019 ketika anggarannya 3,6 juta hektar itu kita produksi jagung pun menurut saya juga ada. Memang tidak ada impor jagung tapi data yang saya dapat (tolong koreksi saya salah) kalau kemudian di 2019 juga ada impor jagung walaupun kecil. 2020 menurut Pak Menteri Pertanian bahwa tidak ada impor jagung. Tapi anggarannya turun dari 3,6 juta hektar menjadi 2,2 juta hektar.

Saya tidak habis pikir dimana logikanya. Sekarang 2021 usulannya 1,8 juta hektar. Turun lagi. Disisi lain kedelai yang katanya swasembada, ada target swasembada kedelai hampir 10 tahun kita punya keinginan untuk melakukan swasembada kedelai tidak pernah terealisasi. Target 2020 katanya swasembada kedelai. Kalau kita bicara tadi Mbak Luluk mengatakan harus ada grand design (eh, Mbak Julie tadi mengatakan *grand design*). *Grand design* 10 tahun yang lalu mengatakan bahwa swasembada kedelai itu Tahun 2020. Sampai detik ini tidak ada swasembada. Artinya kita realistis saja bicara target. 1,8 juta hektar pengembangan jagung tapi target produksinya sama dengan 2020 padahal anggaran 2020 = 2,2 juta hektar. Jadi tolong Pak saya minta tolong dengan sangat, tolong target produksinya realistis saja. Jangan sampai Pak Menteri sudah mengatakan kalau target produksinya turun saya akan mundur jadi Menteri. Khawatirnya betul-betul

mundur Pak. Bukan karena target produksinya tetap tapi kemampuan anggaran kita terbatas Pak. Kecuali kita tambahkan.

Saya usulkan kalau kemudian pengembangan jagung ini jangan 1,8 kembalikan saja ke 2,2. Kalau kedelai memang tidak realistis untuk kemudian tidak ada swasembada ya kenapa kita tidak alihkan saja ke jagung yang lebih realistis Pak. Itu yang maksud saya. Artinya jangan kemudian kita mentargetkan produksi muluk-muluk tapi kemudian angkanya tidak realistis. Ini indikatif Pak. Mumpung kita bahas pagu indikatif Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua hortikultura Pak. Pada saat Raker dengan Pak Menteri saya sudah mengatakan bahwa tolong klarifikasi Pak Dirjen Horti. Cabe merah, cabe rawit, data BPS mengatakan bahwa ada perkiraan produksi itu 762.692 ton perkiraan. Ini baru perkiraan. Cabe rawit 755.363. Anggarannya sama tidak Pak ini Tahun 2021. Anggaran untuk pengembangan cabe rawit dan cabe besar, antara 2020 dengan 2021 sama tidak Pak Dirjen? Sama? Anggarannya sama Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Jadi yang disampaikan didalam table itu target produksi untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Jadi targetnya itu. Dukungan APBN-nya itu hanya sekitar 7000 hektar saja untuk Tahun 2020.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

2019 produksi cabe merah berapa Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA:

2019 produksi cabe merah sekitar 1,5-1,6 juta ... (suara tidak jelas).

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Data BPS atau data Dirjen Horti Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Itu data BPS Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke. Nanti kita tunjukkan sama-sama datanya Pak. Maksud saya begini, kalau kemudian anggarannya sama, angkanya kemudian target realisasi produksinya berbeda. Ini harus kita ubah Pak, serealistis mungkin Pak. Mohon maaf Pak Charles saya hanya ingin mengingatkan kasihan Pak Menteriya Pak. Kalau kemudian target produksinya mengawang-awang, tapi anggarannya tetap anggaran di angka 18 Triliun misalnya itu bagaimana produksi bisa naik. Mari kita fokus saja Pak. Misalnya kalau jagung ya jagung,

jangan kedelai Pak. Kedelai boleh, tapi kalau kemudian produksinya Cuma 1,85 juta hektar bagaimana mau naik Pak produksinya.

Jadi saya minta tolong dengan hormat ini kita jaga performance Kementerian Pertanian atau Pak Menteri Pertaniannya. Jangan sampai kemudian target produksinya naik, realisasinya tidak. Tidak ada impor misalnya. Kita bicara beras lagi Pak. Sepengetahuan saya kalau kita bicara time series Juni 2020 perkiraan ada stok beras atau surplus beras itu sekitar 6,4 juta ton menurut data BPS. Betul Pak Dirjen, 6,4 ya? Tapi kalau kita bandingkan dengan Tahun 2019 di bulan yang sama itu ada surplus sekitar 9,4 juta ton. Berarti ada selisih penurunan sekitar 3 juta ton di Tahun 2019. Tahun 2020 di bulan yang sama kalau bicara time series 6,4, berarti ada selisih sekitar 3 juta ton. Kalau kita mengatakan bahwa di Tahun 2020 tidak ada impor saya khawatir time series akan muncul masalah dikemudian hari. Saya sudah dapat data Pak bahwa time series Juni 2019 surplus kita atau kita di Juni 9,4 juta ton. Juni 2020 6,4 juta ton, ada 3 juta Pak. Apalagi kondisinya pandemi seperti ini Pak, ada PSBB, ada kondisi anggaran yang terbatas dan sebagainya. Kalau produksi tetap pertanyaan saya adalah apakah mungkin itu terealisasi. Saya ingatkan 2021 kondisi ekonomi kita masih bermasalah. Kalau produksi kita masih tetap seperti itu saya khawatir performance Kementerian Pertanian dalam hal ini Pak Menterinya Pak Kyai Hasan itu bermasalah Pak, khawatirnya gara-gara target produksinya terlalu muluk-muluk untuk kita bisa. Saya ingatkan itu Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'allaikumsalam.

Lebih 1 menit.

Silakan Pak Andi Akmal. Bu Riezky mana? Bu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan, beserta teman-teman Anggota, Pak Sekjen dan para Dirjen yang hadir disini.

Saya sedikit menyoroti ya kaitan rencana kegiatan Kementan di Tahun 2021. Tentu dari beberapa program yang disampaikan serta sesuai dengan tema dan prioritas nasional RKP 2021 yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi social. Saya sangat mendukung sekali Pak Sekjen. Tentu ini semangatnya bagaimana 2021 dari sisi ekonomi transaksi dan sesuai tema yang seharusnya dilakukan bagaimana Kementerian Pertanian juga mampu menterjemahkan daripada visi, misi Pemerintah kita serta visi-misinya Menteri kita upaya untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi, disamping itu juga bagaimana mewujudkan swasembada pangan. Kemarin juga disampaikan cukup bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa diterjemahkan juga ini juga tentu menemui banyak persoalan, dan beberapa prioritas pembangunan saya melihat bahwa 2 prioritas yang menjadi prioritas utama di Kementerian Pertanian ini perencanaan yang sudah dilakukan yang seharusnya perencanaan itu sesuai dengan money follow function, dimana uang akan mengikuti daripada fungsi-fungsi di beberapa Dirjen yang ada di Kementerian. Jadi saya berharap fungsi-fungsi dan peran di masing-masing Dirjen ini sudah paham, apa siapa melakukan apa untuk menjawab persoalan terhadap kebutuhan akan pertanian kita, hulu sampai hilir, sebelum dan sesudah panen yang menjadi PR bersama.

Disini sudah dipetakan bagaimana menyusun kerangka perencanaan 2021 dengan nilai uang 18T. Akan tetapi sudah langsung dirumuskan presentasi per presentasi yang lebih banyak dikedepankan yaitu kaitan dengan program ketersediaan akses Nah itu memang menjadi prioritas pembangunan sekitar 55%, dan 30%-nya adalah kaitan program dukungan manajemen. Maksud saya disini, apa yang disampaikan teman-teman tadi supaya untuk mengukur produksi pertanian juga jangan muluk-muluk. Harus sesuai terukur tepat sasaran. Yang terjadi bahwa kalau melihat dari skemanya. Ini perbandingannya sedikit ya antara dukungan manajemen dengan kegiatan yang menjadi prioritas utama. Nah ini tolong dikoreksi kembali agar beberapa nilai-nilai angka ini kan harusnya sudah masuk disesuaikan dengan mapping. Kaitan dengan misalkan lahan, saya sepekat. Data lahan pertanian jadi lahan baku ini juga kami Anggota Komisi IV belum menerima data baku lahan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BPN. Ini hendaknya kan harus disampaikan, berapa sebetulnya rill yang terjadi agar untuk bisa merencanakan serta mengalokasikan anggaran dari angka-angka ini juga sesuai.

Berikutnya, saya melihat bahwa di Dirjen PSP ada rencana program kaitan dengan rencana pinjaman modal ya Luar Negeri. Mohon ini untuk bisa dijelaskan dan modelnya seperti mohon dijelaskan seperti apa.

Nah terakhir, jangan hanya dalam menyusun perencanaan itu hanya sebatas hanya dilihat indicator pembangunan makro oke. Itu tujuan akhir. Tapi disini saya saya melihat hanya sasaran output yang seharusnya outcome juga ini harus diukur, apa sih keuntungan negara dan keuntungan rakyat kita khusus para petani terhadap uang-uang negara yang sudah digelontorkan. Jadi prinsip, efektif, efisien, akuntable, dan transparan dalam penyusunan perencanaan pembangunan juga jelas. Itu begitu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ibu Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Siap.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi dan juga Anggota Komisi IV, dan juga Bapak Sekjen beserta jajaran Eselon I.

Pimpinan,

Saya mau menyampaikan yang pertama adalah seperti Rapat pertama dengan Pak Menteri kita harus focus dalam proses penganggaran di Tahun 2021. Ingat pada saat ini kita telah menghadapi Covid-19. Sampai saat ini pun kita tidak mengetahui pasti sampai kapan virus Covid-19 ini akan berakhir. Begitu juga kita melihat proses penganggaran dari Mentan ini tidak melihat adanya progress yang lebih baik menurut saya. Saya ingin sampaikan kita pada saat ini Tahun 2020 saya mau langsung saja sama Pak Dirjen Tanaman Pangan ya. Tahun 2020, dan Tahun 2021 melihat di halaman 14. Tadi sudah disinggung sedikit soal tanaman jagung dan kedelai yang impor juga. Saya melihat bahwa kita harus mengandalkan produksi-produksi atau tanaman yang ada di dalam daerah kita atau dalam negara kita. Beras misalkan, kita punya tahun 2020 sesuai yang disampaikan kita punya surplus dan akhirnya beras itu menjadi kadarluarsa, dan akhirnya dicampur-campur dan dibagi-bagi. Harusnya kita mempunyai program yang setiap tahun kita meminimalisasikan impor dari luar. Saya melihat ini seperti tanaman umbi-umbian. Saya melihat di halaman 14. Ini juga kan seharusnya dalam suasana seperti ini Covid-19 yang tidak menentu ini kita harus memprioritaskan tanaman-tanaman ini. Karena Pak ingat, kita ini mungkin juga gelombang 1 untuk Covid-19 ini belum sekarang. Nanti mungkin di September-November dan Desember itu high, lebih tinggi proses penyebaran dari virus ini. Pasti. Kita juga harus mempersiapkan diri kita, bagaimana untuk bisa mengandalkan produksi-produksi dalam negeri atau hasil-hasil tani dalam negeri. Saya melihat ini belum terlalu fokus bagaimana untuk kita benar-benar menghasilkan hasil dari Dalam Negeri sendiri.

Terus juga saya melihat di Hortikultura, ada 220M kalau tidak salah begitu ya. Pak Dirjen ya, benar tidak sih itu? Ya tadi ini disampaikan jadi saya tanya. Kan ini tadi disampaikan, saya tanya, belum dijawab.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ya, lanjut-lanjut.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya kan saya tanya, Beliau belum jawab ke saya. Bilang iya.

DIRJEN HORTIKULTURA:

956 indikatifnya untuk Tahun 2020.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi Pak Dirjen, saya melihat ini kana da target produksi per ton di halaman. Ini tidak ada halaman Pak Ketua, makanya saya agak bingung ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Halaman 3 itu namanya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi saya ingin menyampaikan Pak Dirjen, ini kan soal bawang putih RIPH ini saya selalu, di Komisi IV ini mungkin Bapak hafal saya karena RIPH Bawang Putih. Terus juga ini nanti bersangkutan paut dengan Karantina ini pak dan ini saya ingin menyampaikan, RIPH yang diberikan kemarin kepada Perusahaan yang kita juga mempertanyakan sampai saat ini juga belum dijelaskan. Kan bapak waktu itu saya tanya kan ada perusahaan yang memiliki RIPH tapi tidak pernah melakukan wajib tanam, benar kan pak? Karena perusahaan itu sebelumnya belum melakukan impor atau mendapatkan RIPH, begitu kan pak?

Kemudian didua bulan kemarin juga ada impor bawang putih yang tidak memiliki RIPH, ini bagaimana pak dirjen? Saya tanya dulu, nanti bapak jawab sekalian saja ma.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Nanti saja, jawabannya nanti.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Maksudnya saya tekankan biar bapak ingat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Tiga Menit setengah.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sebentar pak, kalau ketua yang bilang tiga menit saya enggak bisa, tapi kalau ini kan ketua saya baru datang ini. Jadi saya lebih lah kasih diskon dikit. Mbak Lulu sekali-sekali lah mbak lulu.

Jadi ini yang perlu saya tekankan pak, terus juga ini di karantina Bapak jangan gangguk-gangguk aja pak. Tugas bapak itu berat loh, bener. Ini Impor dari Luar negeri begitu banyak, bapak tahun ini saya ngecek lagi anggarannya tambah lagi, ya toh? Tapi apa yang kita ngeliat hasil impor juga tidak sesuai dengan kenyataan atau masih terdapat kesalahan-kesalahan, tolong lah pak. Kita ini di Komisi IV bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Kementan ini adalah harapan bagi 267 Juta Jiwa yang ada di Indonesia. Tolong ingat jangan sampai kita kelaparan ingat itu, nanti kedepan nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang sudah mulai susah hidup, ingat itu.

Covid-19 di Jakarta makin hari semakin naik, di daerah masing-masing semakin hari semakin naik. Jangan pak, orang kalau sudah tidak sehat, kalau perut kosong apa yang? dan itu adalah Tanggung jawab dari Mentan. Kita yang ada di Komisi IV ini harus memperingatkan, harus tapi juga melandaskan dengan Peraturan-peraturan. Tolong dengan sangat, ini karantina ini waduh, saya kalau bisa pak, (suara tidak jelas) kebetulan disini juga ada wakil ketua komisi kita yang semakin cerah. Mohon dengan sangat untuk kita buat Panja Pak, Karena ini memang harus kita benahi bersama-sama agar Komisi IV di Tahun 2020 sampai 2024 ini memang betul-betul bisa memperjuangkan hak dan yang menjadi keperluan seluruh Rakyat Indonesia.

Itu saja nanti saya nambah lagi, kalau orangnya enggak ada saya bisa diwakilkan saja pak.

Terima kasih, Ketua yang baik hati dan tidak sombong.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Silakan Riezky.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sebelum di tahan 3 menit, saya minta waktu 5 menit. Tadi saya, dari kemarin saya mencoba mempelajari *slide-slide* yang bapak sampaikan. Gini pak kita sudah kesekian kali rapat dengan Kementerian Pertanian yakan? Semua yang disampaikan kurang lebih substansinya

Ini masalahnya saya mengkritisi paparan Bapak. Itu maksudnya saya. Janganlah terang benderang. Cukuplah Ibu Alien saja. Saya kasih juga lama-lama. Kan begitu.

Sasaran Bapak dalam 2021 itu mengaplikasikan ideal paparan Bapak ini kira-kira Pak tercapai atau tidak. Kan begitu dulu Pak. Jangan dikasih harapan terus. Kan begitu. Itu satu.

Kedua, saya ini memang bukan Insinyur Pak, Cuma saya mau masuk ke Karantina. Alhamdulillah sih dulu pernah Pak jalan-jalan sebentarlah ke Luar Negeri dikitlah ya sebelum di DPR mah. Karantina itu garda terdepan Pak. Dalam bentuk apa pun. Cuma dari tadi saya baca sertifikatlah, apalah, kan begitu. Anggaran Bapak besar Pak. Outputnya apa? Tadi dibahas masalah enoki, anak saya itu Pak paling demen Pak itu jamur. Kan begitu. Terus tiba-tiba dibilang ada sakit. Ya sebagai ibu-ibu yang urusin anak-anaknya ya akhirnya kita tahan dulu, kan begitu. Karena begini, Kementan ini kan mencanangkan program peningkatan ekspor komoditas pertanian. Betul tidak? Fungsi Karantina disitu apa Pak. Itu satu.

Kedua, saya mau tanya ekspornya kemana Pak? Itu yang saya mau tanya. Ekspornya kemana ini tadi saya tadi saya ngomong sama Ketua Sudin bahwa ini pertanyaan dari anak yang sedang kuliah Pak. Kita mau ekspornya kemana? Nah ini saya mau tanya Pak dengan kondisi seperti ini. Karena begini, kaitan lagi dengan yang Ibu Alien tanya. Pak Dirjen Horti, RIPH-RIPH dan segala macam, impor bawang, ekspor bawang, dan segala macam. dengan Hortikultura. Kerjasama tidak? Kan itu juga yang jadi pertanyaannya. Koordinasinya ya gitu loh. Jangan gerak sendiri-sendiri. Anda ini dalam suatu Kelembagaan Bapak-Bapak.

Jadi kalau saya sama Pak Sudin sebenarnya tadi agak kontra produktif, dengan pendapat Bapak ini gimana-gimana, bukan. Anda ini merumuskan semua paparan ini duduknya bareng atau kagak. Itu dulu. Lah ini sudah duduk tidak bareng. Saya inginnya begini Pak, nasib banyak petani hari ini di Indonesia itu ada ditangan di Bapak-Bapak. Bapak Dirjen TP, Bapak Dirjen PSP. Saya juga kaget. Pak Sarwo tidak ada SNI-nya, yaah. Saya baru tahu. Nah tapi saya yakin, Bapak akan memperbaiki itu. Segera Pak, kalau tidak serapan Bapak bahaya. Baik-baik, nanti Menteri-nya kena reshuffle benar Pak. Nah misalkan Dirjen TP (PAJALE) padi, jagung, kedelai. Kedelainya kagak dapat-dapat target. Ya sudah Pak padi, jagung saja, susah amat. Gitu loh maksud. Yang realistis saja Pak Momon maksud saya. Kan itu loh. Kami disini wakil rakyat Pak. Saya yakin disemua wilayah ini punya sector

pertanian. Kita mau bantu Bapak, seperti yang disampaikan oleh Pimpinan. Jangan dilihat Pak kami ini warna bajunya berbeda. Kalau saya boleh mengungkapkan tadi kata-kata Abang saya tadi juga, Bang Johan Rosihan yang tadi hari ini sudah hadir disini dari NTB. Amanat Komisi IV salah satunya adalah keadilan dan sejahtera. Keadilan dan kesejahteraan untuk petani. 5 menit Pak sebentar. agar semua ini mampu kita restorasi melalui karya dan kekaryaan. Sehingga gerakan bersama melalui Indonesia Raya ini siap menuju kebangkitan Bangsa. Tapi semua itu tidak akan terjadi tanpa perjuangan Pak.

Nah itu maksud saya. Perjuangan ini tidak di Komisi IV sendiri, tetapi bersama Bapak-Bapak di Kementerian Pertanian.

Terakhir Pak. PSP. Tadi Pak Slamet bilang masalah kartu tani. Saya juga nanya Pak, efektifkah kartu tani Bapak hari ini apabila tetap dengan pola yang lama.

Terima kasih.

Saya akhiri.

*Wabilluhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'allaikumsalam.

Belum bicara merdeka ini. Karena masih mualaf.

Ayo silakan Pak Doktor. 3 menit Pak Doktor.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua.

Pak Sekjen (Pak Momon) dan para Dirjen yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, paparan realisasi anggaran yang disampaikan oleh Pak Sekjen yang mencakup semua Direktorat Jenderal Eselon I, baik yang mencakup realisasi anggaran penanganan Covid maupun yang bukan per 26 Juni 2020 itu kesimpulannya, serapannya ada dibawah angka 50% Pak. Nah dukungan pencegahan penularan 42,21%, pengamanan ketersediaan pangan 40,48%, social safety net 45,58%. Pertanyaan saya, mengapa serapannya hanya segini Pak.

Padahal kita sudah ketok palu dari bulan September beberapa bulan yang lalu.

Yang kedua, saya ingin tahu anggaran Covid ini dialokasikan kemana Pak, detailnya seperti apa. Yang berikut Pak, beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo itu marah-marah Pak. Karena Kementerian penyerapannya rendah, bahkan mengancam akan melakukan resufhle Pak. Kalau serapannya rendah para pengamat politik itu membaca bahwa program kerja itu belum sampai ke rakyat. Maka kemarahan Presiden itu karena Presiden sebagai Pemimpin merasa bertanggungjawab disaat pandemi ini mestinya program-program itu sudah dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau kita bicara Kementerian Pertanian terkait dengan kondisi petani kita Pak. Kita sepakat pada saat itu, bantuan social, insentif, stimulus, semuanya itu tujuannya adalah untuk *income and product*. Nah saya ingin mendapatkan penjelasannya Pak.

Yang kedua, Badan Karantina Pertanian. Mottonya keren, professional, tangguh, dan terpercaya. Saya setuju ini adalah ujung tombak dan garda terdepan untuk menjamin keamanan baik pangan kita maupun ternak kita. Sehingga kemudian tanaman atau pun ternak kita itu tidak kena hama atau penyakit Pak. Saya ambil kasus virus flu babi Afrika yang melanda sejumlah tempat, Sumatera Utara, Bali dan Nusa Tenggara Timur di Kampung saya Pak. Itu membuat ribuan babi itu mati 2019-2020, dampaknya kepada peternak babi dan kepada UMKM. Fakta ini membuat saya menyimpulkan Badan Karantina Pertanian itu kecolongan Pak. Mestinya Badan Karantina Pertanian memiliki sebuah sistem deteksi dini sehingga kemudian virus itu tidak buat babi-babi di Nusa Tenggara Timur mati dan itu sumber penyakitnya dari Timor Leste Pak.

Yang ketiga, Direktorat Jenderal PSP. Alsintan itu penting untuk produktivitas Pak. Pengadaan Alsintan ini menurut saya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah dan wilayah Pak. Saya kasih contoh, Nusa Tenggara Timur yang adalah lahan kering dengan curah hujan yang sangat terbatas tentu beda dengan Provinsi Jawa Barat atau Sulawesi Selatan yang merupakan lahan basah dengan mungkin curah hujannya cukup panjang Pak. Dengan demikian mungkin di Nusa Tenggara Timur lebih dibutuhkan adalah eskafator, dan juga yang dibutuhkan adalah pembangunan embung Pak. Pertanyaan saya, apakah Kementerian Pertanian memiliki pemetaan mengenai distribusi atau pengadaan Alsintan ini untuk daerah-daerah sesuai dengan kontes karakteristik wilayahnya Pak. Karena yang saya lihat pengadaan ini sifatnya generic Pak. Nah kalau boleh kedepan mungkin disesuaikan dengan konteksnya.

Yang berikut soal RIPH. Aturan Permentan Nomor 39 tahun 2019 kini sudah direvisi menjadi aturan Permentan Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu yang membedakan itu adalah syarat didalamnya. Jika dulu ada syarat yang namanya cargo manifest, hari ini tidak ada lagi. Jika dulu ada syarat namanya bill of landing, hari ini tidak ada lagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan, kenapa ini tidak ada, apa pertimbangannya. Karena kalau menurut saya, ini perlu ada Pak. Sehingga asal usulnya, proses barangnya ini ada, siapa yang

membawahnya. Kalau seandainya barang ini suatu ketika misalnya rusak dan sebagainya, ada yang bertanggungjawab. Nah ini kenapa kok sekarang tidak ada Pak.

Terakhir Hortikultura. Program hortikultura terintegrasi Pak. Disitu saya baca jeruk menjadi salah satu prioritas. Konkrit saja Pak. Di NTT itu ada jeruk keprok dari itu berdasarkan kajian itu jeruk bahkan cocok karakternya menjadi jeruk ekspor Pak. Kira-kira itu Pak. Nah kira-kira bisa tidak Pak kami dibantu soal itu Pak, dan supaya lebih menggeliatlah.

Nah satu lagi paradigma pandemi ini mestinya memutar paradigma kita arah dan orientasi lebih bertumpu kepada produktivitas dalam negeri Pak. Karena itu saya ingin melihat kedepan impor pangan ataupun produk pertanian kita harusnya menurun Pak. Kenapa? Karena memang hari ini negara-negara di dunia melakukan politik autarkis, self help, memenuhi kebutuhan sendiri. Nah kita lakukan apa didalam. Yang ingin saya dengar itu adalah ayo, mari kita siapkan lahan, tanam bawang putih sekian areal, kita siapkan lagi lahan untuk menanam ini. Itu yang saya inginkan Pak, yang ingin saya dengarkan dari Kementerian Pertanian.

Sekian dan terima kasih.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Selanjutnya Pak Dokter Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya dibatasi 1 menit tidak?

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota dan Sekjen dan Dirjen Kementerian Pertanian.

Saya sederhana saja Pak Ketua, tidak banyak-banyak. Pertama, saya mengingatkan bahwa seharusnya kita ini sudah masuk pada periode untuk melakukan Penas dan itu sebenarnya sudah selesai, karena Covid sehingga penasnya ditiadakan pada tahun ini. Saya minta supaya Penas ini dimunculkan kembali untuk Tahun 2021. Penas ini adalah bagian daripada konsolidasi dari penyuluh, petani, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk juga Anggota DPR. Jadi saya minta ini dianggarkan kembali.

Yang kedua, saya melihat dari laporan Sekjen itu Dirjen Horti hanya serapannya baru 21 koma sekian persen ya. Jadi masih rendah dibandingkan dengan Dirjen-Dirjen yang lain. Ini saya minta supaya Dirjen Horti ini menggesah program-programnya dan segera direalisasikan karena kita ini

sudah dimarah-marahin oleh Presiden Pak Dirjen. Kemarin video clip-nya beredar, Presiden marah-marah. Presiden Jokowi maksudnya ya. Nah ini sebenarnya kalau kita mengaca kepada kemarahan Presiden itu, ini semua diruangan ini kita termasuk yang dimarahin. Termasuk Sekjen, termasuk Dirjen, dan termasuk juga Anggota Komisi IV sebenarnya. Jadi saya minta supaya semua yang terkait dengan agenda-agenda yang berkaitan dengan pencegahan Covid, kemudian pemulihan ekonomi dan lain sebagainya pada masa pandemi ini segera direalisasikan. Jadi kita malu sama rakyat. 267 juta penduduk Indonesia menanti kehadiran kita untuk supaya sehat dan pulih ekonominya. Dan saya minta di beberapa tempat, rapat dengan Banggar supaya ini yang terkait dengan imbas konflik ini anggarannya diperbesar. Nah ini harus menjadi tekanan kita.

Nah kemudian yang ketiga yang terakhir terkait dengan RIPH. Ini ada 2 jenis RIPH ya, ada bawang Bombay dan ada bawang putih. Bawang Bombay ini ada 32 perusahaan tanpa RIPH. Kemudian bawang putih dari 33 perusahaan tanpa RIPH, dan gambarnya disini baru kali ini saya melihat gambarnya seram, ada gambar tengkorak. Ini menandakan sudah sampai pada derajat bahaya, kecuali kalau gambarnya itu adalah orang masih marah tapi ini gambarnya sudah tengkorak dan ada tanda silang. Ini kita membaca simbol bahwa ini sudah sampai pada tingkat bahaya. Saya ingin tahu seperti apa sih tingkat bahayanya ini. Apakah terjadi diskriminatif terhadap RIPH ini? Apakah hanya orang-orang yang hanya dekat dengan kekuasaan saja dimudahkan sementara yang jauh tidak. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji begini. Kalau memang ini adalah pelanggaran maka ini harus ditindak. Beberapa waktu lalu di Komisi IV ini juga sudah heboh tentang ini. Tapi tidak ada kejelasannya. Ada perusahaan-perusahaan yang tanpa ijin mendapatkan ijin impor. Nah ini kan tentu terkait dengan Kementerian Perdagangan. Saya minta supaya juga Kementerian ini berkoordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan.

Terakhir, terkait dengan soal Alsintan. Saya minta, Alsintan ini sebenarnya sudah dikatakan hampir meratahah di kelompok-kelompok tani Pak Dirjen, tetapi dalam perjalanannya Alsintan ini mengalami kerusakan di beberapa bagian. Nah ini saya melihat supaya ini ada bengkel yang berjalan diefektifkan. Pernah dulu ada bengkel berjalan, tetapi ini tidak efektif. Nah saya minta juga supaya dihidupkan lagi terakhir dengan bengkel ini dan kemudian terakhir saya minta supaya Alsintan ini standarisasinya jelas sesuai dengan SNI supaya barang itu sampai di masyarakat itu tidak dalam kondisi rusak, dan juga tidak sekali pakai atau dua kali pakai rusak. Saya langsung meninjau alat-alat itu, ada yang mesinnya pecah, ada yang alas roda putarnya (trecknya) itu pecah karetnya itu. Dan ini sudah tidak dipakai lagi karena petani pun juga dia akan mengatakan ini mahal sementara barang baru dipakai sekali atau dua kali.

Demikian Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'allaikumsalam.

Teungku Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Bapak/Ibu Anggota Komisi IV,
Pak Sekjen dan jajarannya yang kami hormati.

Hari ini Pak Sekjen luar biasa rapat kita, karena hampir seluruh Pimpinan kami ikut mendampingi Anggota Pak. Ini bedanya kalau dengan Kementerian Pertanian. Biasanya hanya Pak Sudin yang ikut memimpin rapat. Ini luar biasa, walaupun diawal tadi typical Ketua kami ini Pak memang agak tegang sedikit, Cuma tidak pernah niat Pak Sudin tidak baik untuk Kementerian Pertanian. Ini kita harus apresiasi Pak. Ada lagi Pimpinan Pak Hasan yang cara memimpinnya *soft*. Kalau Ketua saya Pak Dedi macam sejarawan Pak. Beliau pandai berpuisi. Memang sudah lengkap. Makanya Pak Sekjen setelah mendengar tadi paparan, saya setuju dengan Pak Ketua. Hendaknya kedepan mulai saat inilah jangan ada *copy-paste* lagi Pak. Sebab begini Pak, tadi salah satu, salah pengetikanlah, salah angkalah karena *copy-paste* ini membuat ini nanti tidak jelas. Saya tidak seperti Pak Ichsan yang tahu data Pak, sampai koma tahu. Kalau Mbak Kiki walaupun sering berbeda pendapat dengan Pak Sudin sama saya kurang percaya juga Pak.

Jadinya saya masuk saja Pak Pimpinan ke Karantina. Di Karantina ini Pak kalau saya pikir memang perlu Pak. Perlu kalau bisa tambahkan lagi Pak. Sebab tadi kata Bu Kiki disin kunci masalah ekspor, apa semua. Cuma tadi setelah pemaparan Pak Kepala Badan Karantina Pak, hanya menjelaskan target-target yang saya lihat. Target-target kegiatan nasional ini saya kira kurang jelas Pak Sekjen. Sasaran nasionalnya apa? Yang saya maksud, apa jenis penyakit yang harus dicegah dan ditangkal yang masuk ke Indonesia. Karena hama penyakit produksi pangan harus wajib kita cegah. Hama penyakit sawit, karena sawit adalah andalan devisa negara kita. Jadinya macam penyakit mulut, kuku atau jenis-jenis penyakit lainnya. Apa salahnya teman-teman khususnya kita yang di Banggar Pak Ansilema ini ke Pak Djamil ini perlu karena saya hubungan bagus dengan Pak Djamil tidak Pak, perlu. Cuma kinerja Pak Djamil ini pun, atau Pak Djamil ini Pak Sekjen pura-pura tidak paham padahal Beliau ini paham dengan tugasnya.

Selanjutnya ada pengawasan, dari negara mana ini yang harus sangat ketat. Komoditi apa yang diperketat. Tadi dalam pembukaan Pak Ketua ada penyakit apa yang masuk sehingga anak Ibu Kiki pun sudah tidak mau makan jamur lagi.

Selanjutnya Pak Ketua, di Balai Karantina ini selalu mengekspose akselerasi ekspor 300%. Namun datanya selalu kita pertanyakan. Ekspor pertanian masih dominan sawit Pak. Bukan dari komoditi yang kita ceremony saat kenyataan ekspor kita justru turun. Impor semakin meningkat. Apakah kegiatan ceremony-ceremony tersebut perlu kita lakukan untuk program selanjutnya. Sudah itu target ekspor ada 300%, seharusnya diikuti dengan target PNBK ekspor meningkat 2 kali sampai 3 kali. Kenyataan PNBK karantina tidak meningkat secara signifikan. Jadi mana yang benar, ini yang mau saya pertanyakan. Ekspor yang tidak benar atau PNBK-nya yang tidak disetor ke kas negara.

Selanjutnya tugas pokok karantina adalah cegah tangkal. Penyakit dan merebaknya penyakit di Indonesia adalah bukti tidak efektifnya kinerja dari karantina. Kasus merebaknya penyakit babi dan lostnya jamur enoki impor yang berbakteri adalah bukti lolosnya impor yang tidak ketat secara ketat diawasi di Karantina. Pemerintah akan melakukan re-organisasi katanya, perampangan organisasi, waktunya sudah sangat pendek. Bagaimana konsep perampangan. Organisasi yang Saudara katakan atau akan lakukan, berapa UPT yang akan dilikuidasi, berapa jabatan struktural yang akan dihapuskan. Mohon dijawab nantinya dengan singkat. Apakah program 2021 sudah diperhitungkan kemungkinan perampangan organisasi ini.

Yang terakhir untuk karantina, mohon ijin Pimpinan. Sikap karantina masalah kebijakan operasional karantina terhadap tidak harmoninya antar RIPH bawang putih dengan ijin impor tanpa RIPH, apakah karantina hanya tugas mencatat tanpa ada sanksi untuk ditindaklanjuti, apakah tidak ada koordinasi antara yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Kiki tadi. Padahal antara Karantina dan Horti adalah satu Kementerian.

Selanjutnya ke Dirjen TP. Pak Dirjen TP, memformulasikan target-target kegiatan yang apa dikatakan oleh teman-teman yang lalu tadi untuk 2021 dengan anggaran yang lebih rendah tapi sasaran produksinya meningkat. Ini yang perlu kami pertanyakan kembali. Apakah kegiatan pengembangan kedelai masih relevan apa yang seperti yang ditanyakan Pak Ichsan tadi, karena sudah lebih 20 tahun program swasembada kedelai ini tidak pernah tercapai. Tidakkah dipikirkan upaya yang lain seperti membagikan benih-benih kepada masyarakat, kepada petani atau pun digeser ke yang dibidang Kiki tadi, ke jagung. Sebab ada kaitan ini Pak Dirjen TP, mungkin didalam penutupan nanti. Sesudah itu jangan mempilah target swasembada Pak. Swasembada jagung konsumsi industri pakan. Kenyataannya di pasar tidak ada ini dipisahkan. Apa target jagung 2021 tetap obsesinya untuk swasembada, mengapa volume kegiatan pengembangan jagung justru semakin menurun. Hendaknya Pak Sekjen mana ada anggaran-anggaran, saya kira beberapa teman sudah memaparkan tadi ke jagung ini untuk kita tambah. Setiap tahun kita membagi-bagi benih unggul bermutu, jutaan hektar tetapi produktivitas nasional rata-rata tidak meningkat secara signifikan. Apa yang salah dalam program benih. Dimana ada INPARI, INPAGO hasil Litbang. Dimana Litbang kita Pak Sekjen. Petani tidak menyukai kenapa? Karena ada bibit yang kita pakan sementara anggaran di

Litbang selalu diperbesar apa pun si Litbang ini. Hendaknya kedepan ini saya kira Litbang ini perlu kita koreksi nanti kedepannya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Pak Salim, hanya mengingatkan. Kalau bicara Litbang itu waktu besok bukan hari ini.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Betul Pak Ketua. Cuma untuk hari ini, kan ada Pak Sekjen Pak Ketua. Sekjennya yang bertanggungjawab semua Ketua. Sama seperti kami, nasib kami tergantung kepada Pimpinan semua.

Terakhir untuk impor kacang tanah semakin meningkat program. Apa yang untuk dilakukan oleh Kementerian, apakah kegiatan yang selama ini dilakukan memadai dengan target nasional atau hanya sekedar kegiatan.

Bapak Dirjen TP yang kami hormati,

Terakhir Pak, khusus untuk Kabupaten kami pesanan Pak Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Kabupaten Aceh Tenggara adalah penghasil produk jagung yang terbesar di Provinsi Aceh. Hendaknya program untuk 2021 Bapak mentargetkan ada suatu pilot project untuk jagung di Kabupaten Aceh Tenggara. Ini harapan kami Pak, termasuk kepada Pak Dirjen Horti ini teman baik saya Ketua. Jadinya kalau teman baik saya tidak saya tanggap-tanggapi lagi termasuk di Dirjen PSP semua saya anggap mantap.

Terima kasih Pak Ketua.

Lebih kurang saya mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'allakumsalam.

Selangit pokoknya. Semoga sesuai dengan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

Interupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Oh ya silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mumpung saya ingat Pak, tadi ada yang lupa. Tadi menindaklanjuti itu juga tadi. Beberapa hari yang lalu Bapak Menteri menyampaikan terkait surplus di Sumatera Selatan katanya. Jangan hanya di Sumatera Selatan Pak, coba saya minta Bapak-Bapak memberikan kami data yang surplus itu dimana saja Pak. Jangan teriaknya surplus tidak tahunya tidak ada. Nah itu pertama.

Terus kedua, kalau memang bicara surplus ini. Kemarin Bapak-Bapak lihat di salah satu TV bahwa Bapak Menteri, Gubernur Sumsel dan salah satu Bupati di Kabupaten itu hanya bicara satu wilayah. Saya ingatkan sekali lagi kepada Kementerian untuk memberikan pemerataan terhadap sector pertanian. Tidak hanya, oh yak arena Bupatinya warnanya sama. Ingat Pak, kami di Komisi IV warnanya beda tetapi visi dan misinya satu Pak untuk kesejahteraan petani.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Sebelum ke virtual, kami persilakan Kang Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik. *Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Sampurasun.*

Intinya begini, kita harus menyadari sepenuhnya pola pengelolaan pertanian sekarang itu sangat berbeda dengan dulu. Tingkat kesadaran birokrasi dari mulai Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, jujur ya tidak fokus pada pertanian. Mereka senang pertanian itu kalau ada panen, mercusuar padahal nanamnya tidak ikut. Tapi kalau giliran padinya gagal, kedelainya gagal tidak pernah ditengok. Kalau berhasil cepat di sakat dan diklaim. Ini fakta. Semua tingkatan birokrasilah seperti itu hari ini. Saya beda dong, asli petani kalau saya.

Nah maksud saya, ini harus segera ditata dulu cara berpikir dari mulai Kementerian Pertanian sampai Kepala Desa. Kepala Desanya senang ngurus pertanian punya dana desa. Kenapa? tidak nguntungin. Camat juga tidak senang ngurus pertanian. Dia lebih senang pembebasan lahan pertanian karena dapatnya (suara tidak jelas). Ya berpikir pertanian itu tidak ada,

kecuali Komisi IV (ini mumpung lagi masih benar nih). Mumpung masih benar, mari kita bersama-sama membenahi pertanian. Saya takut 2021 mulai tidak benar juga nih Komisi IV ini. Mbak Kiki senyum nih karena 2022, 2023 sudah mulai tidak benar soalnya. Ini tata dulu, framenya harus sama. Kementerian Pertanian itu terintegrasi dengan Bupati, Walikota. Apalagi kalau Gubernur Pak, makin jauh. Gubernur enggak pernah ngurusin nanam padi, makin jauh deh. Ini harus terintegrasi dulu.

Nah kuncinya adalah didalamnya adalah penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian sekarang beda dengan dulu lagi. Rata-rata tidak menguasai bidang pertanian. Ke sawah pun kadang-kadang jarang, apalagi finger pin. Kan sekarang tuh pegawai itu finger pin tuh tunjangan kinerja daerahnya. Ya kalau finger pin ya mereka finger pin di kantor, nanti mengarang bikin hari ini bikin perencanaan ini-ini-ini dapat tunjangan kerja daerah. Dia tidak ngurus lagi juga. Nah kita kalau mau jujur seluruh hasil pertanian ini hasil kreasinya para petani, tidak pakai kita pun tetap bisa nanam dan panen. Ini kalau kita mau jujur atau mau bohong. Untuk itu maka menurut saya, dibuatlah peta pengelolaan produksi yang memadai.

Nah pengembangan pertanian menurut saya sudah semestinya juga bukan domain kita. Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi yang banyak menghasilkan produk untuk kepentingan pertanian rata-rata tidak punya duit untuk penelitian. Daripada kita penelitian oleh birokrat susah Pak, tidak netral. Sudahlah misalnya, dulu kan kita punya IPB. Ya IPB dikasih pekerjaan untuk apa, UGM dikasih pekerjaan apa, Perguruan Tinggi dikasih apa. Kasih biaya oleh Kementerian Pertanian. Sudah jadi calon bibit itu nanti tinggal proyek kita adalah memperbanyak. Sehingga jangan sampai kita punya bibit unggul tapi kita bikin pengadaan bibit. Kan jadi aneh. Nah ini segera kita didesain, yang seperti ini tidak bisa Pak lahir dari yang seperti ini. Dari forum-forum kecil kita diskusi, kita bikin orientasi, masing-masing dibikin dalam kelompok-kelompok, dibuat perencanaan. Dari yang kayak gini tidak bisa melahirkan apa-apa, kecuali jenuh dari pagi sampai sore. Nah ini segera dibuat kelompoknya per Dirjen, per kelompok. Ini spesialisasi Anggota DPR ini dimana, dibikin spesialisasinya diarahkan kesana. Kemudian kita mulai memetakan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi mana, ini kedelai, ini jagung, ini padi, ini kacang tanah, semua dipetakan sehingga kita lahir seluruh produktivitas bagi kepentingan publik. Ini penting, karena bagi saya angka 18 Triliun ini gede banget, dan ini bisa suatu yang besar. Itu yang kedua.

Yang ketiga, daripada ini Anggota DPR itu tiap hari pidatonya 1 orang 15 menit disini. Kan Bapak tiap hari loh Pak, ngedengerin kita. Kalau saya sudah stress Pak. Nah ini lebih baik diarahkan Anggota DPR-nya, mulai diarahkan pada wilayah. Dibikinlah peta produksi. Wilayah Provinsi ini harus menghasilkan padi sekian, kedelai sekian, ini sekian, pendampingnya Anggota DPR ini, nanti mengawasi, kemudian memberikan edukasi bagi masyarakat. Turun sampai ke bawah itu daripada kita kunjungan-kunjungan normative itu sampai nanti kalau kemudian gagal, kegagalan kita bersama. Kan kita tahu produksi daripada ceramah terus disini. Ini saya kasihan saya lihat mukanya, ini nanti gulanya naik disini.

Nah ini dibuat seperti itu dipetakan sehingga nanti semua terlibat aktif, kemudian semuanya merasa bertanggungjawab. Kan tujuan kita bukan membenarkan dan menyalahkan karena kebetulan saja kan fungsinya di eksekutif ya kita kerjanya mengevaluasi, memarahi, menyalahkan. Tapi kan yang menikmati kebanyakan Bapak. Ya kita mah mungkin menikmati, mungkin tidak tergantung Pak Ketua. Nah ini arahan-arahan saya biar semuanya produktif. Nih Mbak ini kan Doktor dibidangnya. Kalau ceramahin Bapak terus, sudahlah suruh di Cianjur, Bogor sana, kasih areal biar terbukti ucapannya benar tidak pemimpi. Nah saya inginnya seperti itu dan itu angka-angka belakangan saja dibuatnya kisi-kisi dari sekarang, dibuat informal kita bicara, membuat rencana strategis sehingga buktikan.

Nah terakhir, tetap saya amanat. Ini amanat dari konstituen Bapak ya boleh saya menyampaikan. Itu kalau kunjungan ke daerah jangan terlalu banyak Pak. Itu kunjungan panjang gitu Pak. Jadi yang dipanennya potongnya Cuma 10 potong Pak, yang antrinya panjang. Jadi panennya Cuma, ya namanya juga panen Pejabat kan pura-pura saja, gitu-gitu, kepuk-kepuk ya paling dapat 3 kilo. Tapi rombongan Pejabatnya makannya habis ½ kuintal. Menurut saya ini jamannya. Saya orang efektif Pak dari tidak perlu terlalu formal. Ini kan jaman efektif, efisien. Ini saya boleh saran. Kemudian kalau disawah jangan pakai tenda Pak. Sawah, tengah sawah pakai tenda. Itu garangannya jadi rusak. Ya sudah, tidak usah pakai tenda, datang, nanam sudah lagi. Kan yang penting foto sama wartawannya. Menurut saya cukuplah. Jadi tidak cocok itu ditengah sawah dipasang tendah. Artinya gini loh, pertanian ya kloter pertanian Pak. Itu pakainya pakai logika pertanian. Saran saya. Jangan terlalu panjang juga. Itu kalau sekali Pejabat sekali datang ke sawah Pak, apalagi proyek penanaman itu habis keinjak Pak. Jadi rusak. Nanti dibikin efektif. Ini cara kita baik. Kita juga pasti mendampingi. Ini kita bagaimana menata pertanian ini dengan baik. Jadi saran saya itu sajalah. Nanti angka segala macam nanti kita sesuaikan. Saya paling utama amanat Anggota DPR ini pintar-pintar dan kritis. Tapi kekritisannya dan kepintarannya kalau disini tidak produktif Pak. Suruh dia kesana, suruh dia kesini, suruh dia kesono, suruh dia kesana. Pak Salim Fakhry daripada pidato disini, Aceh begini suruh ke Aceh. Kasih area yang dibina oleh Pak Salim Fakhry. Berapa hektar, evaluasi, pendampingnya siapa, anggarannya berapa, dia berdiri disitu produksi nanti ikut panen. Kita malu Pak kalau kita diajak panen saja, nanam saja kita tidak ikut panen, kan tidak lucu. Saya ingin kita nanam November, panen Bulan Maret kita bangga karena panennya adalah hasil kita bersama. Jadi yang penting kita semua bahagia, karena hidup yang baik adalah kita sejahtera diatas kebahagiaan orang lain.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Sampurasun.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'alaikum salam.

Bapak, dan Ibu sekalian.

Ya kita hargai yang virtual karena menunggu diteras rumahnya kepanasan rupanya.

Mbah Sutrisno kami persilakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Sekjen, para Dirjen, Pak Kepala Badan Karantina.

Langsung saja bahwa pencapaian kebutuhan pangan, kecukupan pangan, kedaulatan pangan adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Dan porsi tanggungjawab keberhasilan itu ada di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu saya tentunya dengan teman-teman Komisi IV sangat concern mengawal bagaimana program, bagaimana perencanaan, bagaimana hasil dan mengukurnya tentunya. Mengukurnya dengan capaiannya, Capaian diukur dengan kebutuhan pangan. Nah ini kesulitan kita adalah, pada saat mengukur dengan kebutuhan pangan karena tidak ada neraca pangannya. Oleh karena itu dokumen yang sangat penting ini perlu dilengkapi dengan neraca pangannya agar kita bisa mengukur bagaimana pencapaian ... sampai kapan, tahun berapa bisa dicapai.

Disisi lain di era otonomi daerah ini keberhasilan pencapaian kecukupan pangan, kedaulatan pangan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan daerah. Oleh karena itu saran saya adalah Pak Sekjen sudah mulai harus mengingatkan, memperkuat hubungan atau integritas penyusunan program antara pusat dengan daerah. Bilamana perlu dengan konsep gotong-royong. Apa yang dilakukan oleh Pusat, apa yang dilakukan oleh Provinsi, apa yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. *Insha Allah* manakala ini dijalankan ... (suara tidak jelas).

Yang kedua, permasalahan petani khususnya pada petani padi. Saat ini khususnya di wilayah Jawa Barat dan khususnya di wilayah Dapil saya Dapil IX, para pengelola sawah ini sudah kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Sehingga diharapkan dengan pola mekanisasi dari pola pengolahan sampai jumlah pola pada pasca panen. Sampai semua 1 Gapoktan harus menunggu sampai 1 bulan bisa menyelesaikan sampai musim tanam karena menunggu alat pertaniannya. Saran saya kepada Dirjen PSP khususnya untuk Dapil saya, mungkin juga Jawa Barat karena tidak banyak perkebunan, alat-alat pertanian traktor roda 4 ini bisa diganti dengan hand tracktor supaya kelompok-kelompok ini juga bisa merata mendapatkan alat dan bisa segera bersama-sama mengolah

Yang kedua kepada Dirjen TP pasca panen. Lahan kita itu kecil-kecil, banyak pematang sehingga kurang tepat manakala pakai Saran saya pula pakai sajalah seperti Arjuna Ireng yang kecil-kecil itu supaya bisa merata.

Kemudian yang ketiga, Dirjen PSP. Asuransi pertanian. Dari tahun ke tahun dianggarkan 1 juta hektar. Anggarannya sampai 150 Miliar lebih. Yang diserap dilapangan adalah para petani ini tidak tahu, kurang paham adanya pertanian. Bahkan saya dapat penjelasan juga dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian tidak menganggarkan, tidak minta anggaran asuransi karena Jugnisnya katanya terlambat. Nah oleh karena itu musim tanam di Jawa Barat khususnya bulan November-Desember itu bisa menyemai bibit. Oleh karena itu percepatan jugnis, percepatan sosialisasi sangat diperlukan. Jangan kemudian asuransi habis, pasti habis anggaran itu tapi tidak sampai kepada rakyat petani.

Kemudian KUR. KUR ini salah satu untuk mengatasi biaya ekonomi tinggi. Di lapangan ini sangat sulit nih Pak Dirjen. Saya hampir setiap saat mengantar rakyat petani ke Bank. Permasalahannya adalah jumlah kreditnya masih dibawah 50 Juta tetapi sulit mendapatkan karena harus ada asset tetap sebagai jaminan. Jadi mohon untuk diperlunak, dipermudah. Jangan tergantung karena masyarakat kecil itu tidak punya sertifikat, yang punya SPPT. Dengan SPPT tentunya juga bisa sebagai jaminan tambahan.

Kemudian Dirjen Horti, bawang putih. Saya pernah menyampaikan untuk Majalengka tidak ada lahan yang tepat untuk menanam bawang putih. Pertanyaan saya adalah kenapa di Tahun Anggaran 2020 itu ada 3540 hektar tanam bawang putih di Majalengka. Pertanyaannya, ini direalisasikan tidak dan ini usulan siapa? Tidak akan mungkin bisa ditanam di Majalengka kalau belum supaya jangan direalisasikan.

Kemudian bawang merah. Bawang merah Pak Dirjen, sebaiknya kalau akan menggunakan ya laksanakan saja oleh Balitbang. Jangan dibebankan kepada petani-petani di Jawa Barat itu nanam bawangnya pasca musim tanam ke-2 mengejar waktu adanya air sehingga lebih tepat manakala menggunakan umbi. Kalau menggunakan biji ini harus lama, harus juga telaten agar dimanfaatkan, agar cepat produksi supaya pakai umbi saja.

Kemudian yang berikutnya Pak Dirjen, amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 bahwa perlindungan, kemudian kepada petani pemberdayaan petani yaitu bagaimana petani dilindungi manakala terjadi gejolak harga. Sampai hari ini di Tahun Anggaran 2021 pun belum ada program untuk bagaimana membantu petani pada saat terjadi gejolak harga. Oleh karena itu mohon mulai dipikirkan bagaimana petani dilindungi manakala terjadi gejolak harga.

Terakhir Pak Sekjen, program penanganan Covid. Mencapai anggaran 2,36 Miliar. Diserap oleh Dirjen Tanaman Pangan 1,07 Triliun, kemudian Dirjen PSP 975 Miliar, Badan Ketahanan Pangan 316 Miliar, jumlahnya 2,3 Triliun dari 2,648 Triliun. Sangat besar. Kami tidak mendengar gaungnya tuh disebarkan dimana. Oleh karena itu hal-hal yang demikian seyogyanya

dikomunikasikan dengan Dewan kami ini punya tanggungjawab. Fungsi Dewan adalah melakukan pengawasan. Mohon kedepan karena memasuki pemulihan ekonomi, program-program yang semacam itu supaya dikomunikasikan dengan Anggota Dewan.

Terima kasih Pak Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih.

Selanjutnya Daniel Johan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat sore.

Salam hormat buat Pimpinan segenap Anggota,
Hormat buat Pak Sekjen, Irjen dan seluruh jajaran.

Yang pertama adalah ingin saya sampaikan bahwa potensi krisis pangan itu sangat besar kedepan. Nah tetapi dari data dari Kementerian Pertanian itu semuanya seakan-akan baik sehingga saya agak khawatir. Ada 2 hal yang sederhana misalkan nih, turunnya anggaran 4 Triliun itu sudah dihitung belum? Berapa pengaruh terhadap produksi.

Yang kedua, turunnya subsidi pupuk diseluruh daerah bahkan dari 100% IRDKK yang disampaikan hanya 30% yang sampai pupuk untuk petani. Jadi 70% itu tidak terpenuhi, berapa tingkat produksi yang akan hilang dengan berkurangnya pupuk subsidi untuk petani. Dari 2 hal ini saja kita sudah sangat khawatir, karena itu saya sempat sampaikan. Kalau sampai krisis pangan itu terjadi rakyat itu kesulitan untuk makan. Yang paling bertanggungjawab adalah 2 pihak. Yang pertama adalah Menkeu. Karena Menkeu-nya payah tidak punya visi. Yang kedua Pak Mentan, kalau dari anggaran yang ada tidak tepat sasaran dan tidak difokuskan untuk mengamankan tingkat produksi. Karena itu ada beberapa hal yang penting.

Yang pertama adalah Dirjen PSP harus benar-benar memikirkan bagaimana mengatasi berkurangnya pupuk subsidi ini hingga 70% dan harus menghitung pengurangan produksi dari kebijakan ini. Yang kedua, Dirjen Pangan harus benar-benar memanfaatkan lahan yang ada. Benar-benar menjadi produktif termasuk waktu kunjungan ke daerah banyak petani poktan-poktan itu mengeluhkan hama semakin besar dan rata-rata selama 10 tahun terakhir ini rata-rata 400.000 hektar itu puso karena serangan hama sehingga dari lahan yang ada, tidak usah mikiran buat lahan baru deh. Kalau dalam Covid belum tentu berhasil. Kita efektifkan dari lahan yang ada, bibit pastikan

unggul, dipastikan tepat sasaran, tidak sehingga bisa menghasilkan produksi, seperti yang 500.000 yang puso. Itu kalau 2 ton saja itu sudah 800.000 gabah. Itu nilainya 3,2 Triliun petani itu hilang pendapatan. Nah kalau kita pakai rata-rata produksi 400.000 hektar kalau 5 ton itu sudah 2 juta gabah. Itu sama saja 8 Triliun Rupiah petani kehilangan pendapatannya.

Nah yang kedua, saya ingin nanya karantina.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ketiga Mas Daniel. Sudah ketiga.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya terakhir, sesuai dengan amanat Undang-Undang itu bagaimana konsolidasi karantina, apakah sudah ada pembicaraan agar Badan Karantina dikonsolidasikan dan dijadikan 1 pintu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Sekali lagi terima kasih.

Salam sejahtera.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih Mas Daniel.

Mas Bagus Adhi.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Siap Pimpinan.

Pimpinan Komisi IV, dan Anggota yang saya hormati.
Pak Sekjen dan Pak Dirjen beserta jajaran yang saya hormati.

Seperti apa yang disampaikan barusan oleh Pak Daniel Johan, saya menekankan kalau kita sekarang pelaksanaan pertanian ini dengan berbasis teknologi maka kita tidak akan ribut-ribut seperti sekarang. Nah apalagi data yang saya dapat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi itu kita sekarang Indonesia diurutan Nomor 85. Di Tahun 2018 kita diurutan 85, di 2019 kita juga urutan 85. Dan dimana alokasi dananya pun kalau di Luar Negeri itu kebanyakan dilakukan oleh swasta. Dan sekarang di Indonesia itu didominasi oleh anggaran APBN kita yang sangat kecil dan didominasi di angka 85%. Nah disini saya pesan kepada Pak Sekjen, mohon diingatkan kepada Pak Menteri, marilah mulai sekarang melalui Covid ini kita diberikan banyak pembelajaran. Dan yang harus kita lakukan mulailah sekarang, bagaimana bawang putih, bagaimana cabe kita dan sebagainya

termasuk bagaimana Alsintan kita, teknologi kita bagaimana. Nah kalau kita sudah menjurus kepada teknologi dan analisis ini maka kita rapat-rapat di Komisi IV ini kita sudah bicara data. Kita bicara data, tadi Pak Daniel dengan krisis pangan ini kemungkinan akan ada

Nah kalau kita sudah punya data yang komprehensif ini bisa kita sampaikan, dan kita bahas secara bersama-sama. Dan yang terjadi adalah terhambatnya dan sedikitnya kajian tersebut. Di Bali pun sekarang terjadi hal yang sama. Nah karena di anggaran renovasi maka ini akan terjadi pengurangan pendapatan hasil panen yang rata-rata sebelumnya adalah di angka 18.000 ton di Kabupaten Bali, yang kemudian sekarang dengan adanya penundaan tersebut akan terjadi kurang lebih penurunan-penurunan menjaga dari 18.000 itu menjadi 500.000 ton. Nah ini yang perlu diperhatikan, bagaimana trik kita. Kita ingin anggaran ini bisa peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ternyata di satu Kabupaten saja menurut data yang saya baca yaitu akan terjadi penurunan. Nah ini bagaimana kita menyikapi itu. Dan itu Tahun 2018 kemarin sampai 2019 itu ada embung yang di Karangasem yang sampai saat ini ditinjau oleh staf Dirjen yang kemudian sampai saat ini belum diperbaiki, padahal kalau embung itu diperbaiki maka akan terjadi peningkatan hasil pertanian di sana.

Nah begitu juga di Hortikultura. Nah di Horti, nah ini kita harus betul-betul concern Pak Dirjen terkait dengan pengembangan kawasan cabe, bawang putih, tanaman obat. Jadi yang sudah tentunya mengarah kepada dari sisi teknologi tersebut. Jangan hanya mengejar hanya mengejar program-program evaluasinya belum mantap. Nah yang tadi dilaksanakan itu konkritnya kan melaksanakan akan lebih sempurnanya program itu bilamana dilengkapi dengan program pasca panen. Nah jadi cabe kita, bagaimana tomat kita (suara tidak jelas).

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Sarannya Mas Adhi?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Perlu digerakan sehingga muncul ekonomi-ekonomi baru di masyarakat (suara tidak jelas).

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Saran, intensifikasi atau mekanisasi.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Tanggal 17 April terdapat 52.383 karyawan yang dirumahkan, yang di PHK 100 juta. Nah ini perlu. Ya mereka kembali ke pertanian sekarang. Nah jadi bagaimana (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Pak Bagus Adhi cukup sarannya ya.

Ya terima kasih.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Dan yang terakhir dari negara ini adalah KPK Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Yang terakhir Pak Syafrudin, NTB. Tuan guru. Sudah tidak ada.

Para Bapak/Ibu sekalian, Pak Sekjen dan Pak Dirjen,

Sebelum disimpulkan oleh Pak Ketua. Saya ingin mengajak kepada semua Eselon I ini ada inovasi kebijakan yang luar biasa, satu-satu saja Pak. Sehingga saran dan pendapat banyak teman-teman ini selaku fungsi pengawasan kita mudah. Contoh suatu misal, persoalan. Sebenarnya kan sebagaimana saran teman, tidak ada Menteri petani ini sudah bisa bercocok tanam kan itu kan. Bagaimana kita mampu mendorong para petani ini mampu meregenerasi kepada anaknya. Ini penting hari ini, sebagaimana target Kementan ini sebagaimana visi Pak Presiden, mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi social. Sehingga saya minta Pak Sekjen ini mensikronkan di antara para Dirjen ini ada satu inovasi kebijakan yang luar biasa, tidak biasa-biasa. Sehingga para petani ini yang pada posisi hari ini lebih banyak penggarapnya daripada pemiliknya. Ada perubahan yang mendasar, bagaimana generasi milenial ini bangga menjadi petani sebagai generasi penerus pemilik atau penggarap. Karena pemiliknya satu, penggarapnya seribu. Nah perbandingan inilah yang sangat tidak wajar di Republik yang kita cintai. Yang kedua ada momentum bagus. Saya manusia yang menangis tatkala ada anak bangsa yang saat pagi dini hari berada di bandara, ingin mencari sesuap nasi ke Luar Negeri. Nah ini momentumnya Covid ini sedang kembali di bumi nusantaranya, di bumi pertiwinya. Nah bagaimana mereka-mereka itu tidak kembali lagi ke Hongkong, tidak kembali ke Saudi dan seterusnya. Pilihannya adalah bangga dengan petani dan cukup membiayai makan keluarganya dan menyekolahkan anaknya dengan bertani. Coba Bapak Dirjen ini satu-satu saya ingin ada demplotlah. Satu demplot di masing-masing Dapil ini dari satu-satu dari masing-masing Dirjen Eselon I ini Pak Momon.

Yang kedua, sekali lagi kesimpulan yang pertama gerakan bagaimana anak bangsa generasi ini bangga menjadi petani. Yang kedua, orang Indonesia tidak kembali lagi bekerja di Luar Negeri.

Selanjutnya, yang terakhir. Setelah saya mempelajari semua ini saya ingin ada ketegasan dan kejelasan. Mau dibawa kemana ini, arah ini. Pak Sahrul Yasin Limpo ini kan Menteri yang meneruskan sebelum. Kalau Pak

Amran ini getol mekanisasi kan di pertanian. Hobinya Alsintan terus digerakan. Yang ini mau kemana. Pak Sahrul Yasin Limpo ini mau diajak kemana oleh para Dirjen ini. Pak Momon, mau intensifikasi atau ekstensifikasi. Sehingga sudah pada kualitas. Sudahlah. Indonesia hari ini saya ingin mengajak Kementan ini tidak berbicara beras saja, kan banyak. Tadi sampai disinggung, jeruk di Kampung saya, Dapil saya luar biasa. Nah sudahlah biayai bagaimana membrending ini hari ini sehingga tidak kalah pamor dengan produk Luar Negeri, contoh saya pada saat RDP Raker dengan KKP juga menyampaikan ternyata Pak salmon itu kan proteinnya lebih rendah daripada ikan di Indonesia tuna dan tongkol itu karena belum pernah di brending. Jadi saya pun baru tahu apalagi rakyat saya.

Barangkali itulah Pak Momon hal-hal yang sudah basi, jangan dianggarkan kembali ubah, sebab kalau sudah Alsintan ini jenuh ubah kepada yang lain.

Yang paling terakhir, kalau ingin membenahi petani beras ini. Saya ingin harus ada keberanian dan nyali untuk mencoba. Kalau tidak tahun ini, tahun kapan. Dari hulu ke hilir saran teman-teman sudah banyak. Yang saya inginkan bagaimana, sekali lagi sebagaimana isu yang pernah saya lontarkan kurangi subsidi pupuk alihkan kepada subsidi harga. Itu baru ada gerakan mereformasi atau merestorasi kebijakan Kementan Republik Indonesia.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV. Selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I untuk menjawab.
Silakan.

SEKJEN KEMANTAN:

Baik.

Terima kasih.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama-tama saya mewakili teman-teman Eselon I yang hadir pada RDP ini mengucapkan terima kasih karena banyak masukan yang sangat konstruktif dan Insha Allah saran-sarannya kami tindak lanjuti. Tapi ada beberapa point nanti saya minta bantuan teman-teman Eselon I.

Terkait dengan Sekjen barangkali pertama percepatan serapan anggaran. Kami upayakan Pak Ketua. Memang saat ini dibawah 50% tapi kami terus menerus mendorong teman-teman Eselon I untuk mempercepat CPCL, pengawalan distribusi barang, dan juga yang penting percepatan proses administrasinya, mendorong percepatan pengadaan barang melalui e-

katalog termasuk juga percepatan pembayaran kontrak maupun transfer uang bantuan Pemerintah. Tapi kunci utamanya percepatan CPCL pengawalan distribusi barang, dan kita juga percepatan pengadaan barang melalui e-katalog ini kita mempercepat.

Kemudian ini yang terkait dengan upaya percepatan, banyak teman dari Komisi IV mulai dari Bu Endang, Pak Haerudin, dan lain-lain.

Nah kemudian yang perlu saya tanggapi. Tadi Pak Slamet terkait dengan lembaga khusus. Mohon ijin Pak Slamet, kami belum mendengar karena program yang kami tekankan justru penguatan cadangan pangan Pemerintah (CPPD) ini sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2015. Jadi penguatan yang di Provinsi/Kabupaten bahkan penguatan cadangan pangan ditingkat masyarakat atau Desa. Nanti kami pelajari dan besok barangkali Badan Ketahanan Pangan untuk bisa menjawab lebih lanjut.

Selanjutnya, saya minta Dirjen Horti dulu.

Silakan.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Terima kasih.

Mohon ijin Pak Ketua, Pak Sekjen.

Kami mencoba menjawab satu per satu. Yang pertama dari Bu Endang mengenai bantuan bahan pangan yang menggunakan bawang impor.

KETUA RAPAT:

Tolong dimatikan mic-nya Pak Dirjen.

Pak Slamet mau ngomong.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Hanya mau menyampaikan itu ada di Kompas. Itu ada Kompas Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Mohon ijin kami lanjutkan.

Jadi yang ada bawang local kita focus ke bawang local Bu, tapi kalau memang pas bantuan pangan tidak ada bawang local sama sekali ya kita pakai yang bawang impor itu Bu.

Terus mengenai kepundung, kami dorong untuk bisa didaftarkan segera kepundung tersebut supaya nanti bisa kita alokasikan bantuannya kesana Bu.

Terus untuk Pak Suhardi Duka terkait dengan bawang putih yang importir target wajib tanam untuk Tahun 2020 kurang lebih 8000 hektar. Jadi 5000 hektar dari APBN yang Tahun 2021 untuk bawang putih, wajib tanam Tahun 2020 ada 8000 hektar. Kalau untuk kegiatan APBN Tahun 2020 itu ada 1400 hektar untuk bawang putih. Jadi totalnya untuk Tahun 2020 ada penanaman kurang lebih sekitar 9400 hektar dimana 1400 dari APBN dan 8000 hektar dari wajib tanam bawang putih.

Terus dari Pak Darori, bahwa didalam Undang-Undang Hortikultura ada sanksi Pak kalau melanggar Undang-Undang Pasal 88 terkait dengan RIPH itu ada sanksi di Pasal 122 Pak. Jadi kami tegaskan kembali didalam forum ini bahwa yang 33 importir yang tanpa RIPH ini sudah kami laporkan ke Satgas pangan melalui laporan resmi Pak.

KETUA RAPAT:

Tolong Undang-Undangnya dikasih tahu kepada semua biar lebih tahu apa bunyinya.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pak. Saay tidak hafal persis Pak, ada di Pasal 122 itu Pak. Ada, bisa dibuka nanti di Pasal 122 Undang-Undang 13 Tahun 2010.

Terus dari Pak Johan. Jadi Bima ini ada dataran rendah yang cocok ditanami bawang putih karena pengaruh iklim monsoon dari Australia Pak. Jadi ada waktu-waktu dingin disana yang akhirnya disana itu cocok untuk ditanami bawang putih Pak. Potensinya, ini potensi peta yang kami dapatkan dari Badan Litbang Pertanian. *One map policy*-nya ada disana Pak. Jadi kita melihat potensi luas arealnya itu bisa mencapai 5000 hektar, potensinya Pak.

Dari Bu Luluk, jadi untuk mencapai swasembada bawang putih kita perlu 78.600 hektar dukungan APBN Tahun (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Kita tidak usah bicara swasembada bawang putihlah. Sudah tidak mungkin. Itu mustahil. Kita bicara kenyataan saja. Untuk dapat 78.600 itu tidak begitu gampang. Jadi lupakan bicara swasembada bawang putih. Percuma, tidak ada gunanya. 5000 saja susah, apalagi 78.600.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Yang menjadi concern adalah sekarang wajib tanam, bagaimana realisasinya. Ini yang paling penting. Dan saya minta semua Anggota Komis IV ikut mengawasi wajib tanam ini. Jangan pengusaha seenak-enaknya saja, sudah dapat untung, wajib tanam, tidak tanam, ganti PT, ganti alamat, ganti lain-lain dan “ikut ada yang main juga”. Itu saja. Jadi tidak usah bicara swasembada bawang putih. Percuma. Jangan. Dari jaman Suswono sampai hari ini swasembada daging, swasembada daging satu pun tidak ada. Jadi jangan targetnya berapa ton ini. Dan satu lagi yang paling penting saya ingatkan, jangan membuka ruang RIPH sebanyak-banyaknya sampai 1 juta ton lebih. Di jaman ada itu 1,2 juta ton RIPH, ada apa ini? Kalau memang Indonesia sudah cukup misal 490.000 ton stop, selebihnya pakai bawang local. Sudah gitu saja. Jadi tidak usah sampai 1 juta lebih, 1 juta lebih bawang putihnya Saudara Dirjen. Saya ingatkan tidak perlu ngomong lagi tentang swasembada bawang putihlah.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Kerjakan dulu saja, Alhamdulillah kalau bisa tercapai 30%, 40%. Jangan bilang swasembada.

Lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Baik Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

Terkait dengan Bu Luluk mengenai varietas Tawamangu baru yang ukurannya besar-besar, ini terus kami dorong untuk dikembangkan Bu.

Dari Pak Muslim, ini terkait dengan bawang merah. Kami juga terima kasih Pak kalau memang ada dukungan untuk menambah anggaran untuk di Hortikultura tadi Pak seperti yang Bapak sampaikan. Memang bawang merah untuk kebutuhan kita perlu 175.000 hektar tertanam untuk setiap tahun kebutuhan. Memang dukungan anggarannya untuk bawang merah Tahun 2021 baru sekitar 5000 hektar dari APBN Pak.

Nah terus durian sudah ada juga. Kita alokasikan untuk Tahun 2021 Pak, ada pengembangannya didalam slide presentasi kami ada.

Terus bawang putih memang kami sudah pernah berkunjung juga ke Aceh Tengah dan Beuner Meriah. Kawasanya sangat luas dan sangat cocok

untuk penanaman bawang putih disana Pak. Nanti kita dorong juga untuk penanaman bawang putih disana.

Terus dari Ibu Riezky. Kami koordinasi Bu dengan Badan Karantina terkait dengan RIPH ini. Kami rutin rapat berkoordinasi mengenai hal ini. Jadi kami juga data-data 33 importir yang tidak dapat RIPH itu juga datanya juga kami dapatkan dari Badan Karantina Bu. Dan itulah yang kami laporkan ke Satgas pangan.

Terus dari.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sebentar Pak.

Interupsi Pimpinan.

Jadi Bapak koordinasi dengan Karantina. Karantina memberikan rekomendasi, begitu?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Bukan Bu. Kami dapat data-data yang tanpa RIPH dari Karantina Bu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke. Terus kelanjutannya ditindaklanjuti oleh?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Kami melaporkan ke Satgas pangan Bu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Itu saja sementara.

Terima kasih Pimpinan.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Baik.

Terima kasih.

Dari Pak Ansi lema terkait dengan *Bill Of Lading Cargo Manifest*. Kami ada PIB Pak, jadi diganti dengan Pemberitahuan Impor Barang Pak. Ada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang harus disertakan didalamnya. Nah bill of lading memang digunakan terutama kalau ada, dia dikirim pas. RIPH kan berlaku sampai 1 tahun Pak, sampai tanggal 31 Desember. Jadi untuk sunsetnya. Jadi tanggal 31 Desember terakhir tapi

kalau dia dikirimnya dari China perlu waktu 2 minggu, jadi masih boleh masuk sampai tanggal 15. Sebagai contoh Pak ya, bisa masuk sampai tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Tapi itu juga sudah dibuktikan melalui PIB tadi itu Pak (Pemberitahuan Impor Barang). Ada dokumen PIB.

Selanjutnya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya mau pendalaman sedikit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Singkat ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Singkat.

Lalu apa perbedaan yang mendasar antara PIB yang baru ini dengan prasyarat di sebelumnya Pak. Kalau tidak ada perbedaan yang mendasar apa ganti nama saja ini.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Ini memang baru, di Permentan ini baru kita masukan Pak. Karena memang. Jadi setelah kami berdiskusi dengan berbagai pihak antara lain dengan bea cukai Pak. Jadi implementasi terkait dengan manifest tersebut, karena 1 kapal itu bisa mengangkut lebih dari 3000 kontainer Pak. Jadi 1 kapal itu biasanya itu kapal-kapal besar yang. 3000 kontainer itu berbagai macam produk. Yang masuk itu bukan hanya bawang putih saja, mungkin bawang putihnya hanya 100 kontainer, yang lainnya berbagai macam produk yang masuk didalam manifest. Tapi kami tetap meminta untuk pemberitahuan impor barangnya harus disertakan walaupun kita tidak menginginkan bill of ladingnya disitu Pak.

Selanjutnya kami.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Saya tanya alurnya? Barang masuk, bea cukai dulu atau Karantina dulu atau apa. Alurnya.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Barang masuk itu masuk melalui bea cukai, terus selanjutnya di post bordernya ada di Karantina Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi bea cukai dulu?

Coba jelaskan.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Siap.

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait alur di border ini Pak. Sebenarnya saya punya bahan presentasinya Pak. Jadi artinya barang itu masuk itu duluan di kita Pak di Badan Karantina Pertanian. Setelah dari kita tindakan karantina dilakukan, baru ke pabean. Ada aturan-aturan yang mengatur. Apa yang diperiksa oleh Karantina, apa yang diperiksa oleh Pabean, apa yang diperiksa di post border. Ada aturannya semua Pak Ketua. Jadi ini yang kami pegang Pak bekerja di lapangan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dengan yang 32 perusahaan tanpa RIPH diperiksa tidak?

KEPALA BADAN KARANTINA:

Kami menanyakan Pak, kami memeriksa. Dia bawa apa tidak, tidak punya Pak. Jadi kami tetap catat periksa tapi tentu kami tidak bisa menolak Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi anda tahu tidak kalau itu melanggar Undang-Undang. Undang-Undang RIPH.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Kami tahu. Ada artian di Undang-Undang 13 kan ada juga disebut Pak Ketua. Ada disana disebut, seperti apa RIPH itu dilakukan. Ada di Undang-Undang 13 Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanya, sebagai Karantina menanyakan atau, misal oh ini tidak ada RIPH berarti dianggap illegal karena melanggar Undang-Undang

Karantina, Undang-Undang Hortikultura. Kalau anda hanya Cuma mananya, mencatat ya tidak usah. Buat apa ada Karantina. Itu saja,

KEPALA BADAN KARANTINA:

Ijin Pak Ketua.

Boleh kami menambahkan Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Didalam tugas Karantina disini Pak Ketua sesuai dengan Undang-Undangnya itu memeriksa dokumen kesehatan daripada barang atau media pembawa yang masuk Pak Ketua. Jadi ada PC-nya dari negara asal, ada COE-nya misalnya seperti itu, ada termasuk bill of lading pada masa relaksas Pak. Jadi ada relaksasi yang dibuka itu, itulah gunanya kita periksa bill of ladingnya. Tanggal berapa dia pengapalan. Didalam relaksasi itu Permendag 27 itu ada tanggal sampai tanggal 31 Mei Pak. Nah ini kami periksa. Kalau dia diluar ini tentu juga kami akan catat. Undang-Undang yang menurut atau mengamanatkan Karantina untuk misalnya menahan itu Pak Ketua tidak pada posisi tugas kami Pak Ketua, mohon maaf. Itu akan kami serahkan kepada Pak Dirjen Horti. Kami beritahukan dan itulah nanti teman-teman yang meneruskan. Seperti itu Ketua.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya lagi buka ini Pak Undang-Undang Nomor 13 itu tadi ya. Kalau saya lihat flow-nya, Karantina ini harusnya kalau melalui Undang-Undang ini, ini bergerak atas permintaan Dirjen Horti dulu baru kesitu. Jadi mana yang benar ini? Undang-Undangnya itu. Saya lagi buka ini Pak. Saya baca satu per satu bagaimana mekanisme dari Hortikultura dan segala macam. Iya kan. Nah jadi wajar saja kalau ini ada pendapat. Berarti anda-anda semua tidak memahami memahami apa yang harus anda kerjakan, kan begitu. Bukan begitu Pak Dirjen Darori ini.

F-GERINDRA (Ir. KRT. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua ijin.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi saya sarankan Pak Dirjen, bahwa tadi Bapak bilang melanggar tanpa RIPH melanggar pidana. Nah setelah itu anda kan sudah punya datanya dikasih ke teman kita ini di Bandara atau disitu. Mestinya tanpa RIPH itu ditahan barang. Yang kedua, Bapak tidak perlu lapor ke Satgas, ke polisi. Kalau sampean punya penyidik, disidik, korwasnya polisi. Tapi kalau tidak punya penyidik lapor ke polisi bahwa ini melanggar Undang-Undang tanpa RIPH, kena pidana apa? Kalau diatas 5 tahun langsung tahan. Ini jangan sampai nanti dari Karantina hanya mencatat, Bapak hanya memberitahu, siapa yang akan menindak. Iya kan? Ini tolonglah biar kita ada wibawanya. Kita kesannya Komisi IV itu pertanian itu dilecehkan dengan seorang Eselon I mengatakan tanpa RIPH silakan keluar. Deputi kok bisa membatalkan Anggota yang terhormat sama Eselon I Pertanian. Saya tidak setuju itu. Tolong, kita berani tapi lihat Undang-Undang tadi. Pasalnya berapa, pidananya apa. Kalau itu ancamannya diatas 5 tahun minta ditahan. Itu wajib. Jadi lapornya, kalau Satgas itu bukan melakukan penyidikan. Dia hanya pengawasan, peredaran dan sebagainya, mana yang macet dan tidak.

Jadi saran Ketua, saya kira ini perlu di kesimpulan muncul Pak Ketua. Sehingga kita membantu mendorong teman-teman ini ada wibawanya. Masa Undang-Undangnya dilecehkan orang diam saja gitu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi Undang-Undang cukup dipatahkan oleh seorang Deputi. Itu saja kesimpulannya. Iya toh? Betul tidak? Ya tadi Kepala Badan Karantina bilang, dia Cuma mencatat, kasih tahu ya sudah. Ini kan hal yang lucu. Kalau memang dokumen tidak lengkap boleh tidak Karantina menyetop, ya boleh. Ini loh. Saya bawa manggis 10 kilo ke China, begitu mendarat di Kuangcho saya ke Kuangcho itu didampingi sama Anggota Kongres disana. Kebetulan dari Indonesia, pulang saya bawa manggis dan rambutan. Begitu mendarat, saya tidak mau kamu siapa, langsung diambil dimusnahkan. Ya kenapa kita tidak bisa seperti itu. Ini loh. Masa Undang-Undang Cuma, ya Rakortas oke. Ini boleh, ini tidak boleh. Harusnya anda berdua menjelaskan ini boleh tetapi anda melanggar Undang-undang Hortikultura. Begitu juga dengan Karantina, Anda melanggar Undang-undang Karantina. Kalau anda mau tetap melaksanakan ya silakan tidak ada masalah, tetapi tanggung sendiri sanksi hukumnya. Kan begitu. Ya kalau begini, satu begini, satu begini ya benar tadi kata Mbak Kiki tidak ada koordinasi yang baik antar Eselon I di Kementerian Pertanian.

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Pak Momon (suara tidak jelas).

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua yang kami hormati, dan kami banggakan.

Beberapa ingin kami menyampaikan penjelasan. Yang pertama kaitan dengan saran Ibu Endang kaitan pembuatan Bank Agro, Bank Pertanian. Jadi sebetulnya kami sudah mencoba Ibu Endang dan sudah melakukan FGD dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan dan sudah mengisi formulir, tapi disana ada lebih kurang 29 persyaratan termasuk menyusun SDM, mulai dari Komisaris, Direktur, staf, dari Pusat sampai Daerah dan dihitung-hitung biaya itu Triliun hanya untuk gajinya saja. Kemudian ada persyaratan untuk mendirikan suatu Bank minimal harus punya modal 3 Triliun. Oleh karena itu tidak jadi kita laksanakan. Dan saran dari Menteri Keuangan, manfaatkan saja KUR. Jadi sementara itu Bu jawabannya.

Kemudian yang kedua, kaitan dengan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pak, tadi saya tertarik disarankan KUR. Mampu tidak menurunkan suku bunga KUR? Jadi Kementerian KKP itu kan hanya 3% ya. Ya kenapa kok tidak mampu.

Silakan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Dan BLU Bu. Jadi memanfaatkan BLU.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Sebentar saya menambahkan. Jadi maksud saya, bukan mendirikan Bank tapi Lembaga. Nah dulu sudah pernah dirintis Pak, lembaga keuangan mikro agri bisnis. Jadi Bank itu hanya sebagai Bank Kustodian, begitu Pak. Dan itu sudah disepakati. Itu Tahun 2002 Pak, tapi tidak diteruskan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Oh begini, mungkin sarannya Bu Endang dibuat LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) semacam koperasi simpan pinjam yang besar sekali, boleh menyalurkan kredit, boleh menerima tapi bukan Bank. Lembaga Keuangan Non Bank. Itu pun saya rasa tidak begitu gampanglah. Kalau orang yang tidak professional ya wassalam.

Lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik.

Kaitan dengan KUR Pak kami sampaikan. Jadi penurunan bunga dari 6% ke 3% sudah diusulkan tertulis oleh Bapak Menteri Pertanian ke Ibu Menteri Keuangan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban tapi diusulkan sudah. Kemudian di video confence juga Rakortas antar Menteri juga sudah disampaikan termasuk ke Bapak Presiden kebetulan kami yang mendampingi juga sudah disampaikan. Nanti kami komunikasikan lagi dengan Kementerian Keuangan Pak.

Kemudian kaitan dengan keterbatasan pupuk subsidi kami sekalian saja. Jadi ada 2 opsi sebetulnya ini sesuai dengan jawaban tertulis dari Menteri Keuangan ke Pak Menteri Pertanian juga hasil kajian BPK dan BPKP. Yang pertama memang satu-satunya jalan menurunkan HPP dan menaikkan HET. Nah ini mungkin kalau bisa Pak Ketua masuk dalam salah satu kesimpulan sehingga nanti Pak Menteri pun akan kuat ketika menaikkan HET, terutama yang agak riskan menaikkan HET apalagi dalam kondisi sekarang ini. Dalam kondisi seperti sekarang ini apakah tahun ini atau tahun depan kita naikannya itu.

Kemudian yang selanjutnya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Pak Dirjen.

Pak Ketua, bisa sedikit Pak Ketua. Masalah pupuk ini Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Begitu saja Pak Dirjen, saya memberikan masukan. Jadi saya kira HET sudah merupakan salah satu usulan. Cuma lebih penting adalah pendataan penerimaan sebenarnya Pak kalau Bapak penerima pupuk itu. Di Daerah itu penerima punya 2 hektar, 3 hektar sebenarnya tidak memenuhi syarat. Jadi sebenarnya pendataan Kabupaten itu yang mungkin datanya itu kurang valid. Yang harusnya sudah tidak perlu dikasih pupuk subsidi, tetap dikasih. Nah yang kedua Pak pengawasan, sebenarnya Bapak sudah bagus nih Tahun 2020 ada dana pengawasan kepada Pak ya, pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida itu sudah bagus Pak, supaya ini ada kerjanya. Karena alasan selama ini tidak ada katanya dari Pusat. Jadi kami tidak mengawasi. Nah saya kira ini Pak kebijakan ini tolong ditambahkan tadi. Pendataan tadi petani memang sudah kaya janganlah lagi dikasih pupuk subsidi, beli sajalah pupuk yang komersil.

Yang kedua, pengawasan diperkuat Pak. Sehingga pupuk ini pupuk subsidi tidak merembes ke perkebunan, ke tambak. Ini yang sebenarnya terjadi di daerah kenapa langka Pak, sebenarnya bukan langka karena tapi tidak ada barang tapi merembes ke petambak dan perkebunan. Itu saja masukan ke Pak Dirjen sebagai di Dapil, seperti itu.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Terima kasih masukannya Bapak. Akan kami perhatikan.

Kemudian yang selanjutnya dari Pak Slamet kaitan dengan pemetaan lahan 26 M ini. Jadi memang begini Pak, walaupun sudah ditetapkan lahan baku sawah 7.463.948 hektar tapi di Kabupaten-Kabupaten itu masih berteriak bahwa banyak lahan sawah yang tercatat tidak di ATR-BPN. Syaratnya untuk bisa tercatat di ATR-BPN itu harus ada data spasial. Oleh karena itu anggaran ini kita gunakan untuk kesempatan pertama di 7 Provinsi, sehingga data tersebut nanti bisa disampaikan ke ATR-BPN dan dilakukan revisi ATR-BPN tersebut yang dari luas lahan baku sawah tersebut, kira-kira seperti itu.

Kemudian yang selanjutnya, HET pupuk sudah, kemudian data lahan baku Pak Ihsan sudah.

Kemudian Ibu Riezky kaitan dengan sertifikati SNI. Memang kata-kata SNI ini muncul Pak Ketua di test report. Hanya masalahnya sekarang banyak produsen-produsen alat mesin pertanian yang tidak mempunyai sertifikatnya. Sehingga kami kasih kesempatan. Sebetulnya sudah 3 minggu yang lalu untuk mengurus sertifikat SNI. Jadi harus diuji ulang lagi di BBP Mektan. Itu kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan segera selesai. Dan kami kasih waktu sampai dengan awal Juli.

KETUA RAPAT:

Saran saya kalau memang SNI-nya belum siap ya jangan adakan pengadaan. Itu saja. Karena apa? Kalau 10 produsen, speknya pasti berbeda. Contoh, di Dapil saya ada petani dikasih Kubota tidak mau, maunya Yanma. Itu 2 nama yang cukup punya nama. Kemudian di Dapil lain ada juga merk China produknya. Standarnya apa? Kan tidak bisa, tidak ada standarnya. Sertifikasi standar itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian kalau tidak salah. Badan Standarisasi Nasional. Jadi selama sekian 10 tahun saya menjadi Anggota Komisi IV ternyata saya tidak tahu kalau selama ini mesin alat pertanian tidak ada SNI-nya. *Masya Allah.*

Ya sudah lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Kemudian kaitan dengan kartu tani, ini memang agak tersendat. Jadi memang banyak masalah. Yang pertama, ada beberapa kelemahan. Yang pertama para petani itu lupa PIN-nya Pak, terus banyak terselip. Kemudian yang ketiga yang banyak bermasalah didaerah adalah signal. Jadi memang berdasarkan realisasi sampai sekarang itu memang ada kemajuan. Jawa Tengah itu dulu hanya 3 Kabupaten, sekarang sudah nambah 5 Kabupaten. Jadi sekarang ada Temanggung, Batang, Brebes, Banyumas, Pati, Karanganyar, Purworejo dan Semarang yang sudah melaksanakan kartu tani itu pun tidak semua Desa/Kecamatan, tapi ada sejumlah Kecamatan yang sudah melaksanakan. Kemudian Jawa Barat, Ciamis. Ciamis ini pilot projectnya dari KPK. Ini sudah jalan di beberapa Kecamatan, Jawa Timur, Kabupaten Sumenep.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Interupsi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Mengingatkan Bapak waktu di Rapat sebelumnya, saya coba mungkin teman-teman mererefresh kembali. Di rapat sebelumnya kita sudah sempat menyarankan agar kartu tani ini. Bapak kan sudah paham ya kendalanya apa Pak. Di Indonesia Timur ada Ibu Alien, ada Bapak Ansi, ada Ibu Julie. Disitu pasti kalau signal saya di Sumatera pun bermasalah. Di rapat sebelumnya seingat saya (apa sudah dibuka kembali), di kartu tani ini sudah fokuskan dulu sebagai pilot project di Jawa Pak. Kan itu seingat saya ya. Mohon koreksi teman-teman. Nah jangan dipaksakan juga seolah-olah ini penyebarannya luar biasa. Nah jadi maksud saya, saran saya sama Pak Sarwo. Fokuskan saja dulu. Jadi kan anggaran itu mungkin bisa digeser ke yang mana. Kan begitu loh. Itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau di Pulau Jawa sudah berapa persen penyaluran kartu taninya? 60. Belum ada. Penyaluran kartu tani belum ada 60, dari berapa persen yang sudah.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Penggunaannya sekitar baru 40% Pak Jawa itu.

KETUA RAPAT:

Yang sudah disebarakan kartu taninya berapa persen?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Sekitar 60% lebih.

KETUA RAPAT:

Yang sudah digunakan?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Sekitar 20-25 persen Pak.

KETUA RAPAT:

Ya saran saya, fokuskan saja dulu di Jawa. Karena di Jawa kan alat komunikasi cukup bagus. Untuk wilayah lain saya pikir di stop dulu, Jawa dulu. Perangkatnya diperbaiki dulu baru mulai dijalankan.

F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ketua, saya mengingatkan hasil rapat kita itu pilot projectnya itu termasuk kampung saya. Sumbawa dan Sumbawa Barat, dan saya kasih informasi Pak Ketua minggu kemarin sudah sosialisasi dan dibagi kartu tani. Saya dikonfirmasi sama Kepala Dinasnya, dan mengucapkan terima kasih karena kita yang kasih masuk itu kesimpulan.

Terima kasih Pak Ketua. Jadi di Sumbawa, Sumbawa Barat lancar Kartu tani.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Memang Bapak luar biasa walaupun Bapak Partai Oposisi katanya.

Pak Ansi lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Dirjen, asumsi dasar kita adalah di Pulau Jawa itu lebih mampu. Ternyata baru 20-an persen Pak. Karena itu apakah mungkin PSP ini bisa menyederhanakan Sistem Kartu Tani sehingga kemudian bisa memangkas prosedur yang berbelit-belit itu. Apakah itu mungkin atau tidak, satu.

Yang kedua, disebutkan bahwa penyuluh atau pendamping pertanian itu kan yang melakukan pendampingan terhadap petani. Nah mereka ini sudah diberikan pengetahuan atau belum Pak. Jadi selain tadi pilot project ada tambahannya. Mengingat Jawa yang kita asumsikan mampu ternyata baru 20-an persen Pak. Karena itu saya menanyakan, apakah mungkin ada penyederhanaan sistem untuk menjawab berbelit-belit ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi saran saya begini saja, kita singkatnya bicara jangan panjang lebar lagi. Dulu kalau kita naik kapal Ferry ke Lampung dari Merak itu harus pakai kontan. Kemudian dipaksakan, penumpang berkendara wajib pakai top, bayar pakai kartu. Kalau tidak ada kartu tidak boleh nyebrang. Sekarang lebih ditingkatkan lagi. Beli tiket harus online, kartu tidak berlaku. Nah harusnya ya seperti itu, ada progress tahapannya. Begitu loh. Oke, untuk tahun ini masih boleh tebus langsung. Permasalahannya begini kartu tani ini kelemahannya. Duitnya disetor dulu, begitu kan Pak? Betul tidak? Duitnya disetor dulu barulah dapat kartu ini. Kalau ada duitnya. Kalau tidak ada ya punya kartu juga tidak ada gunanya. Kan gitu judulnya. Jadi jangan dipaksakan ada progress. Ya contohnya kemarin ya saya sempat ngamuk juga. Sejak kapan ini saya harus pakai online. Pak, sejak tadi malam. Salahnya Bapak kenapa Bapak nyebrangnya siang katanya. Terpaksa saya panggil petugasnya, kamu atur saya mau nyebrang. Itu loh. Jadi ada tahapannya, jangan terlalu dipaksakan juga kalau tidak bisa. Tadi dijelaskan yang di Pulau Jawa penyaluran kartunya 60%, yang ada realisasinya 20-25 persen.

Ada lagi yang mau disampaikan?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Ya silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Dirjen,

Salah satu masukan saya kenapa tadi mengusulkan suatu kelompok tani satu itu salah satu kendala dari mereka itu adalah ketika harus juga ada deposit. Artinya untuk mengaktifkan itu kan 50.000. Ternyata bagi mereka 50.000 itu cukup mahal Pak. Ini saya mendengarkan langsung dari mereka. Itu saja tambahannya Pimpinan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pimpinan, satu lagi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Kaitannya dengan apa ini?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Program yang di PSP itu Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Iya.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Dirjen belum menjawab tadi pertanyaan saya kaitan dengan program pinjaman ya dari Luar Negeri ... ini seperti apa? Untuk apa sih kegiatannya? Apakah tidak bisa melakukan efisiensi dari program yang lain yang tidak terealisasi itu seperti apa?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Terima kasih.

Jadi memang program hibah dari bantuan Luar Negeri dan ini program 2015 Ibu. Kalau hibah tidak.

KETUA RAPAT:

Cukup?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Cukup.

KETUA RAPAT:

Coba dilanjutkan biar cepat selesai karena ini sudah jam 16.00. Kita targetkan jam 17.00 selesai.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Mohon ijin, kemudian kaitan dengan dari Pak Ansi Iema Alsintan disesuaikan. Setiap diterima hanya kemarin waktu pembahasan untuk eksfator itu dari anggaran kurang pas katanya. Jadi domain dari Kementerian Pertanian TER4, TER2 dan seterusnya untuk pengolahan lahan. Sehingga tahun ini tidak ada pengadaan eksfator. Tapi kita sudah memberikan untuk NTT itu karena medannya berat TER4 yang memang HP-nya tinggi Pak.

KETUA RAPAT:

Bukankah dulu ada program eksfator atau alat berat dititipkan di Kodim atau di Brigade?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Ada Pak.

KETUA RAPAT:

Berarti kan dia bisa pinjam kan?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Bisa. Jadi eksfaktor ini koordinatonya di Dinas Pertanian Provinsi. Jadi tidak dibagi-bagikan. Jadi kalau misalnya disana memerlukan bisa kita mobilisasi ke lokasi kegiatan.

KETUA RAPAT:

Jangan bilang mobilisasi. Bapak jangan salah ngomong lagi. Pak Ansi lema, kalau mau pinjam eksfaktor bayar mobilisasi pulang-pergi. Bayar juga BBM-nya. Yang tidak bayar Cuma sewa alat sama operator. Betul gitu kan?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Betul.

KETUA RAPAT:

Karena saya kemarin di Lampung pakai hampir 6 bulan untuk bikin embung itu. Jadi BBM-nya Anggota Dewan yang nanggung termasuk mobilisasinya.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Orang NTT minta gratis.

KETUA RAPAT:

Ya mana bisa. WC umum saja bayar.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik, kaitan dengan embung Pak Ansilema silakan diusulkan saja Pak oleh nanti lewat Dinas Pertanian Kabupaten, dan memang anggarannya masih tersedia.

Kemudian terkait dengan asuransi pertanian, saya pikir Tahun 2019 sudah mencapai 98% untuk padi. Untuk ternaknya mencapai 100%. Jadi mudah-mudahan Tahun 2020 pun akan mencapai target.

Mungkin itu Bapak Ketua hal-hal yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Terima kasih.

Ijin Pak Sekjen.

Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Terhormat dengan padi ini banyak sekali, Ibu Luluk, Pak Ichsan sudah tidak ada ya. Bu Kiki, Bu Alien Mus, Pak Ansi lema, Pak Trisno. Yang pertama, tentang data surplus kami kirim Bu, sebentar nanti kami WA lagi diproses anak buah sama Pak Trisno juga.

Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan produksi. Kuncinya salah satunya bibit unggul, tadi sudah saya sampaikan. Banyak daerah yang menggunakan varietas itu-itu saja, salah satunya kita lakukan penggantian varietas. Sehingga kita pemetaan dulu varietas yang sudah dilakukan 6 kali musim dilakukan penggantian yang umum.

Kemudian mengenai pengawasan peredaran supaya lebih baik. Distribusi benih dari tempat asal ke Provinsi tujuan ditujuan pun juga di uji lab, sekarang diperiksa begitu supaya bisa menjamin mutunya. Dan berikutnya diusahakan benih supaya diproduksi di setiap wilayah terutama di luar Jawa. Jadi kita punya program penangkaran benih di luar Jawa. Tidak hanya padi tetapi juga untuk jagung.

Berikutnya untuk usulan demplot. Nah ini sekalian diuji untuk Aceh Tenggara Pak Fachri, ada 4000 hektar jagung, 2000 hektar padi sekalian jadikan pilot project begitu, dan menyusul yang lainnya kami nurut lokasinya tapi Aceh Tenggara bisa dilakukan secara bertahap tahun ini sudah dimulai, kemudian tahun berikutnya dengan pola korporasi. Jadi penanganannya hulu-hilir.

Kemudian yang terkait dengan untuk efisiensi input. Ini juga untuk menjawab terkait dengan NTP.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Tadi katanya kalau tidak salah dengar, di Aceh Tenggara menurut Pak Salim atau menurut Pak Muslim katanya penghasil terbesar jagung di Provinsi Aceh. Terus kalau sudah terbesar kenapa pakai pilot project lagi. Coba bagaimana? Saya tidak mengerti juga ini. Sudah paling sukses, paling bagus,

paling besar se-Provinsi Aceh kok minta pilot project lagi. Jangan permintaan Pak Salim didengar juga. Tadi dia bilang.

Ya lanjut.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Untuk NTB Pak Suhardi Duka, dan Pak Slamet tidak hanya fokus produksi tapi juga sudah kesejahteraan. Salah satu penggarisnya kan NTB tadi. Kuncinya NTB untuk sektor pertanian di on farm-nya adalah efisiensi input sehingga saat harga jatuh pun masih ada profit. Kemudian menangani di stabilisasi harga.

Untuk efisiensi input disamping menggunakan varietas unggul yang ada Deltanya. Jadi supaya ada peningkatan produksi juga dilakukan perbaikan pola pengendalian hama penyakit. Tadi disampaikan datanya yang Pak Daniel tadi terkena itu, bukan Puso. Yang Puso 5000-an OPT se-Indonesia tahun lalu. Kalau nasional sekitar 300-an yang terkena serangan OPT. Sehingga bisa menggunakan pupuk-pupuk pestisida bio hayati atau ramah lingkungan. Bisa membikin sendiri, bisa ditekan biayanya termasuk ... nanam revulia kalau dengan burung hantu, dan lain sebagainya sehingga menekan biaya akan berdampak ke efisiensi produksi. Kemudian yang aspek hilirnya, bagus. Kelompok tani, gapoktan supaya naik kelas tidak lagi menjual beras makanya dryer dan ditempatkan di lokasi itu sehingga bisa memproduksi beras, turut membantu mengangkat HPP supaya tidak jatuh. Salah satunya itu memotong rantai dan kami menjembatani petani gapoktan langsung ke pasar online, blibli.com dan seterusnya Pak. Jadi untuk beras-beras klas supermarket atau langsung dor to dor ke konsumen melalui pasar online disamping pasar tradisional maupun pasar-pasar yang ada. Itu terkait dengan beras, padi.

Untuk jagung, ijin Pak Ketua. Memang sudah siap tiap perusahaan dengan pola barkot sehingga mudah terdeteksi dengan baik peredarannya. Tidak hanya petani Pak yang mengontrol, petugas lapangan dan kami pun akan mengecek kualitas produk yang ada di label dengan teknologi itu supaya lebih efisien. Itu salah satu caranya.

KETUA RAPAT:

Dirjen, tidak usah ngomong terlalu tinggilah. Apa setiap packaging anda cek? Tidak usahlah. Tidak mungkin setiap packaging, petugas penyuluhnya saja belum tentu ada di Desa. Ya kita mesti berkata apa adanya ini. Jangankah HP android, petugasnya pun belum tentu ada. Tidak usah bilang begini-begini. Yang penting pengawasan anda sebagai Dirjen, pengadaan bibit benih jagung itu yang paling baik dan yang terbaik agar supaya peningkatan produksinya tercapai. Itu saja. Tidak usah bilang pakai barkot, pakai apa. Ah ngomong kosong.

Ada lagi?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Satu lagi sedikit lagi tentang benih Pak, untuk substitusi impor. Jadi program kami terkait dengan benih juga teknologi. Tahun ini nanam 10.000 hektar IR, Nutrijing untuk mengatasi stunting di sekitar 80-an Kabupaten. Cocok tadi yang disampaikan Ibu Endang sama Ibu Julie. Tahun depan rencananya 50.000 hektar perluasan untuk mengatasi stunting Pak Terus beras yang lain substitusi impor kita nanam varietas local bikinan dalam negeri itu beras tarapes pengganti japonica, kemudian beras baroma menggantikan restoran Basmati dari Pakistan. Dan yang lain kita dorong terus harus ada kemajuan kedepan hal-hal yang menarik dan sesuai teknologi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Habis Pak Dedi, yang minta tadi. Baru Pak Ansilema, baru Mbak Alien, baru Mbak Kiki.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ijin Pak Ketua.

Pak Sekjen, Pak Dirjen,

Yang menjadi problem petani saat ini adalah kenapa misalnya mereka monoton nanam padi. Karena kalau nanam padi yang belinya ada. Dan kalau tidak ada yang beli masih bisa disimpan. Nah nanam kacang tanah, nanam kedelai, yang belinya tidak ada Pak. Di daerah-daerah itu makin kesini tengkulak juga sudah makin tidak ada. Jadi ketika panen yang nyerapnya tidak ada Pak. Saya Pak petaniya Pak, nyerapnya susah. Ini yang terjadi hari ini. Beda dengan jaman dulu. Kalau jaman dulu masih ada tengkulak. Beli kacang kesana, beli. Sehingga kenapa di masyarakat lebih senang nanam jagung manis karena jualnya lebih gampang. Kacang kedelai, daripada nunggu tua nanti tidak ada yang beli masih muda dipotongin direbus, adamame. Ini bagaimana caranya sekarang dipetakan diseluruh Indonesia ini nanam kacang tanah disini sekian ribu hektar, disini jagung sekian ratus ribu hektar dibelinya sama ini. Itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Dirjen,

Maksudnya begini Pak Ketua. Di daerah saya itu Pak Ketua jagung malah malah Tanah Karo itu sudah kalah. Cuma karena transportasi berjauhan ke Medan sebab Aceh Tenggara beda budayanya dengan Aceh lain Pak Ketua. Dia melalui Sumatera Utara. Disana Pak Dirjen kalau saya tidak salah luas jagung 19.700 hektar lebih kurang. Kalau andaikan bibitnya itu 32, dapat 8 ton, 9 ton per hektar Pak Dirjen, bukan yang seperti data Pak Dirjen diprediksi hanya 5-6 ton. Tapi kalau bibit jagung bisa 18. Paling tinggi 6 atau 5 ton. Makanya apa salahnya Pak Ketua, kalau ada bibit tadi memang kalau mau kita produksi jagungnya ini luar biasa kasih Pak Dirjen bantuan kesana. *Insha Allah* nama Mentan bagus untuk Aceh itu.

Demikian. Kalau banyak. Kalau hanya sekitar 4000 hektar itu tidak terasa itu Pak. Pak Djamil pun sudah mengangguk-angguk itu berarti pertanda setuju Pak Ketua. Asalkan rapat kita ini tenang, kondusif saya kira Pak Ketua (Kan paham Pak Ketua).

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Berarti itu bukan pilot project. Minta penambahan bibit benih.

Mbak Kiki dulu. 1 menit.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke 1 menit.

Kepada Bapak Dirjen TP, kembali saya mengulangi. Pajak, sekali lagi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, apabila kedelainya tidak mumpuni, tidak akan kecap untuk targetting saya mohon dengan sangat realistis dan rasional itu tadi terkait dengan jagung tadi Pak. Pajaknya saja sudah kalau memang itu kita masih makan. Dan saya mohon jumlah pajaknya ditingkatkan saja Pak, dan saya juga memohon kalau memang Aceh Tenggara sudah jalan saya minta khusus wilayah Musi Banyuasin Sumatera Selatan, itu baru pilot project Pak. Nah ini saya clear saya ngomong untuk disampaikan.

Kalau masalah pagi. Nah kemarin Bapak bilang akan sampaikan ke saya. Yang pasti begini, kami mendukung TP ini memberikan benih tapi realistis. Jangan yang sudah jelas tidak bakalan dapat target Bapak paksakan. Anggaran Bapak yang tidak terserap.

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

1 menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya masih mencatat Rapat tanggal 29 April 2020 Pak. Pada saat itu Bapak menjelaskan ada beberapa program pengembangan padi dan jagung. Padi di 23 Provinsi, jagung di 10 Provinsi. Saat itu saya lihat di 10 Provinsi itu terkait jagung itu tidak ada NTT Pak. Padahal NTT itu dari segi lahan dan lain-lain itu jagung cocok sekali. Kemarin kan Pak Sekjen dan para Direktur kesana lihat Gubernur kami betul focus. Nah sekarang saya mau tanya, sudah masuk belum itu sebagai Provinsi ke-11? Masuk. Ya karena kami 10 kan belum masuk Pak. Makanya saya bilang.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Ijin Pak.

Jadi 8 Provinsi andal utama, 9 Provinsi andalan, sisanya pengembangan. Jadi masuk Pak NTT. Semua masuk.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., MSi):

Ditulis lagi Pak biar. NTT masuk jagung.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, ijin Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Sedikit saya ingin berkomentar Pak Dirjen mengenai masalah ... jagung. Jadi sebenarnya kalau kita lihat jagung ini masalahnya di pengadaan ya, di Kabupaten atau di Provinsi Pak Dirjen. Jadi memang sebenarnya harus kita pastikan bahwa pengadaan didaerah ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya setuju dengan Pak Salim tadi bahwa tidak semua daerah itu harus merknya harus sama dan tepat waktu juga. Jadi

banyak juga petani Pak Ketua sudah selesai musim tanam baru datang benihnya Pak, karena kami ini benihnya adalah proyek. Nah ini mungkin harus diawasi oleh Dirjen Tanaman Pangan untuk daerah-daerah ini agar betul-betul benih ini tepat sasaran kemudian yang diinginkan oleh masyarakat kita.

Yang terakhir Pak Dirjen, harus dipikirkan juga adalah bagaimana jagung kita ini dibeli oleh pasar Pak pada saat panen raya. Ini kan terjadi masalah ini Pak nih. Artinya ini (rekaman terputus). Jangan dibawah 2500. Sebenarnya kalau ada kepastian harga bahwa 3100 petani pasti akan bersemangat menanam jagung Pak Dirjen walaupun mungkin tidak diberikan bantuan benih ya tapi ada kepastian harga.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Charles, interupsi apa mau nanya?

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Interupsi Ketua.

Terima kasih Ketua dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Saya tadi menangkap beberapa usulan tentang kedelai yang sudah tidak lagi diberikan subsidi dan lain-lain. Sebagai informasi import kita terhadap kedelai diprediksi 2,75 ton per tahunnya. Dan menurut saya Bangsa Indonesia tidak lepas dari kedelai. Kedelai itu adalah produk untuk tahu, tempe, dan lain-lain. Manakala kalau kita kemudian statusnya padi, jagung dan kedelai kemudian kita pisahkan kedelai tidak kita berikan bantuan. Saya sebagai salah satu orang yang di Dapil saya merupakan produksi kedelai besar bahkan kalau kita catat mitra tani itu sudah melakukan ekspor keluar walaupun juga kebutuhan diluar masih banyak. Jadi menurut saya, saya salah satu orang yang tidak setuju Pak Ketua kalau kemudian kedelai menjadi salah satu yang tidak diberikan subsidi dan lain-lain. Jadi saya tetap menyakini bahwa kalau kita bicara impor. Salah satu impor yang cukup besar di kita itu adalah kedelai. Jadi kalau kemudian kedelai tidak diberikan bantuan subsidi dan lain-lain saya yakin itu tidak menjadi sebuah pilihan yang populer bagi Pemerintahan Pak Jokowi. Artinya memang kalau saya usul yang lebih konkrit adalah Pajale itu tetap menjadi sebuah program yang penting, tapi bagaimana mencari anggaran ini dan juga itu merupakan satu kesatuan yang harus diusahakan oleh Kementerian Pertanian.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Alien, 1 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tadi apa yang disampaikan Pak Charles, saya ingin mempertanyakan saja bahwa Dirjen TP, apakah kegiatan pengembangan kedelai ini masih relevan karena sudah hampir 20 tahun program swasembada kedelai tidak pernah tercapai Pak. Jadi memang ini harus ada prioritas penganggaran. Tadi sempat disinggung ada Pajagu (padi sama jagung), terus ini ditambah lagi sama Pak Charles kedelai. Tapi kita harus melihat juga selama 20 tahun ini apa, tercapai tidak. Kalau memang harus melakukan seperti itu berarti setiap daerah memperhatikan komoditi-komoditi apa saja hasil tanaman pangan itu yang menjadi keunggulannya. Kenapa dari kemarin itu Pak Kanjeng Darori bilang, Pak Dirjen itu di Komisi IV, tolonglah mengingat di Komisi IV sampaikan. Jangan asal-asal tulis, besok sudah tidak ini lagi gitu loh. Tolong. Karena ini sudah berulang kali kita sampaikan. Komoditi-komoditi setiap daerah itu kan ada per Provinsi, beda-beda juga. Jangan Bapak paksakan kita tanam padi di Maluku Utara. Tapi kalau Bapak suruh tanam sama tanam umbi-umbian (suara tidak jelas). Ini komoditi-komoditi andalan dari setiap Provinsi kan berbeda-beda. Papua, Maluku, Maluku Utara dan juga NTT saya pikir masih samalah. Jadi itu saja yang harus saya sampaikan.

Terus tanaman pangan tolonglah. Lihat prioritas penganggarnya itu lebih tepat.

KETUA RAPAT:

Jadi apa yang disampaikan Pak Charles tadi mengenai kedelai saya sangat setuju sekali. Tetapi di Kementerian Pertanian kan banyak manusia hebat, orangnya pintar. S2, S3, yang belum ada S7. Kenapa sih? Tinggal dipetakan wilayah kok. Pulau Jawa Kabupaten mana untuk kedelai. Tetapi yang paling penting adalah setelah petani itu nanam harganya jatuh. Karena apa? Kementerian Pertanian tidak ikut perihal regulasi import kedelai. Kenapa tidak sama-sama kita duduk. Kita buat regulasi yang baru. Kalau tidak bisa kena pajak, importir wajib impor 1 ton kedelai wajib menyerahkan bibit kedelai sekian kilo kalau itu bohong. Jangan sampai kejadian lalu itu terulang. Mungkin disini masih banyak yang ingat, apabila pengusaha mau impor beras ketan wajib serap ketan local. Apa yang terjadi? Oh tinggal bikin surat keterangan saja kok. Kerjasama sama Gapoktan ini. Betul tidak Pak Sekjen? Betul?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Betul Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Jadi tidak usah diakal-akalin lagi, sudah ketahuan kalau kamu impor 1 ton wajib sekian kilo impor bibit untuk dibagikan kepada rakyat. Itu yang paling penting. Kalau local sudah omong kosonglah.

Ada lagi?

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terakhir Pimpinan.

Maksudnya begini Pak, karena ini Pimpinan tadi yang ngomong. Dari awal Pak Momon. Dari awal kan saya sudah minta peta Pak. Dari awal Pak, waktu Bapak bicara AWR waktu itu. Iya kan? Cobalah Pak. Saya sebetulnya capek juga, ini sudah jam 16.30. Tiap hari kayak anak SMA kita ini disini gitu loh. Datang jam sekian, beres jam sekian. Tolonglah serius sedikit Pak. Karena bukan apa-apa Pak, masyarakat itu tidak mengerti DPR itu dibidang brengsek Pak padahal kita ya tahu sama tahu saja. Iya tidak Pak. Kita mah tidak ngerti. Saya mohon Pak, pertama peta ini tolong Pak segera diselesaikan. Tolong Pak Dirjen TP (Pak Wandu). Terus kedua, permasalahan ini jangan berulang lagi. Saya mohon. Saya juga capek lihat Pimpinan marah-marah terus kayak begini. Iya Pajale tidak ada masalah, tapi prioritas itu harus ada. Angka itu kan bisa di barometer Pak. Yang mana prioritas, yang mana ini. Gitu loh.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi saya minta pemetaan dalam 1-2 minggu ini, nanti waktu Raker kita putuskan wilayah-wilayah mana saja yang potensinya bagus untuk tanam kedelai dan yang paling penting adalah bagaimana transportasi ditempat tersebut. Kalau transportasi angkutannya saja jauh, jalannya rusak, otomatis tidak efektif, tidak efisien jadi tambah mahal.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Mau ngomong?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

1 menit.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Iya.

Itulah yang saya bilang tadi Pak Ketua. Ketika kita bilang NTP kita jadikan sebagai acuan penyusunan APBN, semua program ini harus diubah. Ketika kita bicara kesejahteraan maka kita bicara harga kualitas tinggi, maka harus kita perbaiki atau mengurangi biaya produksi. Caranya subsidi, caranya Bansos, caranya kita bantu petani ketika menanam. Kan itu konsekuensinya. Untuk jagung Pak, sudah 2 Kantor Bupati di Sumbawa itu di demo pekan ini Pak. Saya kaget tadi ketika teman-teman bilang cukup dengan harga 3100 harga jagung itu sudah tinggi. Di Sumbawa itu 3300 masih dibilang rendah Pak. Apa artinya? Biaya produksinya lebih tinggi. Makanya kalau kita betul menjadikan NTB itu sebagai acuan ubah semua anggarannya Bapak itu. Banyak subsidi di produksi, di penanaman tadi.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya nanya Saudara Dirjen, kalau tanam jagung sampai panen, berapa biaya produksinya?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

7 sampai 9 Juta.

KETUA RAPAT:

Ekuivalen 1 kilo berapa?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

1 kilo harga jual 3200, biaya produksi 1800 rata-rata.

KETUA RAPAT:

Bukan harga jual. Biaya produksi. Mungkin beda Kalau kami di Lampung 1800 sampai 1900. Kenapa harga jagung rendah? Walaupun petani bilang jagung saya kering, sudah pipil tetapi kadar airnya masih 38. Yang diterima oleh perusahaan penampung adalah 14 sampai 14,5. Jadi perbedaan ini yang harus dijelaskan. Kalau di Lampung, mereka menjual 3000 sudah untung, untung. Tetapi waktu ditanyakan petani akan menjawab, tidak untung Pak. Saya bilang, betul tidak untung? Sumpah Demi Allah? Untung Pak Ketua Cuma tidak banyak katanya. Iya kan ini yang terjadi. Jadi kita harus lihat juga kearifan lokal.

Ada lagi? Bu Luluk. Ada lagi?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Sudah jelas tentang kebijakan kedelai tadi disampaikan. Setelah padi jagung, tetap dikembangkan kedelai Bu Kiki bukan dinolkan, seperti Pak Charles dan (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Tetapi saya tidak bicara nolkan atau apa tetapi pilihlah wilayah-wilayah yang tepat.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Setuju Pak. Kami.

KETUA RAPAT:

Jangan tadi misalnya di Maluku dipaksakan tanam kedelai, di Papua.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Ijin Pak, setuju itu. Segera kami kirim ke Bu Kiki pemetaannya. Peta dan (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Kok ke Ibu Kiki, semua Anggota harus mengetahui loh.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Semua saya kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Rudi silakan yang virtual.

Terakhir.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Kepada Pak Dirjen PSP, ini saya mau ini kan pupuk untuk di Kabupaten Bima itu kan pengajuan 55.000 ton. Jadi baru dipenuhi 32.767. Mudah-mudahan bisa dibantu 22.233, karena seperti disampaikan Pak Johan tadi kalau masalah jagung memang benar itu ya, dan kartu tani juga sudah bagus di Pulau Sumbawa ini. Hanya saja yang pupuk ini Pak Dirjen, jangan sampai ada masalah. Jadi nanti ribut lagi kalau di Bima ini.

Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen.

Terima kasih teman-teman semuanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir Karantina.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Baik.

Terima kasih Pak Ketua, Bapak/Ibu semua.

Ijin Pak Ketua, boleh kami tampilkan yang PNBK tadi Pak. PNBK tadi tolong ditampilkan. Jadi PNBK kita Pak 2019 itu 327 dari target sebenarnya waktu itu pagunya itu 140 tapi pagu APBN yaitu hanya 71 Pak Ketua. Jadi 3 kali revisi. Nanti kami tunjukkan datanya per bulan Pak. 3 kali revisi itu totalnya yang kita bisa pergunakan karena penggunaannya PNBK kita di Karantina hanya 50% Pak Ketua, mohon bantuan Pak Ketua juga Bapak/Ibu semua ini supaya ini bisa ditingkatkan penggunaannya Pak. Itu baru hanya 50%. Jadi 140 ini yang final yang bisa kita gunakan Pak. Sementara kita masukan PNBK itu 327 M Pak. Jadi sisanya ini hampir 180-an, itu kembali tidak bisa kita manfaatkan. Nah itu Pak 2019.

2018, itu mohon maaf kami tidak tampilkan tadi. Itu totalnya 317, totalnya yang disini. Total pendapatan yang PNBK, tapi yang bisa kita manfaatkan itu hanya sekitar 140 dengan masa 3 kali revisi yang bisa diberikan waktu itu. Nah 2020 posisinya sampai Mei kemarin itu kita baru 117 Miliar. 120 totalnya dengan non fungsional kita Pak. Nah ini memang di target sertifikasi yang sangat menurun Pak Ketua, karena memang anggaran kita menurun Pak.

Coba lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, rincian per bulan Pak Ketua Tahun 2019. Ini tadi yang total 327 itu, bulan per bulan seperti ini. Nah di 2020 sampai bulan Mei kemarin ini sekitar 120. Yang non fungsional ... ini totalnya semua ini adalah 120. Ini kondisi PNBK kita Pak Ketua. Jadi artinya tadi ada pertanyaannya Pak Salim juga, mohon maaf. Itu PNBK kita meningkat Pak. Jadi 2020 itu kita belum bisa memastikan situasi Covid seperti ini.

Kami boleh tunjukkan negara-negara tujuan ekspor itu tadi pertanyaannya Bu Kiki, ini kita ekspor semuanya Pak. Datanya ada di kita Pak, ada kita software kita atau aplikasi kita namanya IQfast. IQfast itu hari ini tadi sedang dilombakan di Panitianya Kemenpan%RB dari 2500 peserta kita punya ini masuk di 99 top 99 Pak. Mohon doa Bapak Ketua dan Bapak/Ibu semua. Ini sistem informasi per karantina kita mulai dari UPT. Nah ini negara tujuan. Tadi yang kasih tadi totalnya itu, total-total semua dari perkebunan mana saja (ada filenya tadi saya kasih). Jadi negara-negara tujuan ekspor kita itu seperti ini Pak. Ada file yang lebih lengkap tadi per sub sector, bisa kita lihat. Hortikultura itu kemana saja, komoditasnya apa, Ada semua datanya di kita. Nanti kami akan sampaikan jika diperlukan Pak Ketua yang (suara tidak jelas).

Dari periode Januari sampai April kemarin, itu 160 negara Pak tujuan ekspor komoditas pertanian kita seluruhnya. Mohon maaf Pak, ada tadi file-file yang masing-masing per sub sector. Ya misalnya ini kelapa bulat. Ini ada negara tujuannya disitu. Tadi sudah ada filenya (nanti Bu Kiki akan kami

tunjukkan nanti). Semuanya Pak. Jadi artinya komoditas pertanian kita yang di hulunya itu bisa kita tunjukkan kok semua datanya.

KETUA RAPAT:

Nanti datanya di kasih saja. Saya akan tanyakan perihal.

2019 berapa realisasi PNBK?

KEPALA BADAN KARANTINA:

2019, penerimaan kita 327 tadi Pak.

KETUA RAPAT:

327. Sekarang berapa?

KEPALA BADAN KARANTINA:

120.

KETUA RAPAT:

Kalau kita lihat kan tidak ada perbedaan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei 2019 sama sekarang apa bedanya? Hampir sama kok. 20, 20, 20, 120-an. Coba hitung. 24, 22, 37, 27, 30.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Ijin Pak Ketua.

Artinya Pak, dari 2018 kan ke '19 Pak. Jadi kalau '20 kan kita belum kelihatan totalnya Pak. 2020 maksud kami.

KETUA RAPAT:

Karena konon katanya Kementerian Pertanian mengeksport komoditi mencapai 300%. 300% darimana? Kalau kita hitung dari 2019 kan tidak ada, coba kita lihat nanti. Tinggal Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dapat tidak hampir 1 Triliun? Kalau bicara 300%, 325 Miliar total 2019, jadi 300% berapa?

KEPALA BADAN KARANTINA:

Iya, ijin Pak Ketua. Kami klarifikasi Pak. Yang 300% itu Pak itu program kita selama 5 tahun. Itu program selama 5 tahun Pak Ketua. 300%, itu gratis (gerakan 3 kali lipat ekspor). Itu program kita 5 tahun Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi bukan per tahun?

KEPALA BADAN KARANTINA:

Bukan Pak.

KETUA RAPAT:

Ya sudah tidak perlu dijelaskan lagi kalau begitu.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Siap.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi siapkan data saja.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Iya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena beritanya itu beda headlinenya dengan yang diomongkan hari ini. Headlinenya itu, peningkatan ekspor mencapai 300% ternyata 5 tahun.

KEPALA BADAN KARANTINA:

5 tahun Pak program kita itu Pak.

KETUA RAPAT:

Bukannya setahun, bukan. Berarti Anggota Komisi IV harus banyak belajar lagi.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Saya kira itu Pak Ketua.

Yang lainnya kami boleh nanti sampaikan (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Ya nanti sampaikan secara. Semua pertanyaan Anggota sudah dijawab tapi saya minta tetap jawaban tertulis untuk bukti akan datang kalau itu pernah ditanyakan dan belum ada realisasinya. Dan hal ini pasti akan ditanyakan pada Rapat Kerja yang akan datang.

Terima kasih kepada Eselon I.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk masalah apa yang ditanyakan?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ya karena saya tadi bukan terganggu dengan Pimpinan tetapi memang agak sedih saja, karena diruangan ini kita sudah tidak bisa lagi bicara tentang swasembada. Oleh karena itu kita mintalah kepada Kementerian untuk membuat road map yang jelas terkait dengan peningkatan produksi dan komitmen untuk mengurangi impor. Sehingga nanti itu biar korelasinya jelas, berapa impor yang akan kita kurangi, dan berapa kemudian peningkatan produksinya harus dilakukan termasuk perluasan wilayah itu berapa yang harus dicapai termasuk wilayahnya dimana yang akan dijadikan titik konsentrasinya.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mbak Kiki 1 menit.

Jangan ulang-ulang lagi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oh tidak Pak maaf.

Terima kasih Pimpinan.

Pada Bapak Barantan saya mohon berarti sertifikasi ini kan berarti dikeluarkan oleh karantina ya. Nah, Barantan saya harap juga dengan horti tolong pelajari lagi masalah Undang-Undanglah supaya clear Pak. Kalau ini kayak begini, saya baca dari tadi Undang-Undangnya walaupun tidak disuruh saya baca. Ini kalau tidak masalah lagi nanti dan kita tidak dalam konteks

untuk membahas itu lagi. Pak Karantina saya minta sertifikasi itu prosedurnya seperti apa dan segala macam, Bapak juga harus paham Pak. Saya mohon itu Pak ya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Dari dialog, diskusi dan masukan. Dengan ini kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat hari ini sebagai berikut:

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai program utama Kementerian Pertanian dalam rangka pencapaian target produksi Tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar masing-masing Eselon I dalam menyusun usulan rencana program dan kegiatan utama fokus kepada upaya peningkatan produksi komoditas bahan pokok secara konsisten dengan menggunakan bibit atau benih yang berkualitas yang sudah ada hasil uji produksi ditingkat lapangan agar peningkatan produktivitas dan pencapaian produksi dapat dilakukan secara optimal.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

(RAPAT: SETUJU)

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan,

Kalau disitu di point 1 kan hanya berbicara tentang peningkatan produksi. Sementara diawal kita sudah ada bahwa NTP itu menjadi acuan kita sehingga menurut saya perlu ditambahkan setidaknya produksi tapi ukuran-ukuran atau patokan untuk NTP itu dimasukkan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Coba dibantu redaksinya.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Produksi dengan NTP itu berbeda menurut saya. NTP sendiri saja. Mohon ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Slamet.

Pemerintah?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya boleh Pak dimasukan sendiri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar Kementerian Pertanian dalam menyusun RKP dan RKA Tahun Anggaran 2021 harus sesuai dengan program utama nasional dan memiliki target kuantitatif yang terukur serta menetapkan skala prioritas yang sejalan dengan sasaran nasional. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian agar menyusun kembali target-target produksi yang lebih realistis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki antara lain target produksi komoditas padi, jagung dan kedelai.

Jangan sampai kata-kata nanti keluar lagi target setinggi langit, pencapaian sekaki bukit.

Anggota setuju?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Mungkin disitu Ketua tambah NTP itu dan memiliki target kuantitatif yang terukur.

KETUA RAPAT:

Tambahkan. Lihat lagi Anggota? Sudah cukup? Saya bacakan ulang.

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar Kementerian Pertanian dalam menyusun RKP dan RKA Tahun Anggaran 2021 harus sesuai dengan program utama nasional dan memiliki target kuantitatif yang terukur, antara lain: peningkatan nilai tukar petani, serta menetapkan skala prioritas yang sejalan dengan sasaran nasional. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian agar menyusun kembali target-target produksi yang lebih realistis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki antara lain target produksi komoditas padi, jagung dan kedelai.

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Oke, setuju Bapak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta setiap Eselon I Kementerian Pertanian untuk memperhatikan isu-isu dan dinamika di masyarakat sesuai dengan Tupoksinya masing-masing terutama terkait dengan komoditas strategis yang dibutuhkan masyarakat seperti beras, bawang merah, cabe, gula, daging. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara continue dan berkelanjutan.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian agar menindaklanjuti temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menjadikan temuan BPK

sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyempurnakan program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian agar program dan kegiatan yang dalam pelaksanaan mendapat catatan BPK serta tingkat keberhasilannya kurang baik, agar tidak dijadikan kegiatan prioritas Tahun 2021.

termasuk juga salah satunya rawa. Yang ada di Sumsel itu juga temuannya cukup banyak.

Anggota? Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Ya setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus penyerapan anggaran terutama untuk kegiatan bersentuhan langsung terhadap kebutuhan petani, antara lain: penyaluran pupuk bersubsidi, unit pengolahan pupuk organik, bantuan benih, dan bibit yang berkualitas serta bantuan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen yang tepat guna dan sesuai standar.

Anggota? Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian dalam rangka mempercepat pelaksanaan anggaran kegiatan dengan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan, seperti pemberian rekomendasi kepada petani tidak perlu dilakukan oleh Kepala Dinas. Namun cukup dengan persyaratan yang sudah terdaftar di Dinas terkait.

Dirjen tahu tidak, Pak Sekjen tahu tidak, kalau beda Partai itu minta rekomendasi itu seperti ngemis.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

satu partai saja bisa tidak dikasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Beda aspirasi saja sudah susah. Kalau memang sudah terdaftar berarti kan sudah sah.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Ketua, interupsi Ketua.

Setuju sekali kalau yang kayak gitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Bahasanya harus diganti Pak karena tetap kegiatan kan seperti dana dekon itu anggarannya memang di Dinas, tidak semuanya kegiatan kita dilaksanakan oleh Pusat sehingga bahasanya perlu diperhalus. Artinya bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu ada yang tidak harus Dinas tetapi secara umum memang kegiatan harus tercatat oleh Dinas karena pemeriksaan dan sebagainya secara berjenjang harus melewati Dinas Pak.

KETUA RAPAT:

Coba masukan apa kata-katanya. Karena begini Pak Sekjen, contohnya UPO. UPO dari Pusat masuk ke rekening kelompok. Tetap juga dimainkan di kelola oleh oknum dimainkan. Kamu harus beli sapinya harus sama si ini. Hakkul Yakin kalau sapinya 9 umumnya 1 atau 2 pasti kecil. Makanya Eselon I banyak turun ke lapangan, jangan ikut Pak Menteri terus. Turun ke lapangan, dialog dengan petani, dengan penerima. Jangan secara resmi tetapi secara tidak resmi, apa yang menjadi masalah. Ini saya ngomong apa adanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Sekjen,

Kalau saya bercerita sederhana saja. Di Dapil saya misalnya kalau Karawang sama Purwakarta gampang, tapi begitu ke Bekasi itu ... (suara tidak jelas). Sampai sekarang ketemu ... saya tidak pernah mau. Padahal untuk bantu wilayah. Ada juga yang begitu. Kalau ngomong partai, partainya sama. Ya, tapi kan saya tidak begitu penting Bekasi.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Tambahan Ketua kalau boleh.

Saya pikir memang penting itu Pak Sekjen dipertimbangkan untuk beberapa hal itu tidak harus dengan Dinas. Tadi kalau Pak Ketua bilang 1 partai atau beda partai.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Bapak dari partai mana?

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Ya sudahlah.

Artinya saya melihat kalau memang penting kayak situ boleh juga Pak Sekjen dipertimbangkan.

Terima kasih Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Coba cari solusi. Ini kan pentingnya legitimasi kan ya Pak Sekjen kan? Kalau bukan Dinas cukup Camatlah. Ini hanya legitimasi kelompok yang dibawa Anggota yang terhormat itu kan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Mungkin sedikit masukan Pak. Jadi memang pada saat pemeriksaan. Jadi maksud saya begini, yang mencari CPCL dari Dapil tetap tapi minimal ada pengantar dari Dinas atau darimanalah. Yang penting ketika diperiksa itu Dinas mengakui bahwa ini. Jadi pengantar saja tapi kalau CPCL-nya tetap dari Dapil yang menentukan. Sehingga kalau diperiksa nyambung. Kira-kira begitu Pak. Mohon ijin.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sekarang kalau Anda jadi Anggota Dewan beda partai, bisa tidak minta surat dari Dinas?

Programnya berapa? 10. Ya sudah 4 untuk saya nanti. Loh saya ngomong apa adanya loh kenyataan. Jadi bagaimana tidak ada pelanggaran hukum tetapi CPCL-nya dimudahkan tapi kalau pakai surat ... kok jaman dulu tidak ada tuh. Ada tidak jaman dulu, periode lalu? Tidak ada surat dari Dinas.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ada Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada Pak. Saya 10 tahun disini Pak.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Secara prinsip kan kelompok tani dan gabungan kelompok tani itu kan tercatat, terdata dan dibina oleh Dinas. Ini harus cari kalimat yang tepat. Saya belum menemukan ini. Tapi hakikatnya kami sudah menangkap Bapak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Coba Pak Momon carikan. Kecamatan boleh tidak pak Camat. Kan hanya butuh garuda itu kan, stempel, cap. Kepala Desa.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Seperti pemberian rekomendasi cukup oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian.

KETUA RAPAT:

Sekarang kalau Anggota Dewannya programnya ada 150 program. Jadi setiap program harus 150 rekomendasi ke BPP, begitu?

Coba bagaimana?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

Saya sangat memahami bahwa ini terkait dengan pemeriksaan legitimasi Bapak juga bahwa betul sudah tersalurkan Saya paham itu Pak. Tapi rumusannya seperti apa, karena teman-teman disini juga niatnya mau

membantu Pak. Nah kalimat ini buat saya, Bapak terima saja dulu. Nanti di rapat berikutnya baru kita bahas sebagaimana teknis terbaik. Begitu. Iya kan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah mau jam 5. Saya mau ada meeting lagi nanti sore ini.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Kalau misalnya dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan seperti pemberian rekomendasinya dihilangkan dulu sambil nanti pada Raker berikutnya kami carikan kalimat yang lebih tepat.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Betul Pak Sekjen setuju. Termasuk poktan-poktan itu Bapak, katanya SK-nya sudah terbagi habis oleh Bupati sehingga banyak petani yang tidak tergabung di kelompok mana pun ternyata juga tidak bisa bikin kelompok baru. Itu yang kami alami.

KETUA RAPAT:

Begini saja.

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat kegiatan pelaksanaan tersebut.

(yang lain hilangkan).

Anggota? Pemerintah?

KETUA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian segera menyelesaikan permasalahan klasik yang terus berulang, antara lain seperti permasalahan kualitas benih jagung, distribusi alat dan mesin pertanian, distribusi pupuk bersubsidi serta gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan membentuk Panja Impor Produk Hortikultura dalam rangka pelaksanaan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah guna menyelesaikan permasalahan di sub sektor hortikultura dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

Pak Momon,

Masalah Panja Bapak tidak setuju kalau kami buat kami tanda tangan, jalan. Betul tidak? MD3-nya kan begitu. MD3-nya seperti itu. Karena kita mitra saya hormati Bapak. Tetap MD3 kami tanda tangan lebih dari 50% jalan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Ya setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan melakukan impor tanpa rekomendasi impor produk

hortikultura, RIPH, dan mempertimbangkan untuk tidak memberikan RIPH pada permohonan berikutnya.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

10. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skala prioritas program dan kegiatan utama berdasarkan peta wilayah pengembangan komoditas pertanian yang tepat.
Anggota?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, apa lagi?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya saya mohon dimasukkan dalam kesimpulan rapat masalah kartu tani yang Mulia Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kartu tani itu Bapak ini tidak ada domain, nanti di waktu Raker dimasukkan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya tapi evaluasi penting Pak dari PSP terkait kartu tani Pak.

KETUA RAPAT:

Percuma tidak bisa. Itu harus Rapat Kerja.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke terima kasih Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ketua yang ngatur.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Sama orang tua itu harus nurut sekali-kali.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Jadi kenapa Nomor 10 ini dimasukan seperti usulan tadi, Pak Charles minta tetap ada kedelai tetapi harus wilayah-wilayahnya harus ada pemetaan yang jelas.

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini kami persilakan Saudara Sekjen Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kata penutup.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Saya terima kasih atas nama Kementerian Pertanian karena pada hari ini bisa menghasilkan kesimpulan yang Inshaa Allah kami tindaklanjuti terutama terkait dengan penyempurnaan program dan kegiatan Tahun 2021 dan percepatan anggaran. Nah ini yang bertepatan anggaran saya juga minta Eselon I harus kerja keras sehingga target-target yang ditetapkan dan diarahkan oleh Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota bisa di implementasikan.

Sekali lagi terima kasih. Karena saran-sarannya luar biasa walaupun tadi ada yang sempit ini tapi saya paham semuanya untuk kemudahan masyarakat pertanian di Indonesia.

Terima kasih Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Teman-teman Anggota,

Saya ingatkan CPCL untuk hortikultura dan yang lainnya banyak yang belum menyetorkan supaya serapan anggarannya segera selesai maka segera juga usulannya diusulkan. Jangan Cuma bisa nyalahkan.

Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamuallaikum Warahamatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001

